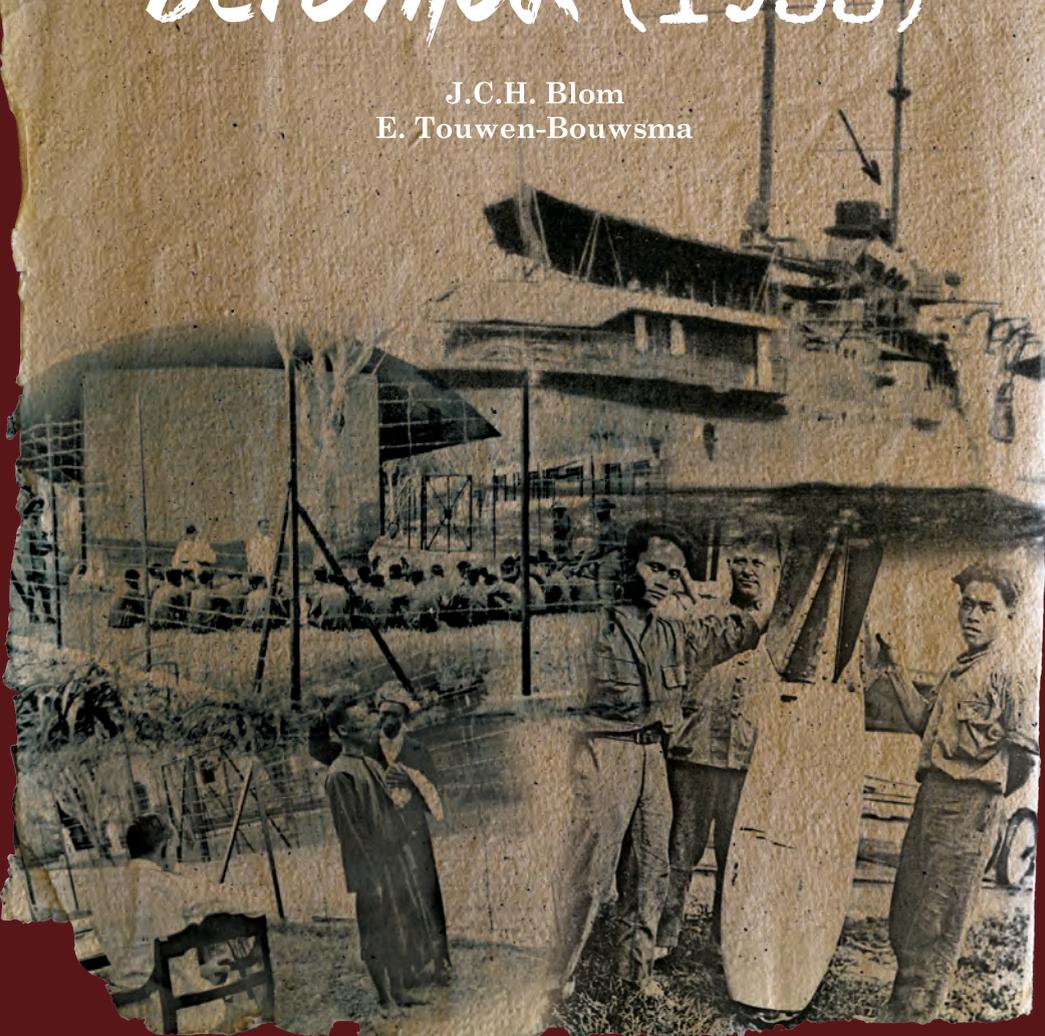




Pengantar: Taufik Abdullah

De Zeven Provinciën
*Ketika Kelas Indonesia
Berontak (1933)*

J.C.H. Blom
E. Touwen-Bouwsma



De Zeven Provinciën
*Ketika Kelasii Indonesia
Berontak (1933)*

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Pengantar: Taufik Abdullah

De Zeven Provinciën
*Ketika Kelasii Indonesia
Berontak (1933)*

J.C.H. Blom
E. Touwen-Bouwsma

LIPI Press

© 2015 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Katalog dalam Terbitan (KDT)

De Zeven Provinciën: Ketika Kelasi Indonesia Berontak (1933)/J.C.H. Blom dan Elly Touwen-Bouwsma. – Jakarta: LIPI Press, 2015.
xix + 112 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-826-4

1. Sejarah

2. Indonesia

959.802 2

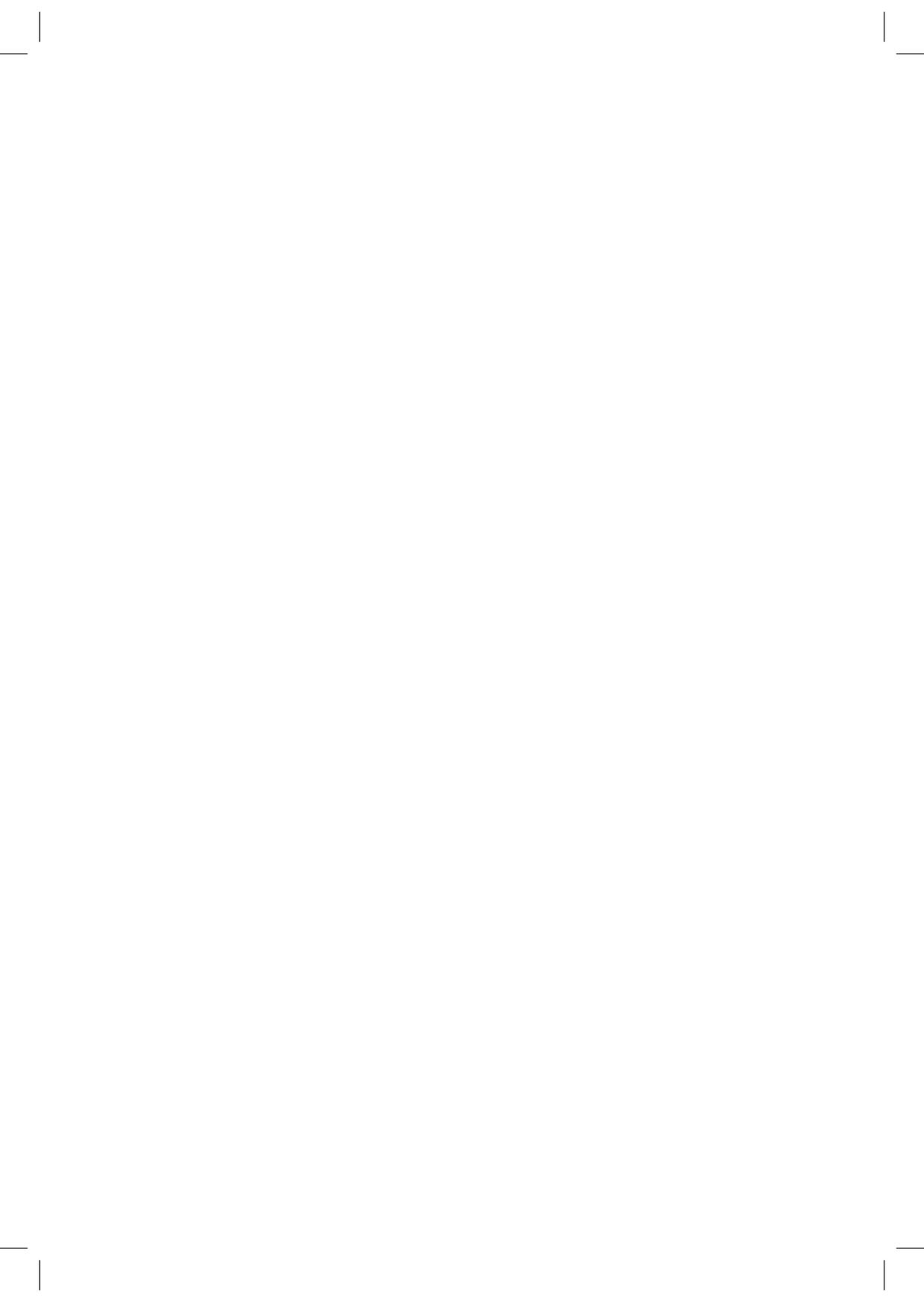
Penerjemah : Jugiarie Soegiarto
Editor : Els Bogaerts
Copyeditor : Tantrina Dwi Aprianita
Proofreader : Fadly Suhendra, Prapti Sasiwi
Penata isi : Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul : Rusli Fazi
Cetakan Pertama : Juli 2015



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021) 314 4591
E-mail: press@mail.lipi.go.id

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	vii
Kata Pengantar	ix
Prakata	xvii
Pemberontakan di Kapal <i>De Zeven Provinciën</i>	1
A. Latar Belakang Sejarah	1
B. Pemberontakan.....	10
C. Penyebab dan Alasan.....	33
Pemberontak atau Perintis Kemerdekaan: Tanggapan Indonesia terhadap Pemberontakan di Kapal <i>De Zeven Provinciën</i>.....	63
A. Latar Belakang.....	65
B. Tanggapan Pers Indonesia.....	74
C. Perintis Kemerdekaan atau Pemberontak.....	77
D. Penutup.....	80
Sumber Penelitian.....	89
Daftar Pustaka.....	95
Lampiran	99
Indeks	107
Biodata Penulis.....	111



Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Penyediaan terbitan ilmiah yang berkualitas adalah salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku *The Zeven Provinciën: Ketika Kelasi Indonesia Berontak (1933)* ini adalah hasil rekonstruksi tentang sejarah Pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën*. Pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën* ini sesungguhnya adalah sebuah peristiwa besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama di tulis oleh J.C.H. Blom. Berdasarkan sumber-sumber yang ditelusurinya, Blom menyimpulkan bahwa pemberontakan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan pergerakan nasionalisme, walaupun pemberontakan ini tidak digerakkan oleh partai politik. Pemberontakan yang melibatkan kelasi dan perwira menengah Belanda tersebut bermula dari protes terhadap pengurangan gaji prajurit.

Bagian kedua ditulis oleh E. Touwen-Bouwsma, memberikan latar belakang dari pergerakan nasional. Meskipun berdasarkan sumber-sumber Indonesia, ternyata rekonstruksi oleh Touwen tidak berbeda secara mendasar dari Blom. Namun, bahan tambahan tersebut memungkinkannya membuat analisis bahwa ternyata pengaruh pemikiran nasionalistis dalam peristiwa ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan Blom.

Semoga buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memperdalam dinamika pergolakan kebangsaan di masa penjajahan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPi Press

Kata Pengantar

Kalau saja lembaran-lembaran sejarah Indonesia modern sempat dibuka-buka maka akan terbacalah bahwa sejak pertengahan tahun 1920-an ketenangan relatif dari negeri yang masih disebut “Hindia Belanda” telah agak tergoncang. Mungkin apa yang disebut sebagai “pemberontakan PKI”, yang terjadi di Banten (Desember, 1926) dan Silungkang (Januari, 1927) bisa dianggap saja sebagai gangguan keamanan yang harus diselesaikan dengan operasi militer. Seandainya hal ini saja tidak mencukupi, bukankah peristiwa ini diikuti juga oleh pembuangan mereka yang dianggap langsung ataupun tidak dalam peristiwa yang tragis ini? Tetapi apa pun penilaian yang akan diberikan bukankah kejadian ini membayangkan betapa semangat perlawanan telah menjadi bagian dalam kesadaran sebagian anak bangsa?

Jika saja renungan sejarah telah diadakan sekadarnya maka peristiwa itu bisalah dianggap sebagai pelajaran bagi anak bangsa tentang bagaimana sebaiknya keresahan sosial-politik di bawah penjajahan diatasi. Maka begitulah, setelah krisis yang mendebarkan diatasi suasana yang relatif tenang pun mulai pula dirasakan. Meskipun demikian, kesadaran kebangsaan dan kemerdekaan ternyata semakin meluas juga menyebar di kalangan masyarakat—setidaknya begitulah halnya di kalangan masyarakat kota. Dalam suasana inilah Kongres Pemuda Indonesia II, yang diadakan di Jakarta, memutuskan untuk mempersatukan organisasi-organisasi kepemudaan yang masih

bersifat kedaerahan dan insuler dalam satu organisasi kepemudaan nasional. Lebih penting lagi kongres ini berhasil merumuskan landasan simbolik dari kesatuan kebangsaan—“bertanah air satu”, “berbangsa satu”, dan “menjunjung satu bahasa persatuan”—Indonesia. Ketiga ungkapan nasionalistis inilah yang kini dikenal sebagai “Sumpah Pemuda”. Dicituskan dengan penuh semangat pada 28 Oktober 1928, “Sumpah Pemuda” ini boleh pula dianggap sebagai simbol yang menyatakan bahwa sebuah bangsa baru, yang bernama “*Indonesia*” telah lahir. Pada waktu itu pula lagu “Indonesia Raya”, untuk pertama kali diperkenalkan dan diakui pula sebagai lagu kebangsaan.

Di masa ketika kebudayaan-cetak telah semakin menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat-kota, dengan semakin meluasnya peredaran surat-surat kabar dan majalah serta penerbitan lain maka idealisme dan romantisme dari hasrat nasionalisme pun semakin meluas dan mendalam juga menjangkau kesadaran bangsa. Dalam suasana ketika kebangkitan pemikiran tentang terwujudnya kesatuan bangsa yang telah melampaui batas-batas etnis dan bahkan insuler (ikatan kepulauan) ini maka bisalah pula dipahami kalau perdebatan tentang landasan perjuangan terjadi juga. Apakah yang harus dijadikan sebagai landasan ideologi perjuangan? Masyarakat yang seperti apakah yang diimpikan? Ketika itulah perdebatan ideologis antara “Islam” dan “kebangsaan”—masing-masing dengan segala corak keragaman internalnya—menjadi bagian dari dinamika proses pertumbuhan kesadaran politik masyarakat.

Kesadaran politik ini semakin meluas karena kaum pergerakan tidak hanya berdebat tentang ideologi dan landasan perjuangan bangsa. Mereka berdebat pula tentang strategi perjuangan dan tentang sikap politik terhadap pemerintah kolonial, yang masih kuat bercokol. Apakah sebaiknya pergerakan nasional menjalankan politik “kooperasi” ataukah “nonkooperasi”? Dengan kata lain, apakah pergerakan kebangsaan sebaiknya ikut serta dalam kelembagaan perwakilan yang didirikan pemerintah, seperti *Volksraad* (Dewan Rakyat) di pusat pemerintahan, “dewan daerah” di beberapa keresidenan yang dinilai pemerintah cukup maju, dan *gemeenteraad* “dewan kota”

di kota-kota yang cukup besar, ataukah harus menjauh dari apa yang dianggap sebagai jebakan kolonialisme itu?

Perdebatan di antara kaum pergerakan kebangsaan ini semakin kompleks karena di kalangan mereka yang telah memilih strategi “non-kooperasi” terdapat juga perbedaan pendapat—apakah kerja sama dengan partai-partai yang telah memilih jalur “kooperasi” perlu dijaga juga? Bukankah tujuan akhir dari kedua pilihan strategi ini ialah kemerdekaan bangsa? Sukarno, tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) (1927) dan kemudian Partindo (1930), dengan tegas mengulurkan tangan kerja sama dengan partai-partai “ko” dan bahkan ia pun tampil pula sebagai tokoh utama dari Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) 1927, yang merangkul kedua kecenderungan strategi politik ini. Tetapi tidak demikian halnya dengan Mohammad Hatta. Sejak ia masih berada di negeri Belanda sampai kembali ke tanah air (1932) dan menjadi pemimpin Pendidikan Nasional Indonesia (lebih dikenal sebagai PNI-Baru), Hatta melihat kerja sama dengan golongan “kooperator” bukanlah suatu perwujudan dari “persatuan”, tetapi sebagai terjadinya “persatean” (Bukankah daging ayam, sapi, atau apa saja bisa dimasukkan dalam suatu tusukan sate?). Bagi Hatta, sikap politik “ko”—kesediaan kerja sama dengan pemerintah—berarti pengakuan akan legitimasi kekuasaan kolonialisme.

Akan tetapi, perdebatan yang berwajah banyak ini malah semakin memperluas dan memperkuat semangat nasionalisme di kalangan masyarakat-bangsa. Maka betapapun Boven Digul, tanah pembuangan bagi “kaum pergerakan” yang dianggap berbahaya, selalu mengancam, tetapi pengaruh hasrat nasionalisme semakin meluas juga. Pemikiran dan kesadaran nasionalisme yang sangat persuasif yang pernah disampaikan Hatta dalam pidato pembelaannya, *Indonesia Vrij* (Indonesia Merdeka), di pengadilan Den Haag (1928) dan pidato pembelaan yang berapi-api dari Sukarno (1930) *Indonesia Menggugat* (*Indonesia klaagt aan*) bukan saja memperdalam pemahaman masyarakat-bangsa tentang makna nasionalisme, melainkan juga

semakin memperluas pengaruh kesadaran kebangsaan Indonesia, yang merelatifkan perbedaan-perbedaan etnis.

Maka bolehlah dikatakan bahwa betapapun berbagai ujian telah dilalui, tetapi ketika tahun 1930-an telah dimasuki pengaruh nasionalisme—dengan segala corak perbedaan ideologi dan perdebatan tentang strategi perjuangan—semakin meluas di kalangan masyarakat atau setidaknya begitulah halnya di kalangan masyarakat-kota. Akan tetapi, dalam suasana inilah pula dua peristiwa penting terjadi dan seketika itu pula ujian politik yang lebih keras tidak terhindarkan.

Pada bulan September 1931, de Graeff, yang umum dianggap sebagai Gubernur Jenderal yang paternalistik dan liberal, digantikan oleh de Jonge. Dengan semboyan, “Hidup dulu, kemudian politik”, de Jonge, sang Gubernur Jenderal yang bekas pejabat tinggi BPM ini, tidak lagi memberi angin pada pergerakan politik kebangsaan. Maka seketika itu pula suasana politik berubah secara drastis. Kebebasan relatif yang sempat dialami oleh partai dan tokoh politik kebangsaan mulai dikeang dengan berbagai hambatan—partai-partai dan tokoh-tokoh pergerakan mulai dikenakan larangan rapat, keharusan bepergian dengan pas perjalanan dan sebagainya. Pada tingkat yang tertinggi tentu saja ancaman penangkapan dan pembuangan. Pemerintah mempunyai apa yang disebut *bak-bak luar biasa* (*exorbitante rechten*).

Akan tetapi, terlepas dari semangat konservatisme yang mungkin sekali telah menjadi bagian dari dirinya, pemerintah juga menghadapi masalah yang riil. De Jonge diangkat sebagai Gubernur Jenderal ketika dunia—bukan saja tanah jajahan Belanda yang masih disebut Hindia Belanda—sedang memasuki situasi terjadinya krisis keuangan yang serius. Ia mulai berkuasa ketika Hindia Belanda telah memasuki “zaman malaise”. Dalam situasi ini bukan saja pemerintah yang harus mengadakan penghematan, masyarakat umum pun sangat merasakan apa artinya krisis keuangan itu. Jika di kalangan masyarakat kota banyak yang harus kehilangan pekerjaan maka masyarakat desa pun merasakan pula betapa kerja keras tidak bisa menjamin terpenuhinya segala kebutuhan.

Ketika pergerakan politik kebangsaan sedang menaik dan krisis ekonomi telah pula terjadi, apakah sikap pemerintah, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang konservatif, kalau bukan penghematan dan pengekangan pergerakan kebangsaan? Tahun 1933 boleh juga dicatat sebagai tahun ketika tokoh-tokoh utama pergerakan kebangsaan yang “nonkooperator” bukan saja semakin menghadapi kekangan dan larangan, tetapi juga pembuangan. Ketika inilah pemimpin-pemimpin terkemuka golongan “nonkooperator”, seperti Sukarno dan Hatta serta kawan-kawan ditangkap dan tanpa pengadilan diasingkan.

Akan tetapi, salah satu akibat dari penghematan ialah terjadinya sebuah peristiwa yang tidak terduga. Dalam suasana sosial, politik, dan ekonomi inilah “peristiwa pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën*” terjadi. Pengurangan gaji anak kapal telah memancing keresahan. Hanya saja dalam melaksanakan “politik pengurangan gaji” ini bawaan kolonialisme tidak terlupakan. Kalau anak kapal Eropa mengalami pengurangan gaji 14% maka gaji kelas pribumi dipotong 17%. Kejanggalan dari perbedaan 3% ini sangat dirasakan karena gaji anak-kapal Eropa dua kali lebih besar dari kelas pribumi. Begitulah—sebagaimana dua tulisan dalam buku ini—sambil menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, yang rupanya telah menjadi lagu kegemaran, pemberontakan di kapal tua (dibuat pada tahun 1909) *De Zeven Provinciën* terjadi, di perairan Barat pulau Sumatra—dalam pelayaran dari Ulele kembali ke Surabaya.

Seketika mengetahui pemberontakan kelas di kapal ini telah terjadi maka putusan sederhana pun langsung dibuat—pemberontakan kelas Indonesia di kapal *De Zeven Provinciën* harus dihentikan. Apalagi pada waktu itu pemogokan kelas-kelas Indonesia di Surabaya sedang terjadi pula. Maka pada pukul 9:18, hari Jumat, tanggal 10 Februari 1933, serangan udara pun dilakukan. Ketika semuanya telah selesai, ternyata hasilnya cukup “memuaskan”. Hasil pemboman: 19 orang tewas (16 kelas pribumi dan tiga Eropa) dan 11 luka berat (tiga Eropa dan delapan pribumi, empat akhirnya meninggal). Jadi, korban kelas pribumi ialah 20 orang tewas, sedangkan Eropa tiga orang tewas.

Kegoncangan di kalangan masyarakat pun terjadi seketika, berita pengeboman ini telah tersiar. Betapapun surat-surat kabar harus menahan diri—dalam konteks situasi politik yang telah diperkenalkan dengan delik pers yang selalu mengancam—kehebohan publik atas peristiwa ini terjadi juga. Ketika tokoh-tokoh dari partai-partai penganut strategi “nonkooperator” sudah tidak bisa berkomentar banyak—kalau tidak diasingkan, mereka telah terkena berbagai larangan—maka para pemimpin partai kooperator pun tampil ke depan. Ketika inilah anggota Volksraad, M.H. Thamrin, tokoh Parindra, melancarkan kritiknya yang teramat pedas atas cara pemerintah mengatasi “pemberontakan *De Zeven Provinciën*”. Pada klimaks pidatonya ia mengatakan “peristiwa ini membuktikan betapa pemerintah Kristen tidak bertuhan”. Diucapkan di sidang Volksraad—bukan di rapat umum atau di surat kabar—pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau loncatan kisah sejarah boleh dilakukan maka bisalah dikatakan bahwa dendam pemerintah kolonial tak pernah hilang sampai akhir hayat Thamrin. Ia meninggal dunia (1940) ketika berada di bawah pengawasan intel.

Pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën* tidaklah suatu kejadian yang terpisah dari dinamika kesejarahan yang sedang dialami Indonesia. Karena itulah mempelajari peristiwa pemberontakan di kapal ini bukan sekadar mengetahui seluk beluk dari sebuah kejadian yang terjadi di suatu masa dan di suatu tempat. Betapapun suatu peristiwa unik adalah pada dirinya, namun pemahaman tentang peristiwa yang unik ini sesungguhnya adalah pula pendalaman pemahaman tentang dinamika zaman. Pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa yang masing-masing unik pada dirinya adalah pula sesungguhnya jalan ke arah pemahaman yang mendalam pada gejala dan peristiwa kesejarahan lain yang terjadi dalam konteks dimensi waktu yang bersamaan.

Maka begitulah dalam perspektif komparatif “pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën*” memperlihatkan bukan saja betapa rasa ketidakadilan merangsang rasa saling keterikatan sesama kelas kapal,

tetapi juga betapa hasrat nasionalisme Indonesia telah pula semakin menyebar. Bukankah para kelasi yang berontak itu terdiri dari beberapa suku-bangsa? Bukankah pula mereka adalah penganut agama yang berbeda-beda? Dan mereka pun menjadikan lagu “Indonesia Raya” sebagai tanda betapa keresahan ekonomi telah terpaut erat dengan solidaritas antaretnis yang telah semakin terjalin.

=====

Taufik Abdullah

AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



Prakata

Pada 1933 di dekat Aceh, Kepulauan Indonesia, terjadi pemberontakan dalam kapal perang *De Zeven Provinciën*. Pemberontakan ini baru berakhir seminggu kemudian, setelah kapal tersebut dibom, dan menelan korban 23 orang tewas. Pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan terburuk dalam sejarah kolonial Belanda.

Empat dekade yang lalu, Prof. Dr. J.C.H. Blom menjadikan peristiwa ini sebagai subjek penelitian program doktornya. Pokok permasalahan dalam penelitiannya adalah tanggapan dan akibat dari pemberontakan itu di Belanda. Pada 1975 ia memperoleh gelar doktor dengan disertasi yang berjudul *De munterij op De Zeven Provinciën. Reactie en gevolgen in Nederland*. Disertasi itu lalu diterbitkan di Bussum 1975 (cetak ulang di Utrecht 1983, dan di Amsterdam 2005, keduanya disertai pendahuluan baru). Bab kedua dalam buku ini—yang dapat dibaca secara lepas—menceritakan dan menganalisis pemberontakan tersebut.

Penelitian Prof. Dr. J.C.H. Blom yang tidak mencakup Indonesia memang agak mengherankan. Namun, ada beberapa alasan di balik hal itu. Prakata dalam buku itu mengacu pada pertimbangan yang disebut *forschungsökonomisch*. Waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke Indonesia, tempat peristiwa terjadi, tidak bisa singkat. Mencari keberadaan sumbernya pun sangat merepotkan, sedangkan sang peneliti tidak menguasai bahasa setempat. Biaya perjalanan ke Indonesia pun tidak murah. Terlebih lagi, pokok penelitian sesungguhnya berkenaan dengan Belanda dan di Belanda tersimpan banyak dokumentasi yang dapat digunakan untuk mengisahkan dan menguraikan pem-

berontakan di kapal perang itu. Penelitian kemiliteran dan hukum yang langsung dilakukan setelah terjadinya pemberontakan itu menghasilkan sederet berkas yang tersimpan rapi di negeri Belanda.

Peneliti tentu tidak bisa disalahkan karena keterbatasan itu. Meskipun demikian, tetap disayangkan bahwa penelitian itu tidak memakai sumber-sumber Indonesia dan melakukan wawancara dengan para pelaku orang Indonesia. Pemberontakan di kapal *Zeven Provinciën* ini sesungguhnya merupakan sebuah peristiwa besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sumber-sumber yang dapat ditelusurinya, Blom menyimpulkan bahwa pemikiran dan gerakan nasionalistis 1930-an dalam kerangka yang lebih luas memang memainkan peranan juga. Namun, pemberontakan di kapal perang itu tidak digerakkan oleh organisasi nasionalistis, dan para pemimpinnya juga tidak bertindak atas pertimbangan nasionalistis. Pemberontakan, yang juga melibatkan kelasi dan perwira menengah Belanda tersebut, sesungguhnya adalah protes terhadap pengurangan gaji prajurit. Jadi, bermula dari urusan kepentingan pribadi.

P.J. Drooglever dalam disertasinya *De Vaderlandse Club 1929–1942* (Franeker, 1980) menulis analisisnya tentang tanggapan dari masyarakat Eropa di Hindia-Belanda pada awal pergantian abad. Lalu penulis kedua, Dr. E. Touwen-Bouwsma, menambahkan kekosongan yang ada dalam analisis tentang pihak Indonesia. Dalam artikel yang dituliskannya untuk kumpulan tulisan *Met alle geweld* (Amsterdam, 2003) dia mencari sumber-sumber Indonesia mana yang dapat ditelusuri. Merekam wawancara dengan mereka yang terlibat memang sudah terlambat, namun masih ada sumber tercetak dan tertulis. Ternyata ada beberapa sumber yang cukup berarti, terutama terbitan berdasarkan wawancara yang ditulis oleh M. Sapija 25 tahun sesudah pemberontakan, yaitu *Sedjarah Pemberontakan di Kapal Tudjuh* (Djakarta, 1960), dan penelitian tahun 1978 menanggapi usulan pemberian gelar Perintis Kemerdekaan bagi para pemberontak. Usulan itu tidak dikabulkan. Tetapi penelitian itu hanya menghasilkan dua makalah, masing-masing ditulis Y. Basri dan R. Santoso, yang dibawakan pada Seminar Sejarah Nasional III (Jakarta, 1981).

Berdasarkan bahan-bahan tersebut, ternyata hasil rekonstruksi pemberontakan dari Touwen tidak berbeda secara mendasar dengan tulisan Blom. Namun, bahan tambahan tersebut memungkinkannya membuat analisis bahwa peran pemikiran nasionalistis dalam protes terhadap pengurangan gaji, jauh lebih besar dibandingkan anggapan Blom. Dalam ceramah-ceramah di Jakarta dan Yogyakarta pada 2006, Blom menganggap temuan itu sebagai tambahan penting. Blom menyimpulkan bahwa meskipun tetap tidak ditemukan petunjuk adanya tindakan langsung dari organisasi nasionalistis, namun pemikiran nasionalistis dan perasaan para pemberontak bisa jadi mempunyai peran yang lebih penting daripada yang diperkirakan. Dalam kunjungan ke Indonesia itu timbul pemikiran untuk menerbitkan bab dari disertasi Blom dan artikel Touwen dalam bahasa Indonesia, agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat Indonesia. Kami gembira hal itu dapat diwujudkan dan menyampaikan terima kasih kepada lembaga dan pribadi yang memungkinkannya, yaitu Prof. Dr. Taufik Abdullah, mantan Kepala LIPI, yang pada kunjungan Blom di Indonesia menekankan betapa pentingnya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia; Els Bogaerts, koordinator program *Indonesia Across Orders. The Reorganization of Indonesian society 1930–1960*, yang menjadi mediator dalam mencari penerjemah yang berkualitas dan penghubung antara pihak Belanda dan Indonesia; dan Penerbit. Tanpa dukungan mereka, proyek ini mungkin tidak akan terwujud; Jugiarie Soegiarto yang bersedia menerjemahkan kedua tulisan ini secara memuaskan. Juga terima kasih kepada direksi Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) yang memberikan subsidi untuk sebagian biaya dan memungkinkan proyek ini terlaksana.

Jakarta, 12 Oktober 2014

Penulis

J.C.H. Blom

E. Touwen-Bouwsma



Pemberontakan di Kapal *De Zeven Provinciën*

J.C.H. Blom

A. LATAR BELAKANG SEJARAH

Anggota marinir Eropa di Hindia-Belanda¹ pada 1930-an secara resmi berada di bawah Departemen Pertahanan Belanda. Artinya, sistem penggajian anggota diatur oleh Departemen Pertahanan. Karena pengeluaran untuk gaji nantinya dibayar kembali oleh pemerintah Hindia kepada pemerintah Belanda maka sudah menjadi kebiasaan bahwa sesudah pembicaraan antara Den Haag dan Batavia, bagi anggota marinir yang bertugas di Hindia-Belanda berlaku kebijakan penggajian Hindia.² Ketika pemerintah Hindia dalam keputusan tanggal 17 Desember 1932 menurunkan lagi gaji pegawai pemerintahan sebanyak 7% (sebelumnya sudah dua kali diturunkan sebesar 5%)³ maka Den Haag dilibatkan menyangkut pengaturan gaji anggota marinirnya. Sementara menunggu keputusan Den Haag tentang anggota marinir Eropa maka bagi anggota marinir dalam negeri, yang digaji langsung dari kas Hindia, untuk sementara tidak termasuk dalam pengaturan pengurangan gaji ini.

Pada 19 Desember, komandan Angkatan Laut Hindia-Belanda, J. F. Osten menyampaikan keberatannya tentang pemberlakuan pengurangan gaji 7% yang sama, yang berlaku bagi pegawai sipil pemerintah kepada Gubernur Jenderal B.C. de Jonge. Karena kedudukan istimewa anggota marinir Eropa di wilayah tropis, menurutnya, secara prinsipil

tidak mungkin memberikan perlakuan yang sama dengan pegawai sipil pemerintah. Menurut Osten, pengurangan gaji sebesar 7% bagi sebagian pegawai Eropa akan “membahayakan kesempatan mencari nafkah hidup”, justru karena kedudukan mereka yang istimewa.⁴

Meski demikian, pemerintah Hindia di Den Haag tetap mengusulkan pengurangan gaji dinaikkan sampai sebesar 17% dan berlaku juga bagi marinir. Di Den Haag, Departemen Urusan Koloni pada 23 Desember menghubungi Departemen Pertahanan.⁵ Di sana, seperti halnya di Hindia, juga muncul keberatan atas usulan itu. Menteri Pertahanan L. N. Deckers menguraikan keberatan itu dalam suratnya kepada Menteri Urusan Koloni, S. de Graaff, pada 29 Desember. Departemen Pertahanan berpendapat bahwa mengingat gaji itu telah dua kali diturunkan masing-masing 5% maka penurunan lebih lanjut hanya mungkin diberlakukan bagi beberapa kelompok saja. Hindia-Belanda tidak bisa begitu saja menerapkan perlakuan yang sama bagi marinir Eropa sebagaimana pegawai sipil pemerintah Hindia. Alasannya, masa tinggal anggota marinir lebih pendek. Mereka juga lebih sering berpindah sehingga membutuhkan lebih banyak biaya. Sering kali keluarga yang ditinggalkan di Belanda juga membutuhkan gaji tersebut. Jadi, bukan hanya tingkat harga di Hindia yang harus diperhitungkan, namun juga tingkat harga di Belanda. Akhirnya, Departemen Pertahanan berpendapat bahwa pengurangan sampai 17% dapat menimbulkan banyak ketidakpuasan. Mengingat Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota marinir maka ia tidak dapat menyetujui pengurangan gaji yang diusulkan.⁶ Jadi, pembicaraan lebih lanjut sangat mendesak.

Karena Gubernur Jenderal mendesak agar keputusan diambil dengan segera maka pada 30 Desember datang telegram dengan berita berikut:

Menteri Pertahanan berkeberatan atas kenaikan pengurangan gaji anggota marinir Eropa sampai 17% dan berpendapat hanya kelompok militer Angkatan Laut tertentu yang dapat dikenai kenaikan tertentu. Karena perundingan dengan Deckers masih beberapa

lama maka peraturan pengurangan gaji anggota marinir yang ada dipertahankan sementara waktu.⁷

Sementara itu, ketegangan melingkupi para anggota marinir di markas besar marinir Hindia-Belanda di Surabaya, berkaitan dengan masalah gaji itu. Pada 16 Desember ketika menghadap komandan Angkatan Laut di Batavia, para pengurus serikat marinir, menyampaikan keberatan mendalam atas pengurangan gaji lebih lanjut.⁸ Pada 26 Desember, di atas kapal *De Zeven Provinciën*, di pelabuhan Surabaya, terjadi ketegangan. Sesudah beribadah, serikat marinir menyanyikan lagu terlarang (disebut lagu serikat),⁹ yang sangat bernuansa proletar dan internasional. Sementara itu, pada 29 Desember dua serikat—yang sesungguhnya sudah dilebur menjadi Serikat Marinir Anak Buah Kapal—yakni Serikat Koprak Marinir Kerajaan dan Serikat Anggota Bintara Marinir, mengadakan rapat untuk memprotes kemungkinan pemberlakuan pengurangan gaji bagi anggota marinir. Rapat didahului dengan gerak jalan unjuk kekuatan sepanjang Kota Surabaya. Dalam rapat diputuskan untuk mengirim telegram kepada Menteri Pertahanan. Dalam perdebatan sengit, muncul pendapat yang menginginkan aksi mogok. Mereka ingin mencontoh keberhasilan awak kapal Inggris dan Australia yang belum lama menempuh jalan “aksi” (pemogokan kerja dan pemberontakan). Para pengurus menolak usulan semacam itu dan tetap memegang kendali. Yang disepakati hanya telegram protes saja.¹⁰

Keesokan harinya, 30 Desember, ada berita tentang penundaan sementara pengurangan gaji anggota marinir. Tentang berita itu ada dua kesalahpahaman. Pertama, berita penundaan itu oleh sejumlah orang dipahami sebagai hasil dari telegram protes, dan karenanya dipandang sebagai keberhasilan serikat. Pada kenyataannya, sebelum penyampaian berita penundaan, mereka yang di Den Haag belum mengetahui adanya protes.¹¹ Lagipula timbul pertanyaan apakah tanggapan secepat itu secara teknis dimungkinkan.¹² Walaupun memang demikian halnya, hampir tidak mungkin bahwa Menteri memberi tanggapan bernada positif terhadap protes-protes serikat yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Oleh karena itu, alasan penundaan lebih

didasarkan pada kenyataan bahwa Departemen Pertahanan serta pimpinan marinir sendiri berkeberatan terhadap usulan pengurangan gaji, dan bukan karena telegram protes.

Salah paham kedua berkaitan dengan interpretasi atas berita penundaan itu. Berita yang diterima oleh Sekretariat Negara, sampai di tangan Komandan Marinir Surabaya melalui komandan Angkatan Laut di Batavia, berbunyi sebagai berikut:

Sebagai tindak lanjut pembicaraan antara Pemerintah Hindia dan Pejabat Tertinggi, sambil menunggu peraturan lebih lanjut pengurangan yang sudah ada dalam keputusan sebesar 10% untuk militer dan Angkatan Laut tetap dipertahankan.¹³

Berita penundaan tersebut diumumkan pada 31 Desember 1932. Dari berita itu, banyak yang menarik kesimpulan bahwa untuk sementara tidak akan ada kenaikan pengurangan. Frasa, “sambil menunggu peraturan lebih lanjut” dianggap sebagai hasil kerja komisi-Van Buuren, sebuah komisi yang dibentuk pada 1932 bertugas meninjau kembali sistem penggajian pegawai pemerintah di Hindia-Belanda.¹⁴

Masih pada hari yang sama, 31 Desember, Komandan Marinir Surabaya, D. Scalongne, mengundang pengurus serikat-serikat marinir terbesar untuk membicarakan situasi seputar penundaan pengurangan gaji. Kemudian para pengurus serikat marinir bersangkutan melaporkan hasil pembicaraan dengan cara yang berbeda-beda. Diduga ada kesalahan interpretasi di kalangan mereka atas berita penundaan itu. Bahkan dijanjikan bahwa serikat akan dimintai pendapat dalam peninjauan gaji mendatang.¹⁵ Hal itu kemudian secara tegas dibantah oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, ketika ditengarai adanya keraguan pada para pengurus, Komandan Skuadron M.H. van Dulm yang juga hadir menjawab:

Jadi, Anda sekalian memahami dengan baik masalahnya. Untuk sementara tidak ada pengurangan. Jadi, bukan berarti bahwa tidak akan ada pengurangan, hanya saja pengurangan tanggal 1 Januari dibatalkan. Apakah akan ada pengurangan lain dan kapan, tak bisa dikatakan. Mungkin satu bulan lagi, mungkin juga tiga bulan

atau lebih lama, kami tidak tahu. Dan bagaimana pengurangan itu nantinya, kami juga tidak tahu. Mungkin akan ada peraturan di mana penghasilan kecil dikurangi sedikit dan penghasilan besar dikurangi lebih banyak, itu mungkin saja, tetapi kami tidak tahu sama sekali. Satu-satunya yang kami tahu adalah bahwa pengurangan tambahan yang tertanggal 1 Januari batal.¹⁶

Sebuah berita pers pada awal Januari 1933 yang memuat interpretasi para pengurus serikat, langsung diralat atas permintaan yang berwenang di marinir.¹⁷

Pertanyaan siapa yang benar dalam hal ini, tak pernah dapat dijawab. Buku putih resmi, berdasarkan interogasi kemudian, mengikuti penafsiran pejabat marinir.¹⁸ Mollema yang pada 1934 menulis buku tentang pemberontakan,¹⁹ dan Swarte, penulis sejarah serikat,²⁰ keduanya berpatokan pada buku putih itu. Ralat langsung terhadap kesalahan berita di koran, atas permintaan pemimpin marinir, juga mendukung hal itu. Bagi para pejabat marinir, situasi pada 31 Desember itu juga tidak jelas. Namun, beberapa hari kemudian masalahnya lebih jelas berkat pembicaraan dengan Batavia. Maka tak sedikit pun terbukti atau terlihat bahwa pandangan pemimpin marinir, sebagai interpretasi kemudian, salah. Duduk masalahnya, sebagaimana mereka gambarkan, justru sangat masuk akal. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita memahami perilaku para pengurus serikat, yang secara garis besar tentunya tidak semata salah atau menyesatkan. Pendapat Mollema bahwa dalam hal ini harus dilibatkan bantuan psikiater atau psikolog²¹, tentulah bukan sebuah jawaban. Jawabannya mungkin lebih terletak pada situasi yang tak jelas. Bagaimanapun orang Belanda melihatnya, termasuk pendapat pejabat marinir yang juga sama ragunya, tidak mampu memadamkan “bara bahagia” para pengurus serikat. Lepas dari semua yang terjadi, sesudah 1 Januari masih diselenggarakan beberapa rapat antarpengurus serikat. Keadaan Surabaya kembali tenang. Pada 2 Januari, sebagian besar kapal bertolak dari Surabaya untuk pelayaran latihan jangka pendek dan jangka panjang.²²

Pembicaraan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Urusan Koloni pada pertengahan Januari menghasilkan sebuah kompromi. Terhitung mulai 1 Februari 1933 diberlakukan pengurangan tambahan sebesar 4% terhadap gaji anggota marinir Eropa di Hindia-Belanda. Bagi perwira yang telah berdinasi lebih dari 10 tahun dapat dikurangi sampai 7%.²³ Dalam ketentuan pengurangan gaji itu—sebagaimana yang berlaku pada pengurangan-pengurangan sebelumnya, gaji yang diperoleh di Hindia sedikitnya tetap lebih besar 10% dari jumlah pokok yang berlaku di Belanda (tanpa memedulikan pengurangan gaji yang diberlakukan di Belanda).²⁴ Berdasarkan keputusan itu, Hindia pun harus mengambil keputusan secepatnya bagi anggota marinir pribumi. Sejauh ini diberlakukan persentase pengurangan gaji yang sama bagi anggota pribumi dan Eropa. Namun, mengingat pengurangan gaji bagi marinir Eropa sebesar 4% dan 7% sesuai dengan kemampuan maka menurut pemerintah Hindia-Belanda, pengurangan gaji bagi anggota pribumi setidaknya sebesar 7%.²⁵ Keputusan pengurangan gaji diumumkan secara resmi masing-masing pada 26 Januari dan 30 Januari.²⁶ Ikhtisar aturan penggajian, sejauh menyangkut anggota berpangkat di bawah perwira, dapat dilihat di Tabel 1 dan 2.²⁷

Pengurangan gaji anggota marinir Eropa diumumkan pada malam sebelum libur—kecuali bagi yang jaga piket—tiga hari. Perayaan Lebaran (hari raya Islam yang sering kali secara sembarangan disebut tahun baru pribumi), bersamaan dengan libur dua hari, yang diikuti hari Minggu (27, 28, dan 29 Januari). Dalam rangka perayaan itu, kebanyakan kapal kembali ke Surabaya.²⁸ Tiga hari itu berjalan penuh gejolak. Sebagian besar anggota diliputi kemarahan atas keputusan pengurangan gaji tersebut, terutama jika mengingat kepastian sebelumnya bahwa pengurangan itu justru dibatalkan. Pada hari-hari itu terjadi sejumlah demonstrasi, rapat, dan pertemuan tanpa koordinasi. Pada 27 Januari, sebagian besar rapat serikat berlangsung dalam suasana marah dan gelisah. Termasuk rapat serikat perwira madya, yang pada awal Januari masih mengirimkan telegram ucapan terima kasih kepada Menteri Pertahanan.²⁹

Tabel 1.

De bezoldiging van de Europese onderofficieren en manschappen vóór en na de verschillende kortingen. Algemene schaal; hoofden van gezinnen met één kind; het hoofd van het gezin ouder dan 23 jaar; het gezin blijft in Nederland.

Rangen en standen	Soldijten per dag aan boord						
	In Nederland ¹⁾			In Indië			
	Onverminderd.	Na korting op 1 Maart 1932.	Na korting op 1 Januari 1933.	Onverminderd.	Na 5% korting op 1 Juli 1931.	Na 10% korting op 1 Januari 1932.	Na 14% korting op 1 Februari 1933.
Matroos der tweede klasse . . .	2.52	2.47	2.37	2.85	2.77	2.77	2.77
Na 2 jaar dienst als zoodanig . .	2.52	2.47	2.37	3.20	3.05	2.90	2.80
Matroos der 1e klasse . . .	3.77	3.69	3.55	4.05	4.05	4.05	4.05
Na 2 jaar dienst als zoodanig . .	3.92	3.83	3.69	4.35	4.31	4.31	4.31
„ 4 „ „ „ „ „ „	4.22	4.13	3.97	4.70	4.64	4.64	4.64
„ 6 „ „ „ „ „ „	4.37	4.27	4.11	5.05	4.81	4.81	4.81
„ 8 „ „ „ „ „ „	4.52	4.42	4.25	5.35	5.10	4.97	4.97
„ 10 „ „ „ „ „ „	4.67	4.56	4.38	5.70	5.45	5.15	5.14
„ 12 „ „ „ „ „ „	4.67	4.57	4.38	6.05	5.75	5.45	5.25
„ 14 „ „ „ „ „ „	4.67	4.57	4.38	6.25	5.95	5.65	5.40
„ 16 „ „ „ „ „ „	4.67	4.56	4.38	6.25	5.95	5.65	5.40
Korporaal	4.47	4.37	4.20	5.15	4.92	4.92	4.92
Na 2 jaar dienst als onderoff. . .	4.62	4.52	4.34	5.90	5.65	5.35	5.10
„ 4 „ „ „ „ „ „	4.82	4.71	4.53	6.60	6.30	5.95	5.70
„ 6 „ „ „ „ „ „	5.02	4.91	4.72	7.35	7—	6.85	6.35
„ 8 „ „ „ „ „ „	5.22	5.10	4.90	8.05	7.65	7.25	6.95
„ 10 „ „ „ „ „ „	5.42	5.30	5.09	8.75	8.35	7.90	7.55
„ 12 „ „ „ „ „ „	5.42	5.30	5.08	9.50	9.05	8.55	8.20
„ 14 „ „ „ „ „ „	5.42	5.29	5.08	9.50	9.05	8.55	8.20
Sergeant	5.42	5.29	5.09	6.95	6.65	6.30	6—
Na 4 jaar dienst als onderoff. . .	5.42	5.30	5.08	7.80	7.45	7.05	6.75
„ 6 „ „ „ „ „ „	5.52	5.39	5.18	8.65	8.25	7.80	7.45
„ 8 „ „ „ „ „ „	5.78	5.64	5.42	9.50	9.05	8.55	8.20
„ 10 „ „ „ „ „ „	6.09	5.94	5.70	10.35	9.85	9.35	8.95
„ 12 „ „ „ „ „ „	6.39	6.13	5.88	11.20	10.65	10.10	9.65
„ 14 „ „ „ „ „ „	6.50	6.33	6.07	12.05 ²⁾	11.45 ²⁾	10.85 ²⁾	10.40 ²⁾
„ 16 „ „ „ „ „ „	6.66	6.48	6.22	12.05 ²⁾	11.45 ²⁾	10.85 ²⁾	10.40 ²⁾
„ 18 „ „ „ „ „ „	6.81 ²⁾	6.62 ²⁾	6.36 ²⁾	12.90 ²⁾	12.30 ²⁾	11.65 ²⁾	11.10 ²⁾
„ 20 „ „ „ „ „ „	6.96 ²⁾	6.76 ²⁾	6.49 ²⁾	12.90 ²⁾	12.30 ²⁾	11.65 ²⁾	11.10 ²⁾
Sergeant-majoor	5.83	5.69	5.46	9.25	8.80	8.35	8—
Na 8 jaar dienst als onderoff. . .	6.04	5.89	5.66	10.10	9.60	9.10	8.70
„ 10 „ „ „ „ „ „	6.24	6.08	5.84	10.95	10.45	9.90	9.45
„ 12 „ „ „ „ „ „	6.45	6.28	6.03	11.80	11.25	10.65	10.15
„ 14 „ „ „ „ „ „	6.66	6.48	6.22	12.65	12.05	11.40	10.90
„ 16 „ „ „ „ „ „	6.86	6.67	6.40	13.50	12.85	12.15	11.65
„ 18 „ „ „ „ „ „	7.07	6.87	6.60	14.35 ²⁾	13.65 ²⁾	12.95 ²⁾	12.35 ²⁾
„ 20 „ „ „ „ „ „	7.32	7.11	6.82	14.35 ²⁾	13.65 ²⁾	12.95 ²⁾	12.35 ²⁾
„ 22 „ „ „ „ „ „	7.58 ²⁾	7.35 ²⁾	7.06 ²⁾	14.35 ²⁾	13.65 ²⁾	12.95 ²⁾	12.35 ²⁾
Adjutant-onderofficier	6.60	6.42	6.17	10.90	10.30	9.75	9.30
Na 10 jaar dienst als onderoff. . .	6.91	6.72	6.45	11.85	11.10	10.50	10.05
„ 12 „ „ „ „ „ „	7.22	7.01	6.72	12.50	11.90	11.25	10.75
„ 14 „ „ „ „ „ „	7.53	7.31	7.01	13.35	12.70	12.05	11.50
„ 16 „ „ „ „ „ „	7.84	7.60	7.30	14.20	13.50	12.80	12.25
„ 18 „ „ „ „ „ „	8.15	7.90	7.58	15.05	14.30	13.55	12.95
„ 20 „ „ „ „ „ „	8.30	8.04	7.72	15.05	14.30	13.55	12.95
„ 22 „ „ „ „ „ „	8.46	8.19	7.86	15.05	14.30	13.55	12.95

¹⁾ Hieronder begrepen de kindertoelagen en gehuwdentoeslagen.

²⁾ Alleen voor sergeant-majors voor wie volgens de organisatie een hoogere rang niet bereikbaar is, zoodaer voor den onderkapitein.

Bron: zie noot 27 van hoofdstuk 2.

Tabel 2.

De bezoldiging van de inlandse onderofficieren en manschappen vóór en na de kortingen. Algemene schaal.

Rangen en standen	Aantal jaren dienst na het verlaten der K.L.S.	Soldijen per dag onverminderd	Soldijen per dag na 5% korting 1 Juli 1931	Soldijen per dag na 10% korting 1 Januari 1932	Soldijen per dag na 17% korting 1 Februari 1933
Lichtmatroos	—	0.50	0.50	0.50	0.50
Matroos der 3e klasse en daarmee gelijkgestelden . . .	—	0.80	0.80	0.80	0.75
Matroos der 2e klasse en daarmee gelijkgestelden . . .	—	1.25	1.25	1.20	1.05
	3	1.45	1.45	1.35	1.25
Matroos der 1e klasse en daarmee gelijkgestelden . . .	3	1.65	1.65	1.55	1.40
	5	1.85	1.80	1.70	1.55
	7	2.10	2.—	1.90	1.75
	9	2.35	2.25	2.15	2.—
Korporaal	4	1.95	1.90	1.80	1.65
	5	2.10	2.—	1.90	1.75
	7	2.40	2.30	2.20	2.—
	9	2.70	2.60	2.45	2.25
	11	3.05	2.90	2.75	2.55
	13	3.50	3.35	3.15	2.95
Sergeant.	6	3.—	2.85	2.70	2.50
	7	3.30	3.15	3.—	2.75
	9	3.65	3.50	3.30	3.05
	11	4.—	3.80	3.60	3.35
	13	4.45	4.25	4.05	3.70
	15	4.90	4.70	4.45	4.10
	17	5.35	5.10	4.85	4.45
	19	5.85	5.60	5.30	4.90
Sergeant-majoor	9	4.55	4.35	4.10	3.80
	11	4.90	4.70	4.45	4.10
	13	5.35	5.10	4.85	4.45
	15	5.80	5.55	5.25	4.85
	17	6.25	5.95	5.65	5.20
	19	6.75	6.45	6.10	5.65
	21	7.30	6.95	6.60	6.10
	23	7.85	7.50	7.10	6.55
Adjutant-onderofficier. . . .	13	6.60	6.30	5.95	5.50
	15	7.05	6.70	6.35	5.90
	17	7.50	7.15	6.75	6.25
	19	8.—	7.60	7.20	6.65
	21	8.55	8.15	7.70	7.10
	23	9.10	8.65	8.20	7.60

Bron: zie noot 27 van hoofdstuk 2.

Semua menginginkan aksi protes, sedangkan para pengurus sekali lagi menentang hal itu. Namun, kali ini ada beberapa pengurus yang tidak sepakat dengan penolakan. Sementara itu, masih pada 27 Januari, pemimpin marinir mengeluarkan larangan untuk segala bentuk rapat anggota marinir, sehubungan dengan insiden yang terjadi dalam rapat-rapat dan di kota. Larangan itu tidak lagi memungkinkan adanya pertemuan yang lebih besar, dan membatasi kemungkinan para pengurus serikat memengaruhi para anggota serikat. Yang menonjol adalah keresahan. Apa yang terjadi pada hari-hari itu tidak dapat ditelusuri sepenuhnya, namun ada berita yang begitu gawat, yang diterima pemimpin marinir lewat polisi dan dinas penerangan. Hal itu menjadi alasan bagi komandan Angkatan Laut untuk meminta bantuan tentara, demi menghadapi masalah yang lebih besar.³⁰

Masalah itu telah muncul pada 30 Januari, yakni pemogokan kerja, baik di kapal-kapal maupun di lembaga-lembaga marinir di darat. Lebih dari 400, hampir semuanya Eropa, awak kapal terlibat di dalamnya. Setelah dilakukan tekanan terhadap mereka dan dikeluarkan peringatan pribadi, dalam waktu singkat sebagian besar dari mereka kembali bekerja. Beberapa di antaranya, kira-kira 40 orang, tetap mogok kerja dan ditahan. Meski ada keterlambatan, kapal-kapal yang dijadwalkan berlayar dapat berangkat. Namun, masalah tidak selesai di sini. Sebagaimana disebutkan, pada hari yang sama diumumkan pengurangan gaji bagi anggota marinir pribumi. Sampai saat itu hanya sedikit yang terlibat masalah, tetapi berita pengurangan gaji dan contoh pemogokan anggota Eropa, menyebabkan terjadi pemogokan yang sama di kalangan anggota pribumi pada 3 Februari. Pejabat berwenang yang sudah mengkhawatirkan hal itu menentukan langkah dan segera bertindak. Sekali lagi dilakukan penekanan agar para marinir pribumi kembali bekerja dan diberikan peringatan pribadi. Namun, dampaknya kecil. Hanya beberapa orang saja yang patuh. Oleh karena itu, harus dilakukan penangkapan besar-besaran terhadap kira-kira 450 orang marinir pribumi. Setelah penangkapan itu, markas besar marinir Surabaya kembali tenang.³¹

B. PEMBERONTAKAN

Pada 2 Januari 1933 kapal Hr. Ms. De Zeven Provinciën bertolak dari Surabaya untuk pelayaran latihan dan unjuk kekuatan ke Sumatra.³² Kapal perang itu dibangun pada 1908 dan mulai digunakan pada 1910, berbobot 6,530 ton, panjangnya 101,50 meter dan lebar 17,10 meter. Kapal itu tergolong kapal tua dan telah naik dok untuk perbaikan besar-besaran pada 1919 dan 1920, namun masih merupakan salah satu kapal terbesar di Hindia-Belanda saat itu. Selain itu, kapal tersebut juga dilengkapi persenjataan berat. Meriamnya bahkan yang terbesar di seluruh Hindia-Belanda. Namun ketepatan tembaknya tak seberapa karena buruknya panel bidik, dan sama sekali tak ada penangkis serangan udara. Kapal itu juga hanya berkecepatan sedang.³³ *De Zeven Provinciën* dipergunakan sebagai kapal latihan. Para pelaut pribumi mendapatkan pendidikan praktik di kapal ini, sesudah menempuh pendidikan yang lebih bersifat teoretis di Pendidikan Dasar Pelaut Pribumi (*Kweekschool voor Inlandse Schepelingen* atau KIS) di Makassar.³⁴

Dalam pelayaran latihan tersebut, awak kapal terdiri dari 141 Eropa (30 orang di antaranya perwira dan 26 orang perwira madya) dan 256 orang pribumi (tujuh orang di antaranya perwira madya dan 80 orang siswa KIS).³⁵

De Zeven Provinciën mendapat julukan kapal hukuman.³⁶ Secara formal hal itu tidak benar. Namun, beberapa perwira berumur ditempatkan di kapal itu atas pertimbangan tindak indisipliner atau kurang cakap dalam menjalankan tugas di tempat lain. Mereka mendapat kesempatan memperbaiki diri di *De Zeven Provinciën*. Kapal *De Zeven Provinciën* dipilih untuk keperluan itu karena merupakan satu-satunya kapal besar, bukan kapal modern, yang lingkup pelayarannya luas.³⁷ Tidak ditemukan petunjuk mengenai penempatan bawahan orang “bermasalah” di *De Zeven Provinciën*. Memang di kapal itu ada dua orang, yang dapat dipastikan termasuk kategori “bermasalah” yang keberadaannya juga diketahui pemimpin marinir. Yang pertama adalah awak Eropa Kopral-Masinis M. Boshart. Sebelumnya dia menduduki jabatan pengurus di beberapa serikat anggota. Pada rapat-

rapat di Surabaya sekitar pergantian tahun, dia termasuk juru bicara yang paling keras. Komandan *De Zeven Provinciën*, P. Eikenboom, sudah diberi peringatan tentang dia.³⁸ Kedua, yang ada di kapal itu adalah kelasi kelas satu pribumi Paradja,³⁹ yang pernah berhubungan (dan mungkin masih berhubungan) dengan kelompok-kelompok nasionalis, dan hal itu sudah diketahui oleh pemimpin tertinggi. Mungkin komandan tidak mendapat cukup keterangan tentang dia.⁴⁰

Pada awal pelayaran, Komandan (banyak orang mengenalnya sebagai pelaut yang baik, sangat ramah dan populer di kalangan anggota bawahan⁴¹) berpendapat bahwa suasana di kapal baik.⁴² Dia bertindak sebagaimana seharusnya. Maka, tidak sesuai yang diamanatkan pembicaraan antarkomandan pada 31 Desember di Surabaya, sejumlah aturan tidak dijalankan ketika terjadi ketegangan. Salah satu dari aturan itu adalah perintah mempersenjatai diri bagi para perwira. Menurut pendapat Komandan, karena pengurangan gaji ditunda maka aturan itu bisa diabaikan, dan dia tidak mengharapkan akan timbul masalah lagi.⁴³

Sepanjang perjalanan sampai ke dermaga Olehleh, dekat Kota Raja (Banda Aceh) di ujung barat laut Sumatra, yang sesuai jadwal tiba hari Jumat 3 Februari,⁴⁴ tak terjadi masalah berarti. Hanya terjadi sejumlah insiden kecil. Beberapa kali timbul keluhan tentang makanan. Di Sibolga, pantai barat Sumatra, para awak enggan bermain sepak bola persahabatan. Namun, setelah diancam bahwa permainan itu bagian kerja, bukan sukarela maka bermainlah mereka. Hasilnya mereka kalah 10-0.⁴⁵ Di sebuah cafe di Padang, juga di pantai barat Sumatra, terjadi pertikaian antara perwira madya dan anggota pasukan. Hal seperti itu terjadi lagi beberapa waktu kemudian di Sabang, barat laut Sumatra.⁴⁶

Sementara itu, keputusan pengurangan gaji bagi anggota Eropa telah diumumkan. Hal itu menyebabkan kemarahan yang sama seperti yang terjadi di Surabaya.⁴⁷ Namun, di kapal *De Zeven Provinciën* tidak terjadi pemogokan. Hanya ada “perayaan tahun baru”, diselenggarakan oleh anggota pribumi dalam rangka Lebaran, dan dihadiri oleh 30 anggota marinir Eropa. Di sana dibicarakan tentang pengurangan

gaji. Pertemuan yang berlangsung di sebuah bioskop di Sabang itu (yang izinnnya diberikan semata-mata sebagai “resepsi tahun baru”), mendapat pengawasan dari inspektur polisi. Namun, ia mendapat panggilan karena ada kebakaran. Ketika itu para hadirin mengubah resepsi menjadi rapat protes, lalu, inspektur polisi membubarkan pertemuan itu.⁴⁸

Berita-berita tentang pemogokan kerja di Surabaya tentu saja menaikkan ketegangan. Beberapa upaya telah dilakukan, terutama di kalangan pribumi, untuk mengatur pemogokan kerja di kapal *De Zeven Provinciën*. Usaha-usaha itu gagal, dan sangat disesali oleh mereka yang menginginkannya.⁴⁹ Seperti disebutkan sebelumnya, pengurus cabang Serikat Marinir Anak Buah Kapal (*Bond van Mari-neschepelingen*), peleburan dari serikat koprak dan yang berpangkat di bawahnya, pada 31 Januari mengundurkan diri dengan alasan semakin tingginya ketegangan yang ada di kapal. Hal yang sama dilakukan pula oleh pengurus dua serikat pribumi, Serikat Kelasi Pribumi (*Inlandse Matrozen Bond*) dan Serikat Kelasi Pribumi Kristen (*Christelijke Inlandse Matrozen Bond*). Mereka menghadap komandan dan menyampaikan pengunduran diri tersebut, dengan alasan bahwa, sesudah apa yang terjadi di Surabaya, sepertinya tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab. Pengurus Serikat Marinir Anak Buah Kapal cabang Surabaya juga diberi tahu. Kemudian pada 2 Februari ditanggapi dengan telegram berikut: “Mengacu telegram Saudara hari ini. Saudara harus berusaha pertahankan pengurus. Pengurus tak mungkin membiarkan aksi ilegal. Pengurus pusat tetap dipertahankan, kepala tetap dingin apa pun berita pers.” Namun, pengurus cabang *De Zeven Provinciën* tetap pada keputusannya dan tidak dilakukan upaya apa-apa lagi.⁵⁰

Meskipun berbagai berita pers menyampaikan informasi “di kapal *De Zeven Provinciën* semua tenang-tenang saja”, namun pemimpin marinir di Batavia dan Surabaya tetap tidak sepenuhnya merasa tenang. Bahkan pada 27 Januari, komandan marinir di Surabaya mengirim berita kepada komandan *De Zeven Provinciën*: “Jaga ketat pemancar radio”⁵¹, lalu pada 2 Februari, komandan Angkatan Laut

mengirim berita dari Batavia: “Saya menduga masalah-masalah kecil tidak tertutup kemungkinan terjadi. Harap tetap waspada”.⁵² Patut dipertanyakan mengapa komandan tidak mengambil tindakan lebih jauh agar dapat langsung menumpas masalah yang mungkin terjadi. Sejak awal pelayaran, ia memang mengawasi Boshart, yang tentangnya dia sudah diperingatkan, (tak ada catatan berarti).⁵³ Begitu perintah diterima, ruang radio diperketat pengawasannya.⁵⁴ Namun, hal itu tetap tidak menghalangi juru sinyal J.B. Mervel memperlihatkan sejumlah telegram, antara lain, kepada Boshart, sering kali bahkan sebelum komandan membacanya.⁵⁵ Secara umum komandan juga memerintahkan perwiranya untuk meningkatkan kewaspadaan, tetapi tindakan lebih jauh tidak dilakukan.

Komandan menganggap suasana di kapal masih tetap baik. Menurut komandan, para awak terkesan tenang. Terutama karena ia mengandalkan kepopulerannya. Apalagi dia berpendapat bahwa pengetatan aturan berdampak provokatif dan justru itulah yang hendak dihindarinya. Itulah sebabnya dia dan perwira utamanya dalam beberapa laporan mengusulkan tanggapan yang lebih luwes atas masalah-masalah tersebut.⁵⁶ Maka sejumlah pembicaraan dan pertemuan-pertemuan—yang biasanya tidak diikuti banyak orang dan tidak dirahasiakan dengan baik, pun dapat berjalan tanpa kesulitan. Rencana-rencana yang diusulkan jadi semakin nekat. Terutama ketika rencana pemogokan mereka beberapa kali gagal, dan berita-berita tentang pemogokan pribumi di Surabaya telah diketahui, timbullah pikiran di kalangan sekelompok kecil pribumi untuk melayarkan kapal ke Surabaya sebagai pelayaran unjuk rasa. Bagaimanapun, mereka ingin melakukan sesuatu. Berita-berita yang diterima, bahwa di kapal *De Zeven Provinciën* semuanya tenang, hanya memancing kemarahan kelompok ini.⁵⁷

Pada 4 Februari rencana-rencana itu semakin jelas: mereka hendak menguasai kapal pada malam harinya. Sebagian besar awak akan ada di darat. Pada hari Sabtu itu di Kota Raja diselenggarakan pesta khusus bagi para pelaut *De Zeven Provinciën*. Para awak bawahan tidak begitu

berminat dan sambutan di kalangan perwira akan pesta informal di *club* perwira itu juga tidak antusias. Namun, komandan berpendapat bahwa demi tata krama, hendaknya ada delegasi besar menghadiri pesta itu. Ia pun berusaha mewujudkan hal tersebut. Maka pada sore itu berangkatlah 10 perwira ke darat, termasuk Komandan dan Perwira Utama C. Meijer. Perwira yang bertanggung jawab di kapal pada malam itu adalah W.F.J. Fels, seorang perwira yang karena cacat dinas di tempat lain dipindahkan ke *De Zeven Provinciën*. Perwira yang tinggal di kapal seluruhnya 17 orang.⁵⁸

Pada awal malam itu komandan masih diperingatkan akan adanya pemberontakan. Kopral Van Haastrecht,⁵⁹ ketua pengurus Serikat Marinir Anak Buah Kapal, yang sementara itu sudah mengundurkan diri, mendengar desas-desus tentang adanya rencana pemberontakan, tetapi tidak ada yang memercayainya. Santernya desas-desus itu membuatnya memutuskan untuk memberitahukan hal tersebut pada komandan, tetapi dia tidak berhasil berbicara empat mata dengan komandan. Dia tidak berani menyampaikannya kepada perwira utama karena takut akan dibentak seperti biasanya. Akhirnya, pada pukul 19:30 Van Haastrecht bertemu inspektur polisi, yang sudah dikenalnya, dan disampaikanlah berita itu. Inspektur polisi itu meneruskan berita tersebut dan sampai pada komandan, yang pada saat itu masih berada di rumah komandan militer setempat. Sekitar pukul 21:00, komandan *De Zeven Provinciën* tiba di *Atjeh-club* dan di sana dia membicarakan masalah tersebut dengan perwira utama. Keduanya menganggap hal itu sama sekali tak patut dipercaya, karena reputasi Van Haastrecht yang dikenal sebagai tukang mabuk. Namun, demi memastikannya, J.W. Reynierse seorang perwira muda, dikirim ke kapal untuk menyampaikan berita itu kepada perwira yang bertanggung jawab di kapal. Dia tiba kira-kira pukul 22:00.⁶⁰

Sementara itu, rencana sudah mulai berjalan. Sekelompok pri-bumi (dari Manado dan Ambon, yang selalu dianggap kelompok tersendiri), bersama Paradja dan Kawilarang, keduanya kelasi kelas satu dan tokoh terpenting, menjadi pemimpin. Sekitar pukul 21:00

Paradja berhasil menguasai kunci rak senjata dan lemari tempat menyimpan amunisi. Itu mudah saja. Sebagai kelasi-meriam, ia sering menggunakan kunci itu. Pada pukul 21:40, ia melihat kesempatan membuka lemari berisi amunisi itu dan mengambil sejumlah besar amunisi. Namun ketika melakukan hal itu, dia ketahuan, dan harus melarikan diri. Sesaat setelah kebingungan terjadi, Kawilarang kemudian memberi aba-aba dimulainya pemberontakan. Terjadi sedikit lebih awal dari yang disepakati. Sekelompok besar pribumi segera bergabung. Dalam ketegangan tinggi, sebagian besar dari mereka berhasil menguasai persenjataan, sementara yang lain masuk ruang mesin. Mereka berhasil membuat kapal siap berlayar, didukung oleh sebagian dari awak yang bertugas di sana, sedangkan sebagian lagi tidak memberi perlawanan. Selama kegiatan itu, penerangan di bagian depan kapal dipadamkan.⁶¹

Dipergokinya pencurian amunisi itu membuat Perwira piket H.L. van Boven, dan Perwira Penanggung jawab Fels, melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi sampai saat itu pun tindakan khusus belum dianggap perlu. Para perwira yang sedang bermain *bridge* di ruang duduk, mendengar apa yang terjadi. Namun mereka tidak melihat insiden itu sebagai alasan untuk bertindak lebih lanjut. Mereka tetap meneruskan permainan. Barulah ketika lampu padam dan terjadi kegaduhan di rak persenjataan, para perwira sadar akan apa yang terjadi. Van Boven, didampingi beberapa perwira bawahan, masih berusaha mencegah pencurian senjata, namun didesak mundur karena mereka tidak bersenjata. Sesudah itu Van Boven naik ke ruang tempat para perwira dan memerintahkan perwira yang ada untuk mempersenjatai diri. Hal itu berlangsung sangat lama karena amunisi untuk pistol (yang terlebih dulu harus dipasang) dibungkus dalam kaleng yang akan terbuka jika kait pinggirnya ditarik, tetapi kait pinggir itu putus dan membuka kaleng pun jadi sangat sulit. Sementara itu, senjata-senjata lain sudah ada di tangan kelompok awak yang memberontak, yang telah memusatkan diri di bagian lain di kapal. Mereka bahkan telah menahan dua orang perwira yang sedang tidur.⁶²

Kekalutan meliputi para perwira lain karena sulitnya mengisi pistol dan terutama karena tidak adanya arahan. Perwira penanggung jawab, Fels, ternyata tidak mampu mengatasi situasi seperti itu dan terkesan sangat gelisah. Dalam kepanikan, ia melarikan diri ke darat (nantinya dia beralih dirinya bermaksud memberi tahu komandan secara langsung), dan menyebabkan kapal untuk beberapa saat dalam keadaan “tanpa kapten”. Dia tidak memberi tahu siapa pun juga akan hal itu dan karenanya butuh beberapa lama sebelum kendali diambil alih perwira utama yang paling tinggi pangkatnya, yaitu H.L. van Boven, yang telah disebutkan di atas.⁶³

Sementara itu, beberapa perwira mengambil tindakan tanpa arahan. Beberapa orang menutup pintu-pintu ke darat yang memisahkan bagian belakang kapal, tempat para perwira, dari bagian kapal yang lain, dan menggembok pintu-pintu tersebut. Beberapa perwira lain melepaskan bagian rangkaian kemudi yang ada di bagian belakang kapal. Perwira lainnya mencoba mencapai anjungan, ruang mesin dan ruang radio. Sebuah tembakan tanpa sengaja terlepas, meski tak mengenai siapa pun. Merasa terancam, mereka pun mundur kembali.⁶⁴ Hanya Perwira Muda A.N. de Vos van Steenwijk yang berhasil mencapai ruang radio dan memancarkan berita tentang pemberontakan. Sesudah itu ia terlibat perkelahian dengan Boshart, yang menodongkan pistol kepadanya ketika dia menarik pistolnya⁶⁵, dan meyakinkannya agar lebih baik tak ada pertumpahan darah. Kemudian De Vos van Steenwijk bergabung dengan para perwira lain.⁶⁶

Para perwira itu kemudian—meski diliputi keraguan—diperbolehkan berunding dengan perwakilan pihak pemberontak. Gagasan perundingan itu sesungguhnya berasal dari salah satu perwira, D. Dekker. Dalam pelaksanaannya, Boshart memainkan peran sangat penting.⁶⁷ Hal itu mengundang pertanyaan tentang bagaimanakah kedudukan Boshart dan bagaimanakah posisi orang Eropa pada umumnya.⁶⁸ Bukankah sampai sejauh ini hanya pribumi yang disebut pemberontak? Dalam masalah ini, berbagai sumber yang ada saling bertentangan. Penelitian resmi kemudian menyimpulkan

bahwa beberapa anggota Eropa ikut aktif dalam persiapan dan pelaksanaan pemberontakan. Boshart dapat dipastikan merupakan tokoh terpenting.⁶⁹ Dalam penelitian itu, Boshart sendiri sejak awal menyangkal keras⁷⁰ dan menuduh komisi peneliti merekayasa bukti dan memanipulasi saksi (bahkan interogasi tingkat tiga).⁷¹ Penelitian resmi terutama bertumpu pada argumen keaktifan dan peran penting yang dimainkan Boshart dari sejak awal pemberontakan. Boshart tidak menyangkal peran itu, tetapi dia bersaksi bahwa semua kegiatan itu bertujuan mencegah agar tidak terjadi yang lebih buruk lagi (pertumpahan darah). Meskipun hasil akhir masalah ini tak akan pernah dapat disimpulkan, cukup penting untuk melihat lebih jauh peran Boshart dalam pecahnya pemberontakan itu.

Malam 4 Februari itu Boshart berdinas di sekoci motor yang menghubungkan kapal yang sandar dan daratan. Sekitar pukul 22:00 sekoci motor tiba di *De Zeven Provinciën* membawa penumpang, antara lain Reynierse, perwira yang membawa pesan tentang desas-desus dan peringatan akan adanya pemberontakan. Ketika sekoci tiba, bagian depan kapal telah gelap dan terdengar suara gaduh, akibat keributan para pribumi yang berhasil menguasai persenjataan. Boshart meninggalkan sekoci motor dan naik ke kapal *De Zeven Provinciën*. Sejak saat itu dia ikut aktif terlibat dalam kejadian tersebut. Penelitian resmi lalu menyebut hal itu sebagai kesepakatan sebelumnya untuk ikut serta dalam pemberontakan,⁷² sedang Boshart sendiri membela diri dengan mengatakan bahwa dia berupaya mencegah kejadian itu, setidaknya mengendalikan. Dia berupaya, sedapat mungkin menenangkan awak pribumi dalam kejadian yang mencengangkan dirinya⁷³ dan mencegah pertumpahan darah. Itulah yang mendasari perannya sebagai perantara dalam mewujudkan perundingan. Itulah juga yang membuatnya bertindak mengatur dan sering kali memerintah anggota bawahan, dan perwira yang berlaku tak terkendali⁷⁴ jika diperlukan.

Sejauh yang bisa ditelusuri, hal itu memang sesuai dengan sifat Boshart. Dia aktif dan suka tampil mengatur dan mengendalikan sesuatu.⁷⁵ Mollema, misalnya, selalu menyebutnya dengan julukan “Si

pengatur” (*Jan de Regelaar*).⁷⁶ Keadaan itu rupanya memicu ketegangan dalam diri Boshart. Hal itu terbukti dari kenyataan bahwa pada suatu saat di malam itu dalam keadaan tegang dia meminta obat penenang pada dokter-perwira. Dokter itu memberinya beberapa tablet.⁷⁷ Ketegangan itu mungkin sebagian besar dapat dijelaskan karena adanya dua perasaan yang kurang lebih saling bertentangan dalam diri Boshart. Di satu sisi, dia cukup tajam untuk dapat melihat bahwa apa yang terjadi tak dapat diterima dan mematikan. Di sisi lain, didukung keanggotaannya dalam serikat, dia turut prihatin dan bersimpati pada rekan sepenanggungan. Pengertian rekan sepenanggungan itu bagi dirinya, berlawanan dengan kebanyakan anggota Eropa lain, juga termasuk para pribumi.⁷⁸ Perasaan itu masih ditambah lagi dengan kekhawatirannya akan pertumpahan darah.

Duduk perkara seperti digambarkan di atas yang paling mungkin terjadi. Akan tetapi, mungkin juga bahwa Boshart—karena bakatnya dalam berorganisasi dan kecenderungannya dalam bekerja sama dengan pribumi—sejak semula terlibat dalam pemberontakan dan kemarahan ketika pemberontakan pecah terutama disebabkan oleh ketegangan yang ada pada saat itu. Hal itu belum menutup kemungkinan bahwa dirinya takut akan adanya pertumpahan darah. Sangkalan keras Boshart di kemudian hari, dalam hal ini, harus dilihat sebagai bentuk pembelaan diri, di mana dia semakin menghayati peran yang lain itu.

Bagaimanapun juga yang pasti mengenai hal ini, berbagai sumber secara mendasar tidak berbeda. Tampilnya Boshart dan tindakannya ikut menentukan keadaan di kapal pada minggu itu, dari tanggal 4 sampai 10 Februari. Peran kendalinya dengan jelas terus bergeser ke pihak para pemberontak. Dalam perkembangan lebih lanjut, menurut versi Boshart, ia melakukan tindakan itu demi mencegah terjadinya hal yang lebih buruk lagi. Tidak adanya kegiatan yang terarah dari para perwira pada tahap awal, ketika hal itu masih memungkinkan, memaksanya mengambil peran tersebut. Konon dia juga berteriak pada salah satu perwira: “Demi Tuhan, berbuatlah sesuatu, Tuan”.⁷⁹

Lagipula, selama pemberontakan, menurut Boshart, tindakan yang diambilnya tampak dihargai para perwira. Barulah ketika upayanya untuk mengembalikan kewibawaan gagal dan terutama sesudah pemberontakan, sikap para perwira berubah. Boshart merasa dirinya sebagai korban, orang yang dipaksa memainkan segala peran.

Meskipun keterangan tentang hal itu sangat sedikit, penuturan yang sama ada di kalangan perwira madya Eropa dan para awak yang tidak dapat atau ingin menyendiri di kapal sehingga tidak dapat menarik diri dari semuanya. Ketika pemberontakan berkembang, sebagian awak Eropa sesungguhnya ikut serta membantu para penggagas. Beberapa ragu-ragu, enggan, dan terkadang bahkan di bawah ancaman. Sementara yang lainnya langsung ikut disertai sikap positif atas apa yang terjadi, didasari rasa solidaritas, yang diperkuat dengan kemarahan atas keadaan yang terjadi seputar pengurangan gaji. Anggota ruang mesin yang sebagian besar orang Eropa, misalnya, selama pelayaran kapal itu di bawah perintah para pemberontak menjalankan tugasnya sebagaimana biasa. Pada awal kejadian, hal itu berlangsung di bawah ancaman pemberontak pribumi bersenjata. Nantinya, keyakinan bahwa ini diinginkan para perwira Dinas Pelayaran Laut (*Marine Stoomvaart Dienst*) ikut berperan. Para perwira itu menyatakan bahwa mereka harus menjaga mesin (yang biasa mereka sebut “penggerak”) dengan baik. Itu berarti, menurut mereka, bahwa mesin tidak boleh dijalankan oleh mereka yang tidak ahli.⁸⁰

Perundingan antara para perwira dan pemberontak yang diatur Boshart cukup penting artinya dalam menciptakan situasi yang lebih stabil di kapal *De Zeven Provinciën*, sesudah jam-jam pertama yang kacau-balau. Sekitar pukul 1:00 pada malam pemberontakan, antara 4 dan 5 Februari, perundingan tersebut berlangsung. Boshart yang susah payah meyakinkan para pemimpin pribumi akan arti pentingnya pembicaraan dengan para perwira, menguraikan tujuan pemberontakan tersebut. Menurut pengakuannya sendiri, dia bertindak lebih sebagai penyambung lidah daripada sebagai juru bicara. Tujuannya adalah protes terhadap pengurangan gaji. Mereka hendak berlayar ke

Surabaya sebagai suatu bentuk unjuk rasa. Sebagai bentuk gencatan senjata disepakati bahwa para perwira dapat tinggal di ruang mereka di bagian belakang kapal tanpa gangguan, tanpa menggembok pintu kedap air. Bagian kapal selebihnya dalam kekuasaan pemberontak. Boshart mengupayakan agar dua perwira yang ditahan dapat dibebaskan. Sementara itu, rangkaian kemudi diperbaiki.⁸¹

Sesungguhnya, hal itu berarti bahwa para perwira dalam situasi ini menyerah dan mengurungkan niat untuk menumpas pemberontakan. Sikap ini, yang banyak menuai kritik dan keberatan dari beberapa perwira, terutama perwira muda,⁸² terutama ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, para perwira berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam kebingungan yang timbul karena larinya Fels dan kehilangan waktu ketika mengisi pistol, hanya sedikit atau tak ada sama sekali yang dapat dilakukan. Sebagian besar kapal telah berada di tangan pemberontak bersenjata yang berkuasa. Suatu upaya menumpas pemberontakan kelihatannya akan gagal.

Kedua, ada beberapa perwira, terutama yang tua dan karena itu cukup berpengaruh⁸³ berpendapat bahwa memang benar pertumpahan darah harus dicegah, dan bahwa, setidaknya untuk sementara, segala tindakan yang diambil akan mengarah pada pertumpahan darah. Bukankah para pribumi itu sangat berapi-api dan “dalam luapan kegembiraan”. Boshart juga sangat menekankan hal itu. Para perwira berpendapat mereka tak dapat lagi memercayai para anggota Eropa. Apalagi bertindak tanpa kekerasan sejalan dengan tidak memancing provokasi, sebagaimana yang dianut komandan. Terakhir, mereka memahami pemberontakan ini tidak tertuju pada kewibawaan pemimpin atau para perwira secara pribadi. Kejadian itu, menurut mereka, adalah sebuah unjuk rasa. Bentuk seperti itu tidak dapat diterima, namun pertumpahan darah, di mana kemungkinan kita harus menembak anggota sendiri, sesungguhnya keterlaluan.⁸⁴

Selain beberapa upaya yang digagas segelintir perwira yang tidak setuju dengan garis kebijakan yang dianut, dan yang dihilangi pada tahap awal, tidak ada kegiatan yang bersifat atau bertujuan kekerasan.

Yang ada hanyalah beberapa interaksi, biasanya singkat saja, antara para perwira dan awak kapal. Yang pertama, seperti disebutkan di atas, para perwira dari Dinas Pelayaran Laut secara samar-samar memberi tahu bahwa awak ruang mesin harus menjaga mesin dengan baik. Dekker, orang yang pertama menggagas perundingan, bahkan memberi beberapa petunjuk bagi navigasi. Dia dapat mencapai lambung kapal dalam usahanya meyakinkan para pemberontak bahwa “isyarat” itu sekarang sudah cukup lama. Tindakan itu, dan terutama kenyataan bahwa dirinya memberi beberapa petunjuk, menimbulkan rasa marah sementara pada perwira.⁸⁵ Demikian juga perwira “mandataris” Van Boven, yang kadang kala berhubungan dengan perwakilan para pemberontak, beberapa kali membujuk mereka agar mengakhiri pemberontakan. Ia bahkan satu kali berbicara dengan para awak, tapi tanpa hasil.⁸⁶

Di pihak pemberontak, sesungguhnya juga tidak ada kesatuan pendapat. Di satu sisi, ada kelompok pemberontak inti, dengan Paradja sebagai tokoh andalan.⁸⁷ Kelompok ini berpengaruh kuat pada kebanyakan pribumi. Di sisi ini, yang sering digambarkan sebagai kelompok “fanatik”, berkehendak meneruskan pemberontakan. Di sisi lain, ada kelompok orang Eropa, yang tidak semua sepenuhnya mendukung, dengan Boshart sebagai tokoh paling aktif.⁸⁸ Tokoh ini melakukan beberapa upaya untuk mengakhiri masalah itu. Satu kali dia bahkan berhasil meyakinkan sebagian besar peserta rapat. Namun Paradja dan beberapa orang lagi mengadakan rapat pribumi tertutup dan mengambil keputusan yang bertentangan, yang menimbulkan perselisihan dan saling curiga. Meski demikian pemberontakan tetap berlanjut.⁸⁹

Beberapa hal tak dapat disebut sebagai pemberontakan dan mungkin bagi kebanyakan mereka juga tidak dianggap sebagai pemberontakan: mereka berunjuk rasa menentang pengurangan gaji dan menentang penahanan terhadap rekan-rekan mereka di Surabaya yang melakukan pemogokan. Beberapa kali tujuan itu juga dijabarkan dalam telegram pada dunia luar. Sebuah telegram pada 5 Februari yang dikirim ke komandan Eikenboom, misalnya, berbunyi:

Berdasarkan pembicaraan dengan para perwira, diputuskan melayarkan sendiri kapal ke Surabaya Tidak akan digunakan senjata selama kami tidak dipaksa menggunakannya. Sehari sebelum merapat, komandan beserta semua perwira dan bawahannya akan kembali memperoleh kehormatannya. Awak kapal.⁹⁰

Sebagai pemberitahuan umum, dikirim berita dalam bahasa Belanda dan Inggris, sebagai berikut:

De Zeven Provinciën untuk sementara berada di tangan para awak, semua berjalan seperti biasa, berlayar menuju Surabaya, tidak bermaksud adanya kekerasan, hanya protes terhadap pengurangan gaji yang tak adil dan penahanan anggota marinir di Surabaya, semua baik-baik saja di kapal. Awak kapal.⁹¹

Nantinya telegram itu masih ditambah: “Sama sekali tidak ada kecenderungan komunis”.⁹² Ketakutan akan dianggap komunis sudah terlontar saat pembicaraan dengan para perwira. Ketika itu mereka juga memastikan diri bukan komunis.⁹³ Kelak dalam telegram jawaban terhadap ultimatum, hal itu kembali muncul.⁹⁴

Pemberontakan yang sifatnya “terbatas” (tak diragukan, itu memang pemberontakan) juga terungkap dari kenyataan bahwa dalam banyak hal, kehidupan di kapal berjalan seperti biasa.⁹⁵ Selama dalam perjalanan, para perwira pun tetap mendapat pelayanan di meja makan.⁹⁶ Kirab bendera harian tetap berjalan sesuai dengan aturan. Tetap bendera Belanda yang dikibarkan. Pengibaran bendera merah, misalnya, tak pernah terjadi.⁹⁷ Dalam semua sumber dilaporkan dengan cermat adalah bahwa dalam satu insiden yang melibatkan kerusakan (pada awal pemberontakan di tempat tinggal perwira banyak terjadi kerusakan), hanya potret Ratu, satu-satunya yang tak disentuh.⁹⁸ Hampir tak ada pembicaraan yang berkaitan dengan ideologi. Satu-satunya yang mungkin mengarah ke sana adalah pengumuman bahwa selanjutnya para pelaut akan dianggap dan diperlakukan “sederajat”.⁹⁹ Tetapi tak lebih dari itu. Akan halnya rencana untuk berlayar ke suatu tempat, misalnya ke Rusia, juga tidak ada, meskipun ada imbauan dari pers.¹⁰⁰

Bagaimana mereka akan melakukannya, mengingat jarak dan persediaan batu bara yang ada, tetap menjadi teka-teki besar. Yang pasti dapat dikatakan bahwa *De Zeven Provinciën* berlayar dengan tenang dan tertib melalui pantai barat Sumatra.

Sementara itu, komandan *De Zeven Provinciën* dan para petinggi marinir di Batavia dan Surabaya sangat gusar karena kejadian ini dan tidak tinggal diam. Komandan yang tertinggal di Olehleh, bersama-sama awak lain yang juga tertinggal, secepat mungkin naik kapal uap milik pemerintah, Aldebaran. Dengan kapal itu ia membuntuti kapalnya.¹⁰¹ Kapal De Aldebaran lebih cepat dari *De Zeven Provinciën* dan pada 5 Februari kedua kapal sudah saling berhadapan. *De Zeven Provinciën* mempunyai meriam, sementara De Aldebaran tidak. Ketika De Aldebaran mendekat, *De Zeven Provinciën* mengancam akan menembak. Kapal De Aldebaran pun kemudian bergerak menjauh. Semua usaha komandan *De Zeven Provinciën* agar diperbolehkan naik ke kapal tidak membuahkan hasil. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah membuntuti kapal *De Zeven Provinciën*.¹⁰² Pada 7 Februari kapal De Aldebaran digantikan oleh De Eridanus. Pada 9 Februari kapal itu digantikan oleh De Orion, keduanya juga kapal marinir pemerintah. Komandan dan rombongan yang terdiri dari beberapa perwira dan bawahannya setiap kali berpindah-pindah kapal.¹⁰³

Yang bertanggung jawab menangani kapal pemberontak adalah pemimpin tertinggi marinir, yaitu Komandan Angkatan Laut Hindia-Belanda, Osten. Selain berunding dengan stafnya, ia juga meminta petunjuk Gubernur Jenderal De Jonge.¹⁰⁴ Tawaran untuk menengahi dari pengurus Serikat Pelaut, yang bermaksud mengirim utusan ke kapal untuk berdiskusi dengan para pemberontak, ditolak. Demikian juga tawaran dari pengurus Persatuan Pegawai Pemerintah (*Vereniging van Overheidsdienaren*), yang ingin memberi saran pada pemberontak untuk menyerah. Dalam situasi seperti itu, hal demikian dinilai tak dapat diterima. Hanya penyerahan diri langsung atau tindakan kekerasan yang paling cocok dalam hal ini.¹⁰⁵ Perhitungan mereka adalah bahwa *De Zeven Provinciën* berencana berlayar sepanjang pantai barat Sumatra terlebih dulu, kemudian melalui Selat Sunda, menyusuri

pantai utara Jawa, dan langsung ke Surabaya. Telah diputuskan untuk menyerang kapal itu tepat sebelum mereka memasuki Selat Sunda. Tidak mungkin menyerang sebelum itu, sebab sebagian besar pesawat yang dibutuhkan untuk penyerangan itu cukup jauh jaraknya dari *De Zeven Provinciën* dan masih harus dikumpulkan terlebih dulu. Memang demi keamanan sejumlah pesawat dikirim ke Padang untuk melindungi Pelabuhan Emmahaven. Seandainya *De Zeven Provinciën* mau mampir di Emmahaven maka pesawat-pesawat itu harus menyerbu kapal. Ketika ternyata bahwa *De Zeven Provinciën* tidak menunjukkan gejala akan melakukan hal itu maka kelompok pesawat itu dipanggil kembali ke Tanjung Vlakte Hoek, di ujung barat daya Sumatra dekat Selat Sunda. Kelompok pesawat itu adalah tiga pesawat yang disebut ‘vliegboot’ yaitu pesawat terbang air *Dornier*, D 35, D 16 dan D 24, di bawah komando Perwira Penerbang M. Schoo. Salah satu dari pesawat terbang itu, D 24, harus disisihkan karena kendala teknis dalam manuver ini, kemudian tidak terpakai lagi.¹⁰⁶

Di Selat Sunda berkumpul kapal penjelajah Java, kapal pemburu Evertsen dan Piet Hein, kapal selam K VII dan K XI, dan dua pesawat-*Dornier* (dengan tidak disertakannya D 24 semuanya ada lima pesawat terbang air: D 35, D 16, D 7, D 8, dan D 11) dan seke-lompok pesawat yang disebut pesawat-T (pesawat pemburu T 2, T 1, dan T 12).¹⁰⁷ Rencana penyerangan itu sebagai berikut. Pertama akan disampaikan ultimatum untuk menyerahkannya. Jika tidak membuahkan hasil, bom peringatan akan dilempar di depan kapal. Kalau itu tidak membantu maka akan disusul pengeboman. Pilihan untuk melakukan serangan dari udara pada tahap pertama dan kedua berdasarkan pertimbangan tidak adanya penangkis serangan udara di *De Zeven Provinciën*. Jika pengeboman itu juga tidak membawa hasil, akan dilakukan serbuan torpedo dari kapal selam. Akhirnya, bila diperlukan kapal penjelajah dan kapal pemburu akan menyergap. Karena adanya persenjataan berat di kapal *De Zeven Provinciën* maka dalam perencanaan serangan di permukaan air dan senjata pamungkas akan menjadi pilihan terakhir.¹⁰⁸

Konfrontasi terjadi pada hari Jumat 10 Februari. Pemimpin ketiga kelompok pesawat berada di tangan C.J. van Asbeck. Pada 9 Februari malam dia membicarakan rencana penyerbuan dengan para komandan pesawat, di pelabuhan Oost (haven) dekat Tanjung Vlakte Hoek, tempat pesawat-pesawat itu berkumpul. Dalam pembicaraan itu komandan D 11, Th. H.J. Coppers, tidak hadir. Pada malam sebelumnya, komandan itu dinas malam, dan ketika pembicaraan berlangsung dia sudah tidur. Komandan kelompok-D kedua, W. van Prooyen, pada keesokan harinya menyampaikan semuanya dengan tepat kepada Coppers. Van Asbeck sendiri tidak memegang komando pesawat sehingga pada penyerbuan itu dia tidak ikut. Begitu di udara, Schoo dengan D 35 memimpin pesawat-pesawat itu. D 16 tetap tinggal sebagai cadangan dan pemancar radio. Semua kapal terbang lain, jumlah keseluruhannya tujuh pesawat, harus mengudara. Ultimatum dan penyerbuan, tentu saja, harus dilakukan sebagaimana yang ditentukan di Batavia.¹⁰⁹

Pagi tanggal 10 Februari ketika tinggal landas terjadi beberapa kendala teknis. Karena beratnya muatan bom dan sangat dangkalnya perairan, tinggal landas jadi sangat sulit dan kemungkinan adanya gangguan sangat besar. Dari pesawat-Dornier, yang sedianya terbang pertama, hanyalah D 35 dan D 11 yang berhasil mengudara. D 35 harus segera mendarat darurat di belakang pulau yang cukup tinggi sehingga tidak memungkinkan dilakukan hubungan radio. Coppers, penerbang D 11, yang tidak tahu akan apa yang terjadi, mengirim berita “Siapa yang memimpin?” Ketika tidak mendapat jawaban, dia memberitakan “D 11 memimpin” dan langsung terbang ke arah *De Zeven Provinciën*, tak berapa lama kemudian disusul kelompok-T, yang tidak begitu kesulitan dalam tinggal landas.¹¹⁰

Begitu dilihatnya *De Zeven Provinciën*, pada pukul 8:53, Coppers mengirim berita “Peringatan terakhir. Menyerah tanpa syarat atau akan digunakan kekerasan. Kibarkan bendera putih atau kain putih di atap dek, hentikan kapal. Saya beri waktu 10 menit.” Berita itu dia ulangi tiga kali.¹¹¹ Di kapal *De Zeven Provinciën*, di mana para pemimpin

pemberontak berkumpul di anjungan, orang tidak percaya bahwa tindakan kekerasan benar-benar akan diambil. Beberapa orang, termasuk Boshart, yang juga tidak memercayainya, tetap mendukung agar petualangan itu diakhiri. Kelompok itu tidak dipedulikan dan karenanya mereka meninggalkan anjungan. Sisanya mengirim jawaban seperti ini:

Kepada yang berwenang, sama sekali tak ada unsur komunistis, tak ada kekerasan, hanya protes terhadap pengurangan gaji dan penahanan anggota marinir yang memprotes. Jangan halangi kami. Semua baik-baik saja di kapal, tak ada yang terluka, tugas berjalan seperti biasa. Selanjutnya serah terima pimpinan pada komandan satu hari sebelum tiba di Surabaya.¹¹²

Pada pukul 9:18 D 11 menjatuhkan bom 50 kg dari ketinggian 1.200 meter. Bom itu mengenai *De Zeven Provinciën* tidak jauh dari anjungan dan langsung meledak. Akibatnya, lepas dari kerusakan material, cukup parah: 19 orang tewas (tiga orang Eropa dan 16 pribumi, termasuk di antaranya Paradja dan beberapa pemuka pemberontak), 11 orang luka berat (tiga orang Eropa dan delapan orang pribumi, empat orang di antaranya kemudian tewas) dan tujuh luka ringan (dua orang Eropa, di antara satu-satunya perwira yang terluka A.N. de Vos van Steenwijk, dan lima orang pribumi). Langsung saja, baik bendera putih maupun kain putih, dikibarkan dan dibentangkan. Kebakaran yang berkobar dapat segera dipadamkan. Serangan balik para perwira sebagaimana direncanakan tak perlu lagi. Tidak ada lagi pemberontakan. Hanya Kopral Rumambi, terluka berat, yang mencoba menembak seorang perawat yang mendekat dengan pistol. Sesungguhnya dia memang sudah tak mampu melawan lagi, dan kemudian langsung meninggal.¹¹³

Tentang penjatuhan bom ini, kemudian timbul masalah. Pada mulanya semua beranggapan bahwa D 11 bertindak sesuai dengan rencana penyerbuan, dan hanya kebetulan bom itu mengenai sasaran. Namun, kemudian berita dari pihak Coppers menyebut bahwa dia sengaja menembakkan ke sasaran. Ia tentunya bertumpu pada

perintah umum yang menjadi patokan 10 Februari pagi itu, yaitu menganggap kapal *De Zeven Provinciën* sebagai musuh. Karena dalam penyidikan Coppers bersikukuh maka keterangan itu menjadi versi resmi.¹¹⁴ Namun, tetap ada keraguan akan kebenaran cerita itu. Bukan tidak mungkin misalnya, karena pengaruh reaksi yang sangat positif tentang ketepatan sasaran, kemudian menyebarkan versi lain tentang apa yang terjadi, bukan apa yang direncanakan.¹¹⁵

Apa yang kemungkinan besar sesungguhnya terjadi memang lain. Oleh karena itu, W. Van Prooyen, komandan kelompok pesawat—di dalamnya termasuk Coppers dan salah seorang yang pertama diajak bicara sesudah tindakannya terhadap *De Zeven Provinciën*—menjadi narasumber. Untuk memahami satu dan lain hal dengan baik, diperlukan suatu pembicaraan tentang detail teknis. Pada pelemparan bom terhadap kapal yang sedang berlayar, biasanya dipilih arah bidik lurus sesuai arah kapal. Kecepatan kapal dan pesawat serta ketinggian terbang berperan. Itu untuk menentukan kapan bom harus dijatuhkan di suatu tempat sesuai posisi kapal dengan cara menekan tombol. Di samping itu, ada unsur kemampuan ketepatan bidik dan pengambilan keputusan dalam waktu singkat yang menegangkan. Tidak adanya kemampuan bidik dan pengambilan keputusan mengandung risiko kemungkinan adanya penyimpangan besar tempat jatuhnya bom. Penyerangan terjadi berdasar pengamatan dari pesawat sendiri. Pengamat dan orang yang mengendalikan tombol pelempar bom (dalam hal ini Coppers), berada di bagian terdepan pesawat, memberitahukan melalui gerakan tangan di atas kepala kepada penerbang yang duduk di belakangnya, apakah penyerangan yang dilakukan sudah benar, jika tidak, perbaiki apa yang harus dilakukan.

Tentang apa yang kemudian terjadi, perlu dipertimbangkan bahwa tindakan yang diuraikan di atas, terjadi dalam suasana yang penuh kegelisahan. Pertama, ketegangan yang ada dalam tindakan itu sendiri, yang sebetulnya tindakan nyata yang pertama dalam tugas penerbangan. Kedua, adanya kesulitan tinggal landas, membuat Coppers tiba-tiba mendapat tugas pelaksanaan. Dalam situasi penuh ketegangan itu, dalam pendekatan ada satu dan lain hal

yang gagal sehingga perhitungan Coppers tidak lagi tepat. Menurut perintah, harus diperhitungkan agar bom jatuh tepat di depan kapal. Penyimpangan mendasar dalam penyerangan itu sesungguhnya adalah bahwa Coppers, dengan pengalamannya, dapat mengetahui bahwa kemungkinan akan mengenai sasaran sangat besar jika dia menekan tombol pada saat yang sudah diperhitungkan. Coppers juga sepenuhnya menyadari hal itu. Dengan waktu yang demikian singkat dan semua hal yang terjadi, sesungguhnya tidak ada peluang untuk melakukan perhitungan yang lebih matang. Coppers juga berpendapat bahwa satu-satunya alternatif adalah berputar balik, dan mencoba lagi penyerangan sesuai rencana. Menurut hematnya, hal itu bukanlah pilihan dan pemikiran itulah yang diikutinya. Dia menekan tombol dan bom yang dilempar itu memang tepat sasaran.

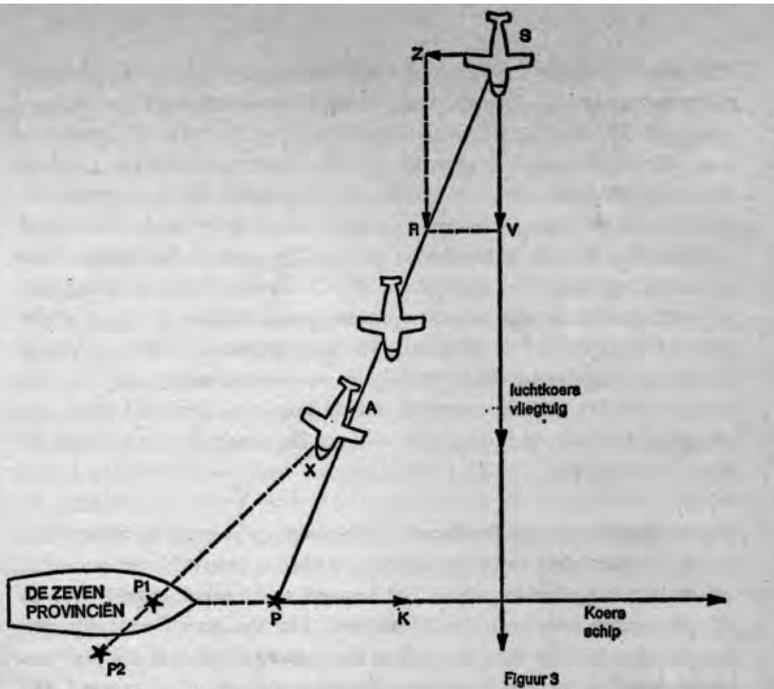
Namun, dalam situasi menegangkan itu, Coppers tidak melihat ada jalan keluar lain yang tidak merepotkan, selain berputar balik dan melakukan penyerangan kembali. Jika menekan tombol satu atau dua detik kemudian, bom itu mungkin memang tidak jatuh di depan kapal, tetapi di sampingnya. Alternatif ini juga sesuai tujuan, sama dengan jatuhnya bom di depan kapal. Bukankah kedua pilihan itu tetap berupa bom (tembakan) peringatan? Tetapi Coppers kelihatannya terpaku pada perintah untuk melempar bom di depan kapal. Di bawah sadar, perintah umum untuk “memperlakukan kapal sebagai musuh” masih memainkan peran, meskipun hal itu mungkin tak terlalu berpengaruh.

Pertanyaan apakah hal itu disengaja atau kebetulan, sulit untuk dijawab. Kesengajaan sepertinya bukan. Coppers tentulah tidak bertindak dengan tujuan awal menembak tepat sasaran. Titik tolak tindakannya adalah menjatuhkan bom peringatan di depan kapal. Tidak benar pula jika hal itu dianggap kebetulan semata, karena pada saat kritis itu dia sesungguhnya tahu bahwa kemungkinan akan tepat sasaran sangat besar. Paling-paling kita hanya dapat menyebut bahwa Coppers kebetulan berada dalam situasi seperti ini. Karenanya kita dapat menganggap bahwa unsur kebetulan dalam hal ini lebih besar

daripada unsur kesengajaan. Keterangan akan hal tersebut dapat dilihat pada gambar halaman 30.¹¹⁶

Pertanyaannya adalah mengapa komisi penyelidikan tidak sampai pada kesimpulan itu? Jawaban pertanyaan tersebut kiranya dapat ditemukan dalam penyelidikan masalah ini. Para penyelidik tidak ramah terhadap Coppers, karena dia memberi berbagai keterangan pers hingga membuat dirinya terlibat konflik dengan pemimpin marinir. Apalagi Coppers—dikenal sebagai “pemuda jagoan” yang suka memperlihatkan keangkuhan—cenderung tidak mau langsung mengakui kesalahan atau tindakan yang tidak sepenuhnya sesuai rencana. Ia mempertaruhkan kebanggaannya sebagai orang yang melempar bom. Di hadapan komisi, Van Prooyen berusaha menguraikan duduk masalahnya, tetapi tidak mendapat kesempatan. Komisi berpendapat bahwa detail kejadian itu tidaklah penting. Menurut komisi, satu-satunya pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pada saat kritis itu Coppers tahu bahwa bom itu mungkin saja akan mengenai sasaran, atau tidak. Karena jawaban atas pertanyaan itu positif maka komisi memutuskan hal itu sebagai kesengajaan.¹¹⁷

Sesudah keadaan di *De Zeven Provinciën* mulai mereda, para korban luka dipindahkan ke kapal-kapal lain agar dapat secepat mungkin ditangani di darat. Seperti telah disebutkan, korban-luka ringan termasuk De Vos van Steenwijk, seorang perwira madya. Ia salah satu yang pada saat pemberontakan paling aktif di antara para perwira, dan tampil bertindak. Ia naik kapal Piet Hein. Satu-satunya wartawan (dari kantor berita Hindia-Belanda *Aneta*) yang diperbolehkan meliput “pemboman” juga berada di kapal tersebut. Tentu saja, di kapal itu, De Vos van Steenwijk mendapat banyak pertanyaan dari sejumlah orang, termasuk dari wartawan tersebut. Kepada sang wartawan, dan didukung komandan Piet Hein, dengan jelas ia mengatakan: “saya jangan diwawancarai”. Kemudian ia menerangkan secara panjang lebar tentang apa yang terjadi, disertai penjelasan alasan para perwira tidak mau mengambil risiko melakukan tindakan terhadap para pemberontak dan alasan mereka menghindari pertumpahan darah.



- S V is de koers en vaart van het vliegtuig
 S Z is de tegengestelde koers en vaart van het schip
 S R is de resulterende koers en vaart van het vliegtuig t.o.v. het vaartlopende schip, de zgn. naderingskoers en -snelheid
 P K is de koers en vaart van het schip \neq (gelijk en evenwijdig aan) — SZ
 X mogelijke koersfout t.g.v. diverse oorzaken waardoor de bom niet in P maar in P1 valt; na 1 sec. wachten met afwerpen zou de bom in P2 zijn gevallen

Toelichting: bij een bomaanval op een varend schip kan men het schip als stil-
 liggend beschouwen mits men aan het vliegtuig een koers en vaart toevoegt ge-
 gelijk doch tegengesteld aan die van het schip. Het vliegtuig beweegt zich dan ten
 opzichte van het schip volgens de resultante van eigen snelheid en de tegenge-
 stelde scheepssnelheid d.i. volgens de zgn. naderingskoers en -snelheid (in de
 figuur langs de lijn SP). Wil men nu een punt P, bv. 50 m. voor de boeg raken,
 dan moet het vliegtuig dat punt P volgens die naderingskoers aanvliegen. Bij A,
 als de zgn. voorhoud- of afwerphoek bereikt is, wordt op de knop gedrukt en
 de bom losgelaten, die dan treft in P. Is echter op dit moment de naderings-
 koers door ongewilde oorzaken niet op P maar op het schip gericht, dan zal dit
 worden getroffen in P1. Dit was in hoofdzaak het geval bij de D 11 en Coppers.
 Had Coppers bij het bereiken van punt A één seconde gewacht met de druk op
 de knop, dan zou de bom in P2 zijn gevallen (één seconde vliegtijd dat is ± 50 m
 zijdelings van het schip). Dit zou een pracht van een waarschuwbom (in het
 spraakgebruik: 'voor de boeg') zijn geweest. Coppers onder spanning heeft zich
 deze oplossing niet gerealiseerd.

Bron: mededeling W. van Prooyen.

Semua cerita itu meski disebut “bukan untuk disebarluaskan” ternyata dimuat di koran (bahkan di sejumlah koran justru disebut sebagai wawancara), dan sangat tendensius, menurut De Vos van Steenwijk.¹¹⁸

Kapal *De Zeven Provinciën* ternyata masih mampu berlayar dengan kekuatan sendiri menuju pulau Onrust. Di sana para tahanan dimasukkan dalam bekas gedung karantina.¹¹⁹ Di sana juga dilakukan penyelidikan tahap pertama (penyidikan polisi) oleh beberapa komisi di bawah pimpinan F.W. Coster, yang juga menjadi komandan kapal *De Zeven Provinciën*. Eikenboom dicopot dari garis komando. Pada penyelidikan tahap kedua (penyidikan praperadilan) dilibatkan ahli hukum, H.W. Felderhof, agar persiapan proses hukumnya berjalan dengan benar.¹²⁰ Hampir semua proses itu dilakukan di Hindia-Belanda dari Oktober 1933 sampai dengan Juli 1934. Pertama di Mahkamah Angkatan Laut Surabaya, kemudian hampir semua perkara naik banding ke Pengadilan Tinggi Militer Hindia-Belanda di Batavia. Barulah pada Agustus 1934 buku putih, yang sebagian besar merupakan hasil kerja komisi penyelidikan, dapat diterbitkan.

Pengadilan para pemberontak dan “pengikutnya” dilakukan dalam lima kelompok. Kelompok pertama adalah 19 pemberontak pribumi. Dalam pengadilan banding dijatuhi hukuman penjara antara 1,5 sampai 18 tahun. Hukuman terberat itu antara lain dijatuhkan kepada Kawilarang. Kelompok kedua adalah delapan orang pemberontak Eropa utama. Dalam pengadilan banding dihukum penjara bervariasi antara tiga bulan sampai 10 tahun. Hukuman 10 tahun itu dijatuhkan pada Boshart. Kelompok ketiga adalah 82 orang “pengikut” pribumi. Sebagian besar dalam pengadilan banding dihukum penjara antara satu hari sampai 12 tahun. Kelompok keempat adalah 33 awak ruang mesin pribumi. Sebagian besar dalam pengadilan banding dihukum penjara antara enam bulan sampai enam tahun. Kelompok kelima adalah 23 kelasi Eropa (tanpa kualifikasi lebih lanjut). Dalam pengadilan banding dijatuhi hukuman penjara bervariasi antara tiga bulan sampai enam tahun, dan satu orang divonis bebas. Hampir semua hukuman itu disertai pemecatan dari dinas. Mollema

menghitung bahwa keseluruhan hukuman penjara itu berjumlah 715 tahun, 10 bulan, dan 21 hari. Jadi, rata-rata empat tahun per orang.¹²¹

Sebanyak 16 perwira diadili di Hindia-Belanda karena tindakan yang salah dalam pemberontakan, sembilan orang di antaranya juga di pengadilan banding. Enam perwira dijatuhi hukuman penjara antara tiga sampai enam bulan, ditambah pemecatan dari dinas. Sepuluh perwira sisanya hanya dihukum penjara, kebanyakan sangat singkat. Kelompok terakhir itu kebanyakan adalah perwira yang masih sangat muda.¹²² Komandan dan perwira tertinggi di kapal saat pemberontakan terjadi diadili di Belanda. Pengadilan tinggi militer di Den Haag menjatuhi mereka hukuman penjara masing-masing empat dan tiga bulan penjara, keduanya disertai pemecatan dari dinas.¹²³

Anggota pribumi menjalani hukuman di Hindia-Belanda. Anggota Eropa, sejauh mereka belum menghabiskan hukuman dalam masa tahanan, dipindahkan ke Belanda. Mereka tiba pada awal Agustus 1934 dan menghabiskan masa hukuman di penjara-penjara Belanda. Yang paling berat hukumannya di Leeuwarden, sisanya di Breda.¹²⁴ Dalam rangka pernikahan putri mahkota pada tanggal 7 Januari 1937, diberikan grasi—pengurangan hukuman sedemikian rupa sehingga mereka bisa dibebaskan¹²⁵ bagi para tahanan pemberontakan. Hal itu berlaku, baik bagi mereka yang di penjara Belanda maupun yang di Hindia-Belanda. Karena ada salah pengertian, pada mulanya yang di Hindia-Belanda tidak semuanya dibebaskan. Kemudian dari Belanda ada beberapa kali desakan agar mereka dibebaskan. Hal itu terjadi pada 19 dan 20 Juni 1937.¹²⁶

Pada tanggal 1 Juli 1933 kapal *De Zeven Provinciën* ditarik sementara dari dinas, diperbaiki dan diubah, kemudian dipakai lagi. Pada 18 Februari kapal itu (yang mendapat sebutan “Surabaya”) tenggelam di Surabaya akibat serangan udara Jepang. Jepang mengangkat kapal itu dan mempergunakannya sebagai kapal baterai. Kelak kapal itu tenggelam lagi di perairan Surabaya. Kali ini tidak diselamatkan lagi.¹²⁷

C. PENYEBAB DAN ALASAN

Mencermati pemberontakan dan apa yang mendahuluinya,¹²⁸ penyebabnya terlihat sangat jelas. Alasannya terletak pada pengurangan gaji dan cara pengurangan itu diumumkan. Sangat sulit untuk memberikan penilaian tentang keadilan menyangkut jumlah gaji marinir pada umumnya, dan keterkaitan dengan penerapan pengurangan pada khususnya yang secara luas berlaku pada waktu itu. Pertama karena tidak adanya bahan pembanding.¹²⁹ Tetapi terutama karena tidak adanya dasar perbandingan yang baik dengan upah dan gaji yang berlaku di tempat lain. Dalam tubuh marinir berbagai faktor khusus memainkan peran penting. Antara lain makanan yang diterima di kapal, seragam kerja yang diperoleh marinir, tunjangan berlayar, perpisahan antara sang pencari nafkah dan keluarga yang terkadang untuk waktu yang cukup lama, dan keadaan lain yang menyebabkan perbandingan dengan situasi di tempat lain sangat sulit. Yang terpenting adalah bahwa pemimpin tertinggi marinir, baik di Hindia-Belanda maupun di Belanda, pada awalnya berkeberatan atas pengurangan gaji terutama dalam kaitannya dengan jumlah gaji. Komandan Angkatan Laut di Hindia-Belanda menyebutkan pengurangan gaji tersebut sebagai hal yang membahayakan kesempatan untuk mencari nafkah hidup. Menteri Pertahanan Belanda menganggap persentase pengurangan gaji lebih tinggi hanya mungkin diberlakukan bagi kelompok tertentu. Hal itu juga mengacu pada situasi penggajian yang disebut pemerintah tidak menguntungkan, bahkan sebelum pengurangan diberlakukan.

Di samping tingkat penggajian absolut, dua faktor lain juga ikut berperan. Pertama, kenyataan bahwa pengurangan gaji sudah dilakukan tiga kali dalam dua tahun. Kedua adalah cara pengurangan itu diumumkan. Awalnya muncul ketidakpastian jadi atau tidaknya dilakukan pengurangan, disusul penundaan, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai pembatalan, dan kemudian tetap diberlakukan pengurangan, meskipun lebih sedikit. Perkembangan itu mendasari keresahan di Surabaya yang berbuntut pemogokan. Di *De Zeven Provinciën*, keresahan yang semakin membesar akhirnya memuncak dalam sebuah pemberontakan.

Dalam upaya menerangkan pemberontakan ini, kita tidak bisa hanya terpaku pada masalah gaji saja. Penting artinya untuk mengkaji lebih cermat keadaan, di mana satu dan lain hal ikut berperan. L. de Jong mengemukakan pendapat bahwa pemberontakan tersebut digerakkan oleh sel komunis.¹³⁰ Pendapat itu bertumpu pada sumber yang sangat lemah, yaitu memoar tahun 1941 dari seorang agen *Komintern* yang menyeberang. Ketika pemberontakan berlangsung ia sedang berdinias di Jerman dan hanya mendengar seluruh cerita itu dari cerita orang lain. Hal itu terlihat dari laporannya tentang kejadian tersebut. Beberapa kesalahan terlihat mencolok.¹³¹ Ditambah kesulitan yang pada umumnya muncul ketika sebuah memoar dijadikan teks sumber, kiranya cukup alasan untuk amat meragukan kebenaran dari data itu.¹³²

Bukti kuat yang mendukung tidak adanya sel komunis tidak dapat ditunjukkan. Justru karena kerahasiaan itulah—sangat penting artinya dalam sebuah sel komunis—secara teoritis memungkinkan disebut ada kehadiran sel komunis, meskipun buktinya tidak ada. Memang ada beberapa alasan yang membuat hal tersebut sangat tidak mungkin. Pertama, komunisme di Hindia-Belanda sesudah gagalnya pemberontakan pada 1926/27, sangat lemah. Barulah sejak 1935 komunisme di Hindia-Belanda mulai sedikit pulih.¹³³ Lagipula cukup janggal bahwa para pemberontak beberapa kali dengan tegas menyangkal menyebut diri komunis. Selama perjalanan menyusuri Sumatra, faktor ideologis sama sekali tidak berperan, bahkan bendera merah tidak dikibarkan. Tentu saja kita selalu bisa menganggap hal itu sebagai taktik agitator komunis untuk menutupi maksud yang sesungguhnya, namun hal tersebut tetap saja merupakan jawaban yang terlalu mudah. Walau bagaimanapun, melakukan dan mencetuskan pemberontakan bukanlah taktik yang baik, apabila pada saat pemberontakan pecah, setiap konsekuensi politik-ideologis sedemikian rupa dihindari sehingga bahkan para pemberontak sekalipun tidak tahu hakikatnya.

Penyelidikan resmi juga tidak menyoroti hal yang sifatnya seperti itu. Penyelidikan ini pada prinsipnya memang tidak terarah pada

penemuan kemungkinan adanya sel komunis,¹³⁴ tetapi kemungkinan petunjuk yang mengarah ke sana tentulah tidak terlewatkan oleh komisi. Sepengetahuan saya gerakan komunis juga tidak menagih “kehormatan” pemberontakan. Baik *Komintern*, Partai Komunis Belanda, maupun Partai Komunis Hindia-Belanda tidak pernah menyebut bertanggung jawab sebagai penggerak pemberontakan itu.¹³⁵ Bahwa nantinya ada yang berusaha mencari keuntungan dari hal itu, tentulah lain soal.

Jika ada yang mempertanyakan siapa yang kiranya termasuk dalam sel komunis itu, akan terbentur masalah. Sangat tidak mungkin jika kita mencari sel itu di antara orang Eropa. Dalam hal ini peran mereka terlalu kecil. Demikian pula Boshart, yang kelak jadi komunis, pada waktu pemberontakan dapat dipastikan tidak.¹³⁶ Di kalangan pribumi lebih sulit ditengarai, tetapi di kalangan itu pun tidak ada petunjuk adanya sel komunistis. Yang ada adalah pengaruh nasionalistis. Terutama pada diri Paradja dapat disebut adanya hubungan dengan gerakan nasionalistis. Meskipun ada pengaruh komunisme dalam nasionalisme, hal itu bukan berarti sama dengan adanya hubungan dengan gerakan komunis, apalagi keanggotaan dalam sel komunis.

Menurut saya, kesimpulan dari semua ini adalah bahwa sel komunis sebagai organisator pemberontakan sangat tidak mungkin, apalagi tanpa bukti lebih lanjut yang dapat dijadikan titik tolak.¹³⁷ Yang agak berbeda adalah kemungkinan yang diajukan oleh J.F. van Dulm. Menyangkut apa yang disebut *Anti Blanda Club* (ABC), organisasi yang menurut keyakinan banyak orang eksis di kapal, tetapi sama sekali tidak diketahui tentangnya. Menurut Van Dulm, Dinas Rahasia Politik (*Politieke Inlichtingen Dienst*, atau PID) tahu banyak tentang organisasi itu. PID tidak pernah tampil sekalipun agar tidak mengkhianati sumbernya.¹³⁸ Karena itu keberadaan ABC sangat tidak jelas. Beberapa waktu sebelum pemberontakan, Van Dulm, dalam penyelidikan tentang pemberontakan mendapat tugas menyensor, berhasil mencegat surat yang ditulis Paradja. Dalam surat itu disebut tentang pembubaran ABC di kapal *De Zeven Provinciën* karena ada tokoh tertentu yang tidak dapat dipercaya. Dari situ Van Dulm menarik kesimpulan adanya

“sel” di *De Zeven Provinciën*, dan Paradja adalah salah satu anggotanya. Situasi seperti itu tentulah lebih berkaitan dengan sejumlah hal lain bukan hanya dengan sel komunistis.¹³⁹ Menurut saya tetap patut dipertanyakan apakah “sel” ABC memang ada dan mengatur pemberontakan itu. Di sini pun tidak ada bukti kunci sama sekali. Kejadian itu, sebagaimana yang telah berlangsung, lebih mengacu ke arah suasana yang semakin resah, di mana beberapa tokoh aktif dan sadar memainkan peran penting. Dalam situasi di mana bayangan kesuksesan gerakan marinir Inggris dan Australia memainkan peran penting, terbit pemikiran untuk melakukan pelayaran unjuk rasa dengan kapal. Perintah dari pucuk pimpinan suatu organisasi atau kader suatu “sel” tertentu sama sekali tidak dibutuhkan.

Dalam pemberontakan itu, tentulah dengan sendirinya sekelompok tokoh aktif dan sadar tampil sebagai pemimpin. Lebih masuk akal kalau tokoh yang aktif dan sadar itu—jika memang ada “sel” atau lebih tepatnya “inti”—dicari dalam “inti” tersebut. Maka kesadaran serta tindakan itu dilakukan semata dalam kerangka “inti”. Meskipun demikian, tak tertutup kemungkinan bahwa hubungannya justru terbalik. Keikutsertaannya dalam “inti” (sama seperti peran pemimpin dalam pemberontakan), adalah karena kesadaran dan keaktifan itu. Yang paling mungkin adalah saling memengaruhi antarkeduanya. Pada prinsipnya, pemberontakan ini lebih diwarnai spontanitas daripada tindakan yang terencana. “Spontanitas” juga tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok pimpinan atau tokoh-tokoh utama memainkan peran penting.

Di samping masalah pemimpin dan organisasi, penting pula diperhatikan keadaan umum. Ada yang menyebutnya sebagai “iklim” di mana sesuatu terjadi. Bukan tempatnya di sini untuk membicarakan “iklim” dalam arti politik, sosial, dan ekonomi. Satu-satunya hal yang dapat dikatakan di sini adalah bahwa “iklim” 1930-an pada umumnya sulit disebut “iklim” yang tenang. Sesungguhnya sulit pula menyebutkan pengaruh suasana seperti itu pada kelompok atau individu tertentu. Hal terakhir itu juga berlaku bagi “iklim” di marinir Belanda, khususnya yang berdinamika di Hindia-Belanda. Namun, penting kiranya

untuk mengkaji lebih lanjut “iklim” yang ada di marinir. Beberapa hal berikut memainkan peran dan saling berkaitan, yaitu kedudukan serikat anggota, sikap pimpinan marinir, hubungan antara atasan dan bawahan, “semangat” di marinir dan kedudukan pribumi di kapal.

Pada waktu pemberontakan terjadi di kapal *De Zeven Provinciën*, di kalangan marinir terdapat lima serikat untuk anggota Eropa berpangkat di bawah perwira. Pertama adalah Serikat Marinir Anak Buah Kapal (SMABK) yang merupakan gabungan dari Serikat Anggota Tamtama dan Bintara (SATB) dan Serikat Kopral Marinir Kerajaan (SK). Secara yuridis, proses penggabungan itu belum sepenuhnya selesai sehingga kedua serikat itu kadang-kadang masih tampil secara terpisah. Seluruh anggota SMABK berjumlah 2.900 orang, 890 orang di antaranya ada di Hindia-Belanda. Yang kedua adalah Serikat Perwira Marinir Menengah dan Madya (SPMM) jumlah anggotanya 1.112 orang, 430 orang di antaranya berada di Hindia-Belanda. Kedua serikat bekerja sama erat dengan Komite urusan kepentingan anggota marinir berpangkat di bawah perwira, disebut *Cambo*. *Cambo* menerbitkan *Majalah Marinir* (MM, *Algemeen Marine Weekblad*). Ketiga adalah Persatuan Teknisi Marinir Kerajaan (*Vereniging van Technici bij de Koninklijke Marine*) dengan jumlah anggota 310 orang dan majalahnya adalah *De Technici*. Yang keempat adalah Persatuan Anggota Marinir Katolik Roma Santo Christophorus (*Rooms-Katholieke Vereniging voor Marinepersoneel Sint Christophorus*), dengan jumlah anggota 600 orang, dan majalahnya *St. Christophorus*. Kelima adalah Serikat ABK Kristen, yang jumlah anggotanya hanya 72 orang dan menerbitkan majalah *Ons Baken*.¹⁴⁰ Tiga serikat terakhir yang tidak diketahui berapa jumlah anggotanya di Hindia-Belanda tidak begitu berarti dalam Serikat *Cambo*. Mereka kadang-kadang bekerja sama. Jika ada perbedaan pendapat, pendirian mereka lebih sejalan dengan pendirian penguasa daripada pendirian Serikat *Cambo*.¹⁴¹

Serikat *Cambo* ini mempunyai sejarah panjang penuh warna.¹⁴² Pada sekitar 1900 dan seputar Perang Dunia Pertama terjadi pertikaian sengit antara Serikat *Cambo* dengan pemimpin tertinggi marinir. Namun, pada 1933 semuanya jauh lebih tenang. Pada 1921 dibentuk

Perundingan Terstruktur (*Georganiseerd Overleg*)¹⁴³ untuk memecahkan masalah yang telah menjadi penyebab pertikaian, melalui jalan yang semestinya. Namun, tidak berarti bahwa Serikat *Cambo* bukan tidak dapat dibantah. Mereka menyandang julukan “merah” dan itu saja sudah cukup membuat mereka mendapat kritik pedas. Penggolongan “merah” itu tidak sepenuhnya salah. Secara resmi organisasi tersebut memang netral dalam politik dan agama, tetapi pada kenyataannya, hubungan mereka dengan kaum sosial-demokrat tak dapat diabaikan.

Di Den Helder, misalnya, gedung serikat marinir, milik bekas SPMM dan dijuluki De Burcht (Benteng), jelas sekali merupakan pusat kaum sosial-demokrat setempat. Sebagian besar pengurus sipil Serikat *Cambo*, kebanyakan pensiunan pelaut, terang-terangan dan aktif menjadi anggota SDAP (Partai Sosial Demokrat). Sebagian menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan kadang-kadang juga menjabat dewan harian kota Den Helder.¹⁴⁴ Hampir semua anggota DPRD dari SDAP didorong oleh *Cambo* untuk memperjuangkan kepentingan anggota marinir di DPR. Cara kerja mereka demi meraih keuntungan material, seperti ditulis *Majalah Marinir*, memperlihatkan kaitan erat dengan cara yang diterapkan di sejumlah serikat Belanda (Persatuan Serikat Belanda atau *NVV*). Berulang kali persatuan serikat itu melontarkan protes terhadap berbagai keadaan dan peraturan, dan kadang-kadang disertai ancaman. Situasi tersebut tak jauh berbeda dengan situasi di suatu pabrik. Serikat tampil demi kepentingan pekerja, dan semuanya berlangsung dalam suasana sosial-demokrat. Hubungan dengan sosial-demokrat tidak dapat disangkal. Dalam kaitan ini, sering dikutip pernyataan W.H. Vliegen yang dalam sidang DPR mengatakan: “Sekarang serikat-serikat ini sedikit banyak di bawah pengaruh sosial-demokrat”.¹⁴⁵

Gejala ini sesungguhnya bukan tak dapat dimengerti. Pertama, sebagian besar anggota marinir berpangkat rendah berasal dari lapisan penduduk kelas bawah, yang, sejauh tidak taat beragama, berhaluan atau dipengaruhi sosial-demokrat. Kedua, untuk membela kepentingan yang bukan berlandaskan agama, sebenarnya tidak ada contoh lagi selain serikat-serikat sosial-demokrat. Ketiga, para anggota DPR

sosial-demokrat inilah yang setiap saat bersedia membela kepentingan anggota marinir.¹⁴⁶

Tendensi “merah” tersebut yang justru membuat SPMM lebih kuat dibanding SMABK,¹⁴⁷ dan mengundang sejumlah keberatan terutama di kalangan perwira. Sebagian menganggap kepentingan “menggalang kekuatan”, termasuk kepentingan persatuan pekerja militer—begitulah logika yang ada, sebetulnya sama sekali bertentangan dengan prinsip organisasi militer. Jika memang semua serikat itu harus ada maka hanya dapat diterima (dan hal ini disetujui kalangan luas) bila organisasi tersebut bekerja dengan disiplin mentalitas yang benar. Menurut banyak perwira, hal itu tidak ada dalam Serikat *Cambo*. Metode yang diterapkan dalam serikat-serikat itu dianggap merongrong disiplin dan kewibawaan. Kenyataan bahwa Serikat *Cambo* diterima oleh pemimpin tertinggi marinir, bahkan ikut berbicara dalam perundingan terstruktur, dapat dipahami dalam kerangka tekanan politik terhadap pimpinan marinir. Serikat-serikat itu mungkin pada intinya memang tidak bertindak melawan hukum, namun pada prinsipnya, tempatnya bukan di marine.¹⁴⁸

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika di kalangan ini Serikat *Cambo* sering dituding sebagai dalang pemberontakan. Dugaan bahwa serikat itu yang mengatur pemberontakan lekas tak dapat dipertahankan. Hal itu karena telegram dari kepala pengurus cabang SMABK kepada pengurus cabang *De Zeven Provinciën* terbaca begitu jelas: “Pengurus tidak dapat bertenggang rasa terhadap segala tindakan melawan hukum”.¹⁴⁹ Demikian pula sikap pengurus-pengurus dalam rapat-rapat pada akhir Desember 1932 dan akhir Januari 1933 di Surabaya jelas menyebut: bukan tindakan melawan hukum.¹⁵⁰ Meskipun demikian, menurut pendapat umum, hal itu bukan berarti bahwa serikat-serikat itu dengan protes, provokasi, dan unjuk rasa (“membuka front” menurut istilah Mollema) mematangkan kondisi bagi apa yang kelak terjadi. Bahwa pengurus pada saat-saat genting dengan pengecut menarik diri, itu tidak mengurangi tanggung jawab mereka.¹⁵¹

Membuat penilaian atas tampilnya Serikat *Cambo* bukanlah hal sederhana. Cukup masuk akal bahwa kapan pun diperkenankan,

serikat itu akan menyuarakan pendapat jika terjadi pengurangan gaji. Bila hal itu dianggap tidak benar maka adanya lembaga serikat pekerja seolah-olah tidak benar juga. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara serikat-serikat itu menyatakan pendapat. Bagi sebagian besar perwira, hal itu perkara sederhana dan tidak dapat diterima. Swarte, penulis sejarah serikat-serikat, melihatnya dari sudut pandang berbeda. Dia berpendapat bahwa serikat-serikat itu kadang-kadang kurang mau mengerti “kedudukan khusus militer”.¹⁵² Menurut pendapat saya, hal itu ia jabarkan secara hati-hati tetapi juga benar, terutama jika kita ingat betapa pada masa itu organisasi marinir masih sangat hierarkis tradisional. Hal itu sesungguhnya bertolak belakang dengan kenyataan bahwa garis yang dianut serikat-serikat pada tahun-tahun terakhir sebelum pemberontakan tidak begitu menuai keberatan dari pemimpin marinir. Setidaknya sama sekali tidak ada petunjuk akan hal itu. Dengan demikian, pengurus-pengurus tidak dapat disalahkan jika tidak menyimpang dari jalur itu, meskipun pada jalur itu ada yang masih bisa ditawar-tawar. Tindakan yang berkaitan dengan pengurangan gaji sebetulnya tradisional: permohonan menghadap, menyelenggarakan rapat-rapat protes, dan mengirim telegram-telegram protes.

Hal itu berhubungan dengan sikap pemimpin marinir (di mana para penanggung jawab politik memang memainkan peran penting) dan cara penegakan disiplin. Menurut kesaksian mayoritas yang terlibat dan pihak luar, pada masa itu sikap pemimpin marinir dan penegakan disiplin sangat “lemah”.¹⁵³ Pengertian itu memang agak tidak jelas, tetapi mungkin yang dimaksudkan adalah bahwa pemimpin marinir mendorong para perwira agar bersikap luwes terhadap bawahan dalam masalah yang berkaitan dengan disiplin itu. Dan menurut para kritikus, banyak tindakan melanggar disiplin, terutama bila Serikat *Cambo* ikut campur tangan, sangat ringan hukumannya atau bahkan tidak dihukum. Sementara para perwira yang hendak menegakkan disiplin dengan “tegas” akan dilontarkan teguran. Itulah yang mungkin malah mendorong “kelemahan”. Sebagian orang ber-

pendapat, tindakan serikat-serikat juga disebabkan oleh hal tersebut. Jelaslah, tindakan dengan dasar apa pun rupanya diperbolehkan.

Semua hal itu memungkinkan munculnya pemikiran dalam benak para pelaut untuk melarikan diri dengan kapal dan melakukan pemberontakan. Mereka tidak berpikir bahwa hal itu mustahil dan tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat menjawab pertanyaan mengapa tidak ada tindakan “tegas” dari para perwira ketika terjadi pemberontakan di *De Zeven Provinciën*, seperti halnya kenyataan bahwa para pemberontak tidak menyangka akan diambil tindakan kekerasan bahkan pada waktu pesawat-pesawat dan kapal-kapal itu mendekati kapal *De Zeven Provinciën*.¹⁵⁴

Penalaran seperti itu terkesan agak mengganggalkan, hampir melecehkan. Penegakan disiplinnya “lemah”—apa pun artinya—yang menyebabkan para bawahan pemberontak, masih ditambah lagi dengan unsur-unsur tak bertanggung jawab yang dibiarkan terjadi di luar kendali. Dengan demikian, semuanya dapat dijelaskan. Sesungguhnya penalaran di atas tak perlu sepenuhnya diterima, meski tetap berpegang pada pendapat bahwa masalah seputar penegakan disiplin bukan latar belakang yang tak penting dalam pemberontakan dan pemogokan kerja pada awal 1933. Sayang sekali tidak ada studi yang memadai tentang disiplin dan pelaksanaannya pada marinir Belanda pada 1920-an dan 1930-an dan oleh karena itu penilaian tentang hal tersebut harus bertumpu pada kesan-kesan yang subjektif.

Kesan yang ada adalah kebijakan yang luwes dalam penegakan disiplin sebetulnya tidak lantas berarti sesuatu yang tidak patut dan meresahkan. Tetapi lebih karena tidak adanya kebijakan. Sepertinya, para perwira memang tidak selalu berpegang pada peraturan. Tetapi itu bukan karena mereka menginginkannya atau karena pemimpin marinir (dan sekali lagi, termasuk di dalamnya para penanggung jawab politik) menegaskan garis kebijakan yang jelas. Sebaliknya, ada keyakinan bahwa pemimpin marinir secara umum memang tidak ingin tampil “keras”, terutama jika menyangkut “masalah serikat”. Apakah keyakinan itu benar atau salah, jelas terlihat bahwa kebanyakan perwira, walau sering melawan keinginan mereka,¹⁵⁵ menyesuaikan

diri dan mengabaikan banyak hal. Peraturannya sendiri tetap tidak berubah. Apakah kemudian disebut “lemah” atau tidak, tak relevan lagi. Yang penting adalah bahwa sikap kebanyakan perwira itu lama-kelamaan berubah menjadi tradisi dan pemimpin marinir, sejauh dapat diketahui, tidak mengambil tindakan dalam hal ini.¹⁵⁶ Semua keadaan itu tidak menguntungkan bagi marine.

Erat kaitannya dengan permasalahan ini dan sama-sama tak terjangkau adalah pertanyaan seputar hubungan perwira dan bawahan. Di sini pun sebetulnya belum ada studinya, tetapi untuk topik ini kami mempunyai disertasi C.J. Lammers. Ia pada waktu menjalani wajib militer di Angkatan Laut membuat studi sosiologi tentang pendidikan perwira-marinir dan permasalahan yang terkait. Dalam kesimpulannya, sejauh berkaitan dengan topik ini, “sifat-kasta” mencolok dalam korps perwira. Hal itu dibarengi dengan budaya paternalistik tersendiri yang sepenuhnya meliputi kelompok itu, dan dengan perbedaan sosial yang besar antara korps perwira dan kelompok yang secara hierarkis berada di bawahnya. Dalam praktik pelaksanaan tugas profesi, menurut Lammers, hal itu sering menyebabkan gangguan komunikasi dengan anggota di bawah mereka, dan membuat jurang yang sangat besar antara perwira dan bawahan.¹⁵⁷ Studi Lammers berkenaan dengan keadaan pada 1950-an dan tentu saja kesimpulan itu tidak dapat begitu saja diterapkan pada 1930-an. Kemungkinan besar, perbedaan yang ada pada tahun 1930-an tetap tidak mengurangi sifat kasta dan hubungan yang tidak terbuka itu. Perkembangan masyarakat pada umumnya memang membuat hal itu sangat tidak mungkin. Lammers sendiri menunjuk pada perbedaan sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua, namun dia menambahkan bahwa “dalam berbagai segi, Angkatan Laut Belanda tetap sama” apalagi dia menyebut tentang “hubungan kekuasaan di marine yang masih saja sangat tradisional”.¹⁵⁸

Situasi seperti yang digambarkan Lammers bagaimanapun tidak menutup kemungkinan terjalin kerja sama yang baik dalam keseharian antara berbagai kelompok, dalam pengecualian tertentu atau bahkan sebagai peraturan. Lammers juga mengacu hal itu. Justru

dalam organisasi yang sangat hierarkis masalah komunikasi antara berbagai kelompok tidak selalu harus menjadi masalah nyata dalam pelaksanaan tugas. Sepertinya tidak tertutup kemungkinan bahwa di permukaan semua terlihat baik, sementara itu pemikiran dan sikap kelompok-kelompok tersebut semakin berjauhan. Situasi seperti itu mungkin saja terjadi di marine Belanda pada 1930-an, ditambah kenyataan bahwa komunikasi antara anggota Eropa dan pribumi yang sangat sedikit—seperti yang akan dibahas lebih lanjut. Semuanya itu mengakibatkan situasi yang berbeda di Hindia-Belanda. Hal itu juga menjelaskan bahwa hampir semua perwira yang saya temui dan yang pada tahun-tahun itu berdinasi di marine, menegaskan bahwa meskipun penghematan yang akan diberlakukan sulit diterima dan meskipun ada kekesalan terhadap serikat-serikat dan sikap lemah pemimpin marinir dalam menanggapi hal itu, namun dalam keseharian para anggota bekerja dengan senang. Dengan kata lain, menurut penilaian mereka hubungan perwira-bawahan baik.¹⁵⁹

Tidak ada alasan untuk menganggap para perwira ini telah mengemukakan kebohongan. Kalau kegiatan berjalan sebagaimana mestinya tanpa masalah maka hal itu dialami sebagai pekerjaan yang menyenangkan. Berdasar mentalitas mana dan pemikiran apa pekerjaan itu dilakukan oleh kelompok yang secara hierarkis lebih rendah, tidak diperlukan kejelasan. Hubungan pribadi yang benar-benar baik, tentu saja ada, bahkan mungkin dalam skala besar, namun tidak menutup kemungkinan adanya perlawanan antarkelompok. Pemberontakan di *De Zeven Provinciën*, misalnya, tentulah tidak boleh dilihat sebagai gerakan yang ditujukan pada para perwira sebagai pribadi. Namun, harapan komandan untuk dianggap sebagai perwira yang populer sehingga pemogokan kerja seperti itu tidak akan terjadi, juga tidak benar.

Penting untuk memberi perhatian pada pengertian “mental” dalam pelayaran. “Mental” itu sangat berperan penting jika menilik masa ketika pemberontakan berlangsung. Namun, pemakaian pengertian ini pun menimbulkan banyak masalah, sama dengan perkara yang dibahas sebelum ini, yang erat berkaitan dengan istilah “mental” yang

malah merangkum perkara-perkara itu. Dalam periode meresahkan pada akhir Desember 1932 dan Januari 1933 misalnya, ada diskusi antara pengurus Serikat *Cambo* dan pimpinan marine tentang masalah apakah “mental” seperti itu baik atau justru tidak.¹⁶⁰ Dari diskusi itu tidak jelas kriteria mana yang dipakai. Di sini sepertinya tidak begitu berguna untuk membicarakan panjang lebar sekali lagi tentang syarat dan pertimbangan yang mendahuluinya. Semua itu tetap berlaku. Jika kita merangkum secara keseluruhan maka seharusnya dapat disimpulkan bahwa “mental” dalam pelayaran—apa pun pemahaman orang tentang pengertian samar ini—tidak baik. Keadaan sosial pada umumnya jauh dari menyenangkan: krisis ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan politik setidaknya menunjukkan gejala keresahan. Semua itu tentulah berpengaruh pada keadaan di pelayaran. Terutama penghematan tentulah akan membuat pekerjaan di kapal menjadi kurang menyenangkan (bukan hanya menyangkut penggajian, tetapi juga “penelantaran” armada pada umumnya).¹⁶¹ Masih ditambah lagi faktor-faktor umum yang dibahas di atas yang berlaku pada marinir, sebagaimana faktor-faktor khusus lainnya.¹⁶²

Sesuai dengan posisi mereka di kapal, tentang pelaut pribumi akan dibahas secara terpisah. Di kapal marine Belanda, mereka menduduki posisi yang sama sekali terpisah. Mereka menempuh pendidikan tersendiri, yakni Pendidikan Dasar Pelaut Pribumi (*Kweekschool voor Inlandse Schepelingen* atau *KIS*) di Makassar. Selama setahun mereka menempuh pendidikan yang bersifat teoritis. Kemudian ditambah setengah tahun pelajaran praktik di kapal *De Zeven Provinciën*.¹⁶³

Pelaut pribumi juga dikenai aturan penggajian khusus. Gaji itu dibayar langsung dari kas Hindia, dan jumlahnya (sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Hindia-Belanda) jauh lebih kecil dibandingkan pelaut Eropa dengan pangkat yang sama.¹⁶⁴ Di kapal, pelaut pribumi tinggal di tempat tersendiri, terpisah dari tempat tinggal pelaut Eropa. Salah satu alasan yang mendasari hal ini berkaitan dengan ketentuan makanan halal yang berlaku bagi sebagian besar pelaut pribumi.¹⁶⁵ Namun, kita dapat melihat pemisahan tempat tinggal ini sebagai bagian dari kedudukan pelaut pribumi yang sama sekali terpisah.

Pelaut pribumi juga menggabungkan diri dalam serikat-serikat tersendiri. Yang pertama adalah Serikat Kelasi Pribumi (SKB) yang beranggotakan 1.105 orang dan menerbitkan majalah *Sinar Laoet*. Kedua adalah Serikat Kelasi Pribumi Kristen (SKPK) dengan 325 orang anggota dengan terbitannya *Pedoman Kita*. Serikat ketiga adalah Persatuan Pelaut Katolik Santo Paulus, hanya beranggotakan 34 orang dan kecil sekali pengaruhnya. Seperti Serikat *Cambo*, SKB dapat kita sebut serikat “merah”. Pada mulanya SKPK tidak meng-arah ke sana, namun menjelang 1933 sudah berkembang ke arah itu. Organisasi pelaut pribumi terbentuk karena pengaruh serikat pelaut Eropa.¹⁶⁶ Hubungan langsung antarserikat sesungguhnya tidak ada. Contoh pertama dari hubungan seperti itu terlihat dalam situasi pada akhir Desember 1932. Ketika itu, atas desakan Boshart,¹⁶⁷ seorang pribumi berpidato dalam aksi protes di Surabaya pada 29 Desember. Dalam kesempatan itu juga dibuat rencana untuk mengadakan rapat bersama serikat-serikat pribumi dan Eropa, tetapi rapat itu kemudian dilarang oleh penguasa marine. Penundaan pengurangan gaji juga membuat pertemuan-pertemuan itu sesungguhnya tidak diperlukan.¹⁶⁸ Tidak ada kerja sama lebih lanjut yang terwujud. Yang lebih berpengaruh adalah contoh yang datang dari para pelaut Eropa. Pemogokan kerja di Surabaya, misalnya, awalnya terjadi di kalangan Eropa, kemudian di kalangan pribumi. Namun, hal itu juga berkaitan dengan penguasaan pengurangan gaji bagi para pribumi.

Selain pengaruh dan contoh dari para pelaut Eropa, ada juga petunjuk tentang adanya hubungan antara pemberontakan itu dan gerakan nasionalistis. Penyelidikan resmi menganggap hal tersebut tidak begitu berarti.¹⁶⁹ Sumber-sumber juga menyebut ada beberapa awak yang memiliki hubungan pribadi dengan orang-orang dari gerakan nasionalis, dan Paradja selalu ditunjuk sebagai contoh yang paling jelas. Tentang ABC telah dibahas di atas. Situasi di seputar organisasi itu tidak jelas benar. Secara teoretis memang memungkinkan jika pemberontakan itu direncanakan di serikat kelasi pribumi. Jeanne Mintz berpendapat (berdasarkan keterangan dari yang terlibat, yang namanya tidak dia sebutkan) memang hal itulah yang terjadi.¹⁷⁰ Meski-

pun kemungkinan itu tidak boleh diabaikan, sepertinya yang terjadi dalam kelompok itu—yang sebagian besar juga anggota dari salah satu serikat—paling-paling hanya timbul dan berkembang sebagai rencana pemberontakan saja. Meskipun demikian, mereka barangkali menganggap cara bertindak mereka sejalan dengan cara serikat dan merupakan perpanjangan dari jalur serikat. Namun, sepertinya sangat tidak mungkin bahwa kelompok itu merupakan suatu organisasi yang ketat, sebagaimana telah ditunjukkan di atas. Begitu pula jika kita bertolak dari serikat-serikat anggota marinir pribumi. Sumber-sumber yang mendukung pendapat seperti itu juga hampir tidak ada.

Terpisahny kehidupan pribumi dan Eropa juga disebabkan dan diperkuat oleh masalah bahasa. Padahal sejak 1928 syarat masuk KIS adalah penguasaan bahasa Belanda sedangkan bahasa Melayu cukup lama termasuk dalam program pendidikan perwira-marinir. Namun, bahasa percakapan yang digunakan pelaut pribumi tetap saja Melayu atau bahasa asli mereka, sedangkan bahasa Belanda hanya digunakan bagi pelaut Eropa. Komunikasi antarkedua kelompok dalam kegiatan kerja biasa memang terjadi dan berjalan tanpa masalah, namun di luar itu hanya sedikit sekali dan biasanya sangat sulit.¹⁷¹

Pertanyaan yang terus mengganggu adalah apakah di kalangan pelaut pribumi muncul mentalitas tertentu. Pada 1930-an hal itu umum diterima sebagai kewajaran. Mollema, misalnya, bahkan tanpa didukung bukti yang cukup, mengemukakan pengertian “malu”. Yang artinya sangat dekat dengan “kehilangan muka” atau “tampil memalukan”.¹⁷² Menurut Mollema perasaan seperti itu tentu berperan penting. Kaum pribumi tentulah menganggap kehilangan muka di hadapan siapa pun sebagai suatu aib besar. Dalam pemberontakan, hal itu mungkin ikut berperan. Dalam berita-berita yang menyebutkan “di *De Zeven Provinciën* semua tenang”, mereka pastilah merasa “malu” terhadap rekan-rekannya di Surabaya. Kegagalan rencana pemogokan kerja pastilah juga membuat mereka merasa “malu”. Semua hal itu berkembang ke arah sikap yang lebih keras dan fanatik. Ketika bertahan dalam pemberontakan, menanggapi imbauan agar tetap berakal oleh pejabat komandan Van Boven dan Boshart, takut akan “malu”

itu tentulah yang paling berperan.¹⁷³ Karena tidak ada bukti maka penalaran ini harus dibiarkan sebagaimana adanya. Karena tidak ada studi, jauh lebih baik untuk tidak membicarakan masalah mentalitas pelaut pribumi itu lebih lanjut di sini. Apalagi pengamatan tentang “mentalitas pribumi” pada umumnya jauh dari kerangka studi ini.

Satu-satunya yang tidak boleh diabaikan di sini adalah kemungkinan adanya mentalitas tertentu dari suatu kelompok yang menduduki posisi tertentu. Fanatisme pelaut pribumi yang disebut di atas, misalnya, disebutkan dalam berbagai sumber.¹⁷⁴ Namun, hal itu tentulah tidak harus berasal dari suatu mentalitas tertentu pelaut pribumi atau berasal dari rasa takut “malu”. Kita juga dapat mencari penalaran yang terutama bertumpu pada kedudukan khusus pribumi dalam masyarakat kolonial pada umumnya dan dalam marine pada khususnya. Atau pada faktor-faktor kebetulan, seperti sifat pribadi, misalnya. Tokoh seperti Paradja memang agak ekstremis dan fanatik, juga memiliki pengaruh besar di kelompok pribumi. Keterangan yang sepenuhnya menjawab dominannya peran pribumi dalam pemberontakan di *De Zeven Provinciën*, tetap tak dapat disampaikan.

Mari kembali pada titik tolak pembahasan ini, yakni “suasana” ketika pemberontakan di *De Zeven Provinciën* terjadi. Meskipun banyak kesimpangsiuran dan ketidakpastian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada “suasana” menguntungkan pada umumnya ataupun di lingkungan marine pada khususnya. Sebaliknya, keresahan sangat mencolok terlihat. Namun, hubungan antara “suasana” seperti itu dengan kejadian tertentu, tidak dapat langsung disimpulkan. Jika “suasana” resah itu langsung disimpulkan sebagai penyebab timbulnya masalah, tentulah tidak benar. Perbandingan peristiwa itu dengan kegiatan pemogokan pada berbagai periode memperlihatkan bahwa hubungan semacam itu jauh lebih rumit daripada yang sering kita duga. Kalau ingin mengkaji pemberontakan di *De Zeven Provinciën* maka sekali lagi kita perlu mencermati jalan peristiwanya dengan tepat. Gabungan dari “suasana”, penyebab, dan jalan peristiwa sebenarnya justru dapat lebih menjelaskan.

Dalam kejadiannya, telah diuraikan dalam bab ini sebelumnya, telah terjadi sejumlah kekeliruan, kesalahpahaman, dan berbagai peristiwa yang tidak menguntungkan. Hal itu sudah mulai sejak prosedur pengurangan gaji yang terlambat dimulai sehingga dibutuhkan penundaan. Disusul kesalahpahaman seputar arti penundaan. Kemudian pengumuman pengurangan gaji bagi pelaut Eropa dilakukan tepat sebelum hari libur. Larangan diadakan rapat serikat digunakan untuk melawan keresahan dan mencegah para pengurus serikat untuk memengaruhi opini tentang apa yang terjadi. Sekian tentang perkembangan hingga pemogokan kerja.

Di *De Zeven Provinciën*, jika ditilik kembali, ada kebijakan komandan yang tak dapat dimengerti, yang didukung oleh perwira pertama yang mengurus permasalahan anak buah kapal.¹⁷⁵ Baik peristiwa-peristiwa selama pelayaran, maupun pemogokan kerja di Surabaya, tidak membuat mereka mengambil tindakan yang berarti. Peringatan dari komandan angkatan laut bahkan peringatan konkret malam itu di Kota Raja tidak menimbulkan rasa prihatin. Ketika pemberontakan pecah, ketidakhadiran—dan kemudian larinya—pemimpin yang bertanggung jawab di kapal serta patahnya kait penutup kaleng amunisi, memainkan peran yang bukan tidak penting. Justru kejadian-kejadian seperti itulah yang mungkin membuat C.E.L. Helfrich memakai istilah “operet” untuk menggambarkan sifat pemberontakan itu.¹⁷⁶ Memang sifat seperti itu dalam beberapa segi tidak dapat dipungkiri melekat pada peristiwa tersebut. Demikian juga segala gangguan pada kelompok pesawat, kadang-kadang terkesan menggelikan. Namun, akhir dari peristiwa tersebut sama sekali tidak menggelikan.

Pendek kata, pemberontakan di *De Zeven Provinciën* harus dilihat sebagai akibat dari tiga faktor yang jalin-menjalin. Pertama, pengurangan gaji dan terutama prosedur yang dilaluinya. Kedua, tidak adanya “iklim” yang menguntungkan di tubuh marine dalam segala aspek. Yang ketiga, keadaan dan perkembangan yang sesungguhnya di kapal, baik persekongkolan antaranak buah kapal maupun tindakan tolol pemimpin kapal. Dalang utamanya tidak harus dikaitkan dengan komplotan yang dibentuk atau dikendalikan di tempat lain. Justru harus

dihubungkan dengan proses yang berkembang dengan sendirinya dan tidak dihalangi, di mana tokoh-tokoh, yang karena sifat mereka, dengan sendirinya tampil menjadi pemimpin.¹⁷⁷

Endnotes

- 1 Istilah anggota marinir Eropa dan pribumi adalah sebagai perpanjangan dari perbedaan kedudukan mereka di kapal. Pada periode yang dibahas di sini, istilah tersebut selalu digunakan juga oleh para pribumi sendiri, misalnya dalam pemberian nama serikat. Demi alasan itulah saya memakai istilah tersebut tanpa diubah, dengan mengabaikan muatan perasaan yang mungkin ada pada sebagian orang. Demikian pula halnya dengan istilah Hindia-Belanda dan Hindia. Kedua istilah itu dipakai bergantian tanpa pembedaan arti. Karena menyangkut pengacuan yang tidak memungkinkan adanya kesalahpahaman, penggunaan istilah tersebut menurut hemat saya dapat dibenarkan.
- 2 *Ongeregeldheden*, 5.
- 3 *Ibid.*, 12.
- 4 Arsip Kol. Vb 14 Maret 1933 No. 13.
- 5 *Ibid.*, Vb 24 Januari 1933 No. 13.
- 6 *Ibid.*, Vb 30 Desember 1932 No. 26 dan pengumuman L. N. Deckers.
- 7 *Ongeregeldheden*, *op.cit.*, dan Arsip. Kol. *Ibid.*, Vb 30 Desember 1932 No. 26.
- 8 *Ongeregeldheden*, *ibid.*, 15.
- 9 *Ongeregeldheden*, *Ibid.*, 16 dan Mollema, 63–64 (teks lagu ini juga ada di dalamnya).
- 10 *Ongeregeldheden* *Ibid.*, 16–17; Mollema, *Ibid.*, 64–67; *A.M.W.* th. 12, No. 37 (19 Januari 1933). Tentang pemberontakan di Marinir Inggris: Edwards dan Divine.
- 11 *Ongeregeldheden*, *Ibid.*, 23.
- 12 Mollema, *op.cit.*, 67 berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin. Secara teoretis sebetulnya bukan sama sekali tidak mungkin bahwa telegram yang dikirim tanggal 29 dari Hindia baru tiba tanggal 30. Walaupun kemungkinannya tetap sangat kecil.
- 13 *Ongeregeldheden*, *op.cit.*, 19.
- 14 *Ongeregeldheden*, *Ibid.*, 12; Mollema, *op.cit.*, 69; *A.M.W.*, *op.cit.*, th. 12, No. 37 (19 Januari 1933).

- 15 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 23; *A.M.W. Ibid*, th. 12, No. 37 (19 Januari 1933); Boshart, 3.
- 16 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 20–23 (kutipan h. 22).
- 17 *Ibid.*, 25.
- 18 *Ibid.*, 20–26.
- 19 Mollema, *op.cit.*, 68–70.
- 20 Swarte, 82.
- 21 Mollema, *op.cit.*, 69.
- 22 *Ongeregeldbeden, op. cit.*, 22–25.
- 23 *Ibid.*, 26–27; berkas tentang masalah ini dalam Arsip Kol. *op.cit.*, Vb 24 Januari 1933 No. 30; peraturan resmi pada K.B. 21 Januari 1933 No. 51.
- 24 Mungkin saja peraturan tersebut baru pada saat terakhir ditambahkan (pengumuman J. J. Wichers dan surat t.t. 30-10-1969 dari H. A. West-erouen van Meeteren). Berkas-berkas itu ternyata tidak ada sama sekali. Mengingat hal itu tidak banyak berpengaruh maka tidak ada salahnya mengabaikan hal tersebut.
- 25 *Ongeregeldbeden, op.cit.*, 42; Arsip Kol. *op.cit.*, Vb 4 Mei 1933 No. 5; *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1933 No. 40 (keputusan pemerintah t.t. 26 Januari 1933 No. 12).
- 26 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 28–29, dan 43.
- 27 *Ibid.*, 27 dan, 42–43.
- 28 *Ibid.*, 29; *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië* I, 739.
- 29 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 23; kemarahan yang timbul menanggapi pengingkaran janji pemimpin tertinggi juga digarisbawahi oleh H.L. van Boven dalam sebuah surat t.t. 10 Oktober 1937 kepada B. C. de Jonge (Arsip De Jonge No. 12).
- 30 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 30–36; Mollema, *op.cit.*, 73–36; Swarte, *op.cit.*, 83–84; *A.M.W.* th. 12 No. 39 (2 Februari 1933).
- 31 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 37–45; Mollema, *Ibid.*, 77–83.
- 32 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 56.
- 33 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 54; Mollema, *op.cit.*, 102–103; *De schepen der Koninklijke Marine*, 97–98.
- 34 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 49–51; Mollema, *Ibid.*, 103.
- 35 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 49; Mollema, *Ibid.*, 108 agak menyimpang dalam jumlah. Ia menyebut jumlah perwira bawahan Eropa 22 orang dan pri-

- bumi 5 orang. Dalam hal ini, *Ongeregeldbeden* sebagai buku putih resmi, sepeertinya lebih dapat dipercaya.
- 36 Pengumuman H. A. van Foreest, A. N. de Vos van Steenwijk, C. J. W. van Waning, J. J. Wichers.
 - 37 *Ongeregeldbeden, op.cit.*, 55; Mollema, *op.cit.*, 109.
 - 38 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 18 dan 57; Mollema, *Ibid.*, 66–67; Boshart, *op.cit.*, 2–3; *M.R.T. XXIX*, 577.
 - 39 Nama itu juga sering dieja dengan Paradji. Dokumen-dokumen resmi biasanya menyebutnya Paradja. Oleh karena itu, dalam tulisan ini selanjutnya dipakai ejaan tersebut. Dalam sumber-sumber hanya satu nama yang di kalangan pribumi hampir selalu disebut tanpa keterangan lebih lanjut.
 - 40 Mollema, *Ibid.*, 123; siaran berita-Aneta 2 November 1933 (Arch. Dir. Mar. No. 1127).
 - 41 *M.R.T. XXIX*, 585; Gooszen, 19–20; pengumuman J. F. van Dulm, H. A. van Foreest, A. N. de Vos van Steenwijk.
 - 42 *Ongeregeldbeden, op.cit.*,
 - 43 *M.R.T. XXIX*, 577–578; *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 19.
 - 44 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 56.
 - 45 Endt, 36; sumber ini satu-satunya yang menyebutkan hasil, walaupun tidak terlalu dapat dipercaya (lihat Lampiran III).
 - 46 *Ongeregeldbeden, op.cit.*, 57–61; Mollema, *op.cit.*, 114–116, Boshart, *op.cit.*, 4–6.
 - 47 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 60–61; Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 27 November 1933 P 28.
 - 48 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 59; Mollema, *op.cit.*, 116–117; Boshart, *op.cit.*, 7–8.
 - 49 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 61–64; Mollema, *Ibid.*, 120–121; Boshart, *Ibid.*, 9–11; Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 10 April 1933 D 8 dan 27 November 1933 P 28; ketegangan yang semakin meningkat juga ditegaskan dalam pengumuman dari W. Snel.
 - 50 *Ongeregeldbeden, op.cit.*, 61–63 (kutipan h. 63); Mollema, *op.cit.*, 118; pengumuman W. Snel.
 - 51 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 59.
 - 52 *Ibid.*, 63
 - 53 *Ibid.*, 57.
 - 54 *Ibid.*, 59.
 - 55 *Ibid.*, 60 dan 64.

- 56 *Ibid.*, 58–64; Mollema, *op.cit.*, 119–122; *M.R.T.* XXIX, 577-580; Gooszen, 19–20; pengumuman A.N. de Vos van Steenwijk.
- 57 *Ongeregeldbeden*, *Ibid.*, 64–65; Molema, *Ibid.*, 122–123; Boshart, *op.cit.*, 9–11.
- 58 *Ongeregeldbeden*, *Ibid.*, 65–69; Mollema, *Ibid.*, 124–125; Arsip. Kol., *op.cit.*, Vb 10 April 1933 D 8 dan Vb 27 November 1933 P 28. Komandan, Eikenboom, sesungguhnya tidak paham tentang alasan penempatan Fels di kapal *De Zeven Provinciën*. Pengumuman A. van Foreest.
- 59 Swarte, *op.cit.*, 86 menyebutnya Van Haetrecht. Hal itu tentulah kesalahpahaman. Semua sumber menyebut dia sebagai Van Haastrecht. Inisial nama depan tokoh itu ternyata tidak disebut dalam sumber mana pun.
- 60 *Ongeregeldbeden*, *op.cit.*, 67–68; Molema, *op.cit.*, 127–128; Boshart, 11; *M.R.T.* XXIX 581–583; Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 27 November 1933 P 28.
- 61 *Ongeregeldbeden*, *Ibid.*, 68–69; Mollema, *Ibid.*, 129–132; Arsip. Kolonial, *Ibid.*, Vb 27 November 1933 P 28; tentang ruang mesin ditegaskan dalam pengumuman W. Snel.
- 62 *Ongeregeldbeden*, *Ibid.*, 69–71; Mollema, *Ibid.*, 130–133 dan 136.
- 63 *Ongeregeldbeden*, *Ibid.*, 72–73; Mollema, *Ibid.*, 137–138; Arsip Kol. *op.cit.*, Vb 27 November 1933 P 28.
- 64 *Ongeregeldbeden*, *Ibid.*, 73–75; Mollema, *Ibid.*, 133 dan 143–147. Tembakan itu dilepaskan oleh penjaga pribumi muda, atas perintah Paradja. Sebelum dia sempat membidik dengan benar, pistol itu secara tidak sengaja sudah meletus. Selain tembakan itu, hanya ada satu tembakan lain, yaitu ketika seorang penjaga bermain-main dengan pistolnya (Boshart, *op.cit.*, 22).
- 65 Boshart sendiri, kemudian, mengatakan bahwa pistol itu tidak berisi (Berkas-berkas Boshart).
- 66 *Ongeregeldbeden*, *op.cit.*, 75–76; Boshart, *op.cit.*, 15; Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 27 November 1933 P 28.
- 67 *Ongeregeldbeden*, *Ibid.*, 76; Mollema, *op.cit.*, 152–153; Boshart, *Ibid.*, 14–15; Arsip. Kol. *Ibid.*, Vb 27 November 1933 P. 28.
- 68 Boshart tentu saja tidak dapat dianggap mewakili orang Eropa, atau orang yang dijadikan contoh secara membabi buta. Namun dia memang salah satu orang Eropa yang terlibat dalam pemberontakan, yang memegang peran terpenting. Jika harus menyebut orang Eropa yang mengambil peran aktif dari sejak awal pemberontakan maka dialah orangnya.

- 69 *Ongeregeldbeden*, passim; Arsip Kol. *op.cit.*, Vb 27 November 1933 P 28.
- 70 Boshart, passim dan Berkas Boshart. Berkas Boshart dipenuhi catatan kemarahan tentang ketidakadilan yang menimpa dirinya. Berkas ini memberikan kesan jujur dalam menyampaikan perasaan dia yang sebenarnya justru karena isinya yang konsisten (dan meskipun dalam sudut pandang lain acak-acakan). Namun, harus tetap diingat bahwa semua berkas itu berasal dari periode sesudah pemberontakan dan sesuai dengan alur pembelaannya. Berkas itu sendiri sesungguhnya bukanlah argumen menentang ketidakadilan.
- 71 Tuduhan-tuduhan terhadap Boshart itu sepertinya terlalu drastis, apalagi tidak disertai bukti yang mendukung. W. Snel juga menganggap hal itu berlebihan. Tetapi tanpa adanya manipulasi saksi dan penyidikan tingkat tiga sekalipun, dapat kita bayangkan bahwa penyidikan tidak selalu berjalan mulus dan bahwa sebagian saksi (karena berharap dengan cara itu dapat melepaskan diri) tentu sangat bersedia untuk membuat pernyataan yang ingin didengar oleh para perwira penyidik.
- 72 *Ongeregeldbeden*, *op.cit.*, 72; Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 27 November 1933 p 28.
- 73 Hal itu tidak harus dipertentangkan dengan kenyataan bahwa Boshart telah mendengar rencana itu sebelumnya. Dia menganggap rencana itu, sama seperti Van Haastrecht pada awalnya, gila dan tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikannya (Boshart, *op.cit.*, 9).
- 74 Boshart, passim (pecahnya pemberontakan h. 12–15) dan Berkas Boshart.
- 75 Pengumuman M. Boshart Jr dan W. Snel.
- 76 Mollema, passim.
- 77 *Ongeregeldbeden*, *op.cit.*, 72; Mollema, *op.cit.*, 141; Boshart, *op.cit.*, 13.
- 78 Kecenderungan untuk bekerja sama dengan marinir pribumi sudah terlihat sebelumnya, misalnya pada rapat protes di Surabaya pada 29 Desember 1932. Boshart juga termasuk kelompok hadirin terpenting pada “resepsi tahun baru” di Sabang. Boshart, *op.cit.*, 3, 7–8 dan 13. *Ongeregeldbeden*, *Ibid.*, 18 dan 59; Mollema, *Ibid.*, 67 dan 116–117; pengumuman W. Snel.
- 79 Berkas Boshart (surat kepada pembelanya t.t. 29 November 1933).
- 80 *Ongeregeldbeden*, *op.cit.*, 71 dan 84; Mollema, *Ibid.*, 139 dan 157; Boshart, *op.cit.*, 16–19; pengumuman W. Snel.
- 81 *Ongeregeldbeden*, *Ibid.*, 76–78; Mollema, *Ibid.*, 152–154; Boshart, *Ibid.*, 14–16; penuturan Boshart tentang perundingan, terutama tentang posisinya sendiri di sana (jadi bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai

- penengah) didukung oleh catatan anggota marinir J. den Boer, yang hadir ketika itu (Wolfswinkel, 25–26; tentang pembahasan ini lihat juga Lampiran III, catatan 8).
- 82 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 90–92; Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 27 November 1933 P 28 membedakan partai yang agresif dan yang tidak agresif, dan di antara keduanya ada kelompok tengah.
 - 83 Arsip. Kol. *Ibid.*, Vb 27 November 1933 P 28.
 - 84 *Ongeregeldbeden, op.cit.*, 77–78; Mollema, *op.cit.*, 133–135 dan 155; Arsip. Kol. *Ibid.*, Vb 10 April 1933 D 8 dan 27 November 1933 P 28; pengu-
muman A. N. de Vos van Steenwijk.
 - 85 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 88; Mollema, *Ibid.*, 165–166.
 - 86 *Ongeregeldbeden, Ibid.*, 82 dan 88–90; Mollema, *Ibid.*, 160–161, 166–167 dan 170; Boshart, *op.cit.*, 20; Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 10 April 1933 D 8 dan 27 November 1933 P 28.
 - 87 Selain Paradja dan Kawilarang yang telah disebut, menurut Boshart yang termasuk dalam kelompok inti adalah Rumambi, Hendrik, Gosal, dan Soewarso (Boshart, 10–11). Dari sumber-sumber lain, daftar itu dapat ditambah dengan Manuputty, Mintje, Soedijono, dan Tuhumena (Arsip. Kol. *Ibid.*, Vb 27 November 1933 P 28).
 - 88 Beberapa anggota Eropa yang ikut serta adalah G. F. Dannau, M. Dooijeweerd, B. van Leeuwen, dan P.A. Peeters.
 - 89 *Ongeregeldbeden, op.cit.*, 77, 82–89 dan 93–95; Mollema, *op.cit.*, 170–171 dan 181–184; Boshart, *op.cit.*, 16–22; Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 10 April 1933 D 8 dan 27 November 1933 P. 28.
 - 90 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 85.
 - 91 *Ibid.*, 87.
 - 92 *Ibid.*, 88.
 - 93 *Ibid.*, 77.
 - 94 *Ibid.*, 97.
 - 95 *Ibid.*, 79 dan 86; Mollema, *op.cit.*, 158; Boshart, *op.cit.*, 21.
 - 96 Mollema, *ibid.*, 154; Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 27 November 1933 P. 28.
 - 97 *Ongeregeldbeden, op.cit.*, 82 dan 86; Mollema, *ibid.*, 156; Boshart, *op.cit.*, 18.
 - 98 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 86; Mollema, *ibid.*, 132.
 - 99 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 82.

- 100 Van der Kroef, 24, juga menyatakan hal itu tanpa menyebut bukti satu pun.
- 101 *Ongeregeldheden, op.cit.*, 79–80; Mollema, *op.cit.*, 151. Selain Marinir Kerajaan yang berada di Den Haag, ada “Marinir Pemerintah” di Hindia-Belanda yang langsung berada di bawah Batavia. Dimaksudkan untuk tugas-tugas tertentu dalam wilayah Hindia-Belanda.
- 102 *Ongeregeldheden, ibid.*, 83–86; Mollema, *ibid.*, 159–164.
- 103 *Ongeregeldheden, ibid.*, 92 dan 95.
- 104 *Ongeregeldheden, ibid.*, 91 dan 95; Mollema, *ibid.*, 186–188; B.C. de Jonge, *Herinneringen*, 160–167. Dari sumber-sumber itu tidak dapat diketahui dengan pasti bagaimana hubungan antara De Jonge dan Osten. Secara pribadi sepertinya hubungan itu baik. Seperti tertulis dalam surat yang sangat akrab, tetapi tidak penting, yang ditulis Osten, tepat sesudah pemberontakan t.t. 11 Februari 1933 untuk De Jonge (Arsip De Jonge No. 28). Dalam buku *Herinneringen* yang ditulis berdasarkan buku hariannya, (Arsip De Jonge No. 1) De Jonge menyiratkan bahwa pemimpin dalam perundingan itu adalah dirinya dan bahwa keputusan yang diambil berasal darinya atau sangat dipengaruhi olehnya. Sumber-sumber lain cukup meragukan hal itu. Sebuah dokumen tidak bertanggal tetapi bukan berasal dari waktu kejadian yang ditulis Osten meragukan De Jonge (Arsip Meyer Ranneft No. 239). Pandangan itu didukung oleh pengumuman dari ajudan Osten ketika itu, J. J. Wichers. Lebih lanjut ada dokumen dari tahun 1955 yang ditulis J. W. Meyer Ranneft (ditujukan untuk C. Gerretson). Di sana dikatakan bahwa tidak semua aspek dalam diri De Jonge dinilai positif. Salah satu pokok yang mengemuka adalah bahwa De Jonge, yang dalam kaitannya dengan bom, menyebut Osten sebagai “pria yang sangat jujur dan sederhana”, mengatakan: tanggung jawab atas bom itu sepenuhnya di tangan Anda, di tangan Anda, di tangan Anda” (Arsip Meyer Ranneft No. 324). Tentang pembahasan di Dewan Perwakilan Hindia-Belanda, yang sesungguhnya tidak banyak membicarakan hal ini, dapat dilihat notulen rapat (dalam: Arsip De Jonge No. 86; notulen tanggal 8 Februari 1933 juga Arsip. Kol. Vb 10 April 1933 D 8).
- 105 *Ongeregeldheden, ibid.*, 81; Mollema, *ibid.*, 191; Swarte, *op.cit.*, 87; Koch, *Verantwoording*, 184–185.
- 106 *Ongeregeldheden, ibid.*, 91–92; Mollema, *ibid.*, 187; Bundel Bescheiden (Perpustakaan Marinir).

- 107 Sebelum pemusatan itu, sebagian besar awak pribumi di kapal digantikan oleh awak Eropa yang dianggap lebih dapat dipercaya (*Ongeregeldbeden, ibid.*, 91; Mollema, *ibid.*, 187–188). Pesawat-pesawat itu dalam penerbangan menuju Selat Sunda mengalami sejumlah kesulitan teknis. Ada dugaan sabotase; seorang awak bahkan diganti (Bundel Bescheiden (Perpustakaan Marinir)). Bukti tentang adanya sabotase, sepanjang pengetahuan saya, tidak pernah ada.
- 108 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 95–96; Mollema, *ibid.*, 186–193; Bundel Bescheiden (Perpustakaan Marinir).
- 109 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 97–98; Bundel Bescheiden (Perpustakaan Marinir); pengumuman Van Prooyen.
- 110 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 98; Bundel Bescheiden (Perpustakaan Marinir); pengumuman Van Prooyen.
- 111 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 96.
- 112 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 97.
- 113 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 97 dan 99–100; Mollema, *op.cit.*, 194–199; Boshart, *op.cit.*, 22–24.
- 114 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 97–99; B. C. de Jonge, *Herinneringen, op.cit.*, 167–168. Dalam berita-berita umum, nama perwira pesawat D 11, Coppers, tidak diungkap. Oleh karena itu terutama di kalangan komunis, beredar cerita (salah dan tidak berdasar), bahwa bom itu dilempar oleh tokoh fasis O. L. Fehrenbach (mantan penerbang pesawat tempur): antara lain dalam *De Tribune* 17 Juni 1933.
- 115 Pengumuman L. N. Deckers, W. van Prooyen, J. J. Wichers.
- 116 Pengumuman W. van Prooyen; pernyataan itu sebagian mendapat penegeasan dari Bundel Bescheiden (Perpustakaan Marinir). Walaupun Bundel Bescheiden itu tidak memberi gambaran menyeluruh tentang kelompok pesawat, tetapi gambaran yang ada di dalamnya tidak bertentangan dengan pendapat Van Prooyen.
- 117 Pengumuman W. van Prooyen. Tentang pendapat P. J. Elias (*Dan liever de lucht in, 86–87*) bahwa dari pihak Departemen ada tekanan terhadap Coppers, untuk membuat pernyataan yang bertentangan bahwa jatuhnya bom itu kebetulan semata, tidak ditemukan bukti yang mendukung di mana pun. Mengingat pengetahuan Elias bukan berasal dari sumber pertama (h. 81) maka versi ceritanya belum dapat diterima.
- 118 Pengumuman A. N. de Vos van Steenwijk. Tentang “wawancara” lihat sejumlah surat kabar 11 Februari 1933 (beberapa di antaranya satu atau

- beberapa hari kemudian); tentang perannya lihat h. 50. “Wawancara” itu memegang peran dalam berbagai pembicaraan yang dibahas dalam bab 4.
- 119 *Ongeregeldheden, op.cit.*,100.
- 120 Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 14 Februari 1933 U 2 dan 18 Februari 1933 M 3; berita pers Aneta 30 Maret 1933 (Arch. Dir. Mar. no. 1127).
- 121 Mollema, *op.cit.*, 204–205; berita pers Aneta 14 November 1933–14 Juli 1934 (Arsip. Dir. Mar. no. 1127).
- 122 Sebagian besar dokumen resmi tentang hal ini tidak dapat ditemukan lagi di arsip-arsip Belanda. Dalam bentuk tercetak adalah “Sententie van het Hoog Militair Gerechtshof in Nederlandsch-Indië” (Putusan Pengadilan Tinggi Militer di Hindia-Belanda) t.t. 2 Januari 1934 (keputusan 12 Januari 1934) dalam *M.R.T. XXX*, 75–91 (mengenai kelompok pertama). Tentang kelompok kedua ada beberapa berkas ditemukan dalam Berkas Boshart. Berita pers Aneta (lihat catatan 121); Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 28 Mei 1934 S 13 (di dalamnya Putusan Pengadilan Tinggi Militer Hindia-Belanda disertai rekuisitor dari pejabat sementara pengacara-fiskal; vonis t.t. 12 Juli 1934; Putusan itu juga dimuat dalam *M.R.T. XXX*, 477–500 dan dalam *Weekblad voor het Recht* th. 96 No.12840).
- 123 Putusan Pengadilan Tinggi Militer di Den Haag t.t. 9 Maret 1934 di *M.R.T. XXIX*, 575–586; Vonis Dewan Angkatan Laut di Den Helder t.t. 14 Agustus 1935 dan Putusan Pengadilan Tinggi Militer di Den Haag t.t. 18 Oktober 1935 dalam *M.R.T. XXXI*, 466–482.
- 124 Boshart, *op.cit.*, 43; *Heldersche Courant* 4 Agustus 1934; pengumuman W. Snel.
- 125 L. de Jong, *Voorspel*, 582; Boshart, *op.cit.*, 47; berkas arsip tentang ini dalam Arsip. Kol. *op.cit.*, Vb 18 September 1936 P 26, 2 November 1933 S 26, 21 November 1936 G 28, 14 Desember 1936 D 31 dan 19 Desember 1936 P 31. Langsung sesudah vonis dinyatakan pemberian grasi, namun karena orang tidak ingin memancing anggapan bahwa hukuman itu terlalu berat maka pemberian grasi itu tidak dibicarakan dalam kesempatan tersebut (Arsip. Kol. Vb 16 Mei 1934 Q 12).
- 126 Arch. Kol. *ibid.*, Vb 27 April 1937 W 9, 5 Mei 1937 Y 10, 10 Juni 1937 I 14 dan 3 Juli 1937 Q 16; dibuat satu kekecualian, untuk sakit jiwa.
- 127 *De schepen der Koninklijke Marine*, 98.
- 128 Untuk selanjutnya, tanpa mengacu secara khusus, diacu kenyataan-kenyataan yang telah disebut dalam bab ini.

- 129 Dalam *Maandschrift C.B.S.* tahun-tahun itu kita dapat mengambil banyak sekali data tentang gaji untuk profesi khusus di Belanda. Untuk Hindia-Belanda data tentang itu sangat sedikit. Kesan saya ketika membandingkan gaji yang berlaku pada Angkatan Laut dan gaji pegawai beberapa bidang perusahaan lain di Belanda ternyata bahwa tidak jauh berbeda. Akan halnya Hindia-Belanda, dan inilah yang terpenting dalam hal ini, tidak banyak yang dapat disampaikan.
- 130 L. de Jong, *Voorspel, op.cit.*, 175–176. Tentang hal ini lihat juga Harmsen, *De Jong als geschiedschrijver*.
- 131 Valtin, *Out of the night*, 346–350. De Jong memakai terjemahan bahasa Jerman yang berjudul *Tagebuch der Hölle*. Jan Valtin adalah nama samaran Richard Krebs.
- 132 Prasyarat De Jong dalam hal ini menurutnya adalah kemungkinan yang ada terkait pemeriksaan melalui arsip Komintern (L. de Jong, *Voorspel*, 176 catatan). Meskipun sejumlah orang dan lembaga terganggu dengan adanya dokumen-dokumen itu (yang sebetulnya dengan mudah dapat dihancurkan), hanya sedikit saja yang terungkap dari arsip-arsip Moskow. Sejauh mana arsip Komintern ini—jika kelak dibuka—dapat dipercaya, akan selalu menjadi pertanyaan yang sulit dijawab.
- 133 Blumberger, 151; Brackman, 27; Kennedy, 202–212; van der Kroef, 21–24; Mcvey, *The development*, 2; Mintz, 63–64; Pluvier, 161–162; Palmer, 105–113.
- 134 Pengumuman S. D. Duyverman, H.W. Felderhof, H. A. van Foreest, M.J. C. Klaassen. Boshart, *op.cit.*, 29 sesungguhnya menyiratkan sesuatu yang lain walaupun tidak berimbang dan tidak jelas.
- 135 Juga brosur CPN, tentang pemberontakan 1949, yang sesungguhnya tidak begitu dapat dipercaya (lihat Lampiran III) tidak mengungkap hal ini. Terbitan-terbitan Komintern justru menyesalkan tidak adanya prinsip komunistis; *Internationale Communiste* 15 April 1933 (no.80, 474–478; *Die Kommunistische Internationale vor dem VII Weltkongres*, 587)
- 136 Berkas-berkas Boshart; pemberitahuan Boshart Jr; De Groot, 118; Endt, 35. Kedua sumber tersebut terakhir sesungguhnya secara umum tidak begitu dapat dipercaya. Di dalamnya mereka menyampaikan data yang bersifat kemungkinan.
- 137 Tentang pengaruh komunis, dibicarakan lebih lanjut oleh Kennedy, 210. Tanpa memperlihatkan bukti dia berbicara tentang *clear evidence of communist instigation and exploitation*. Tentang *exploitation* dalam hal ini tidak berkaitan dengan *instigation* pastilah orang akan suka mendapat

penjelasan lebih lanjut dan penyebutan sumber acuan. Hal yang sama berlaku untuk komentar Palmier, 109–110. Van der Kroef menyebut, h. 24, juga tanpa menyertakan bukti sama sekali, adanya rencana para pemberontak untuk berlayar ke suatu pelabuhan Rusia (sesungguhnya merupakan suatu pertanyaan besar bagaimana bisa mengisi bahan bakar di perjalanan, suatu hal yang tidak mungkin). Akhirnya masih ada sebuah sumber yang sangat membingungkan yang juga menyebut adanya organisasi di belakang pemberontakan, yaitu suatu berita yang disebut meragukan dikirim oleh seseorang bernama Caputo kepada duta Belanda di Berlin. Isinya tentang bahaya komunis secara umum. Data lebih lanjut tentang hal ini sesungguhnya tidak ada sama sekali. Berdasarkan keraguan duta itu, kiranya cukup alasan untuk menganggap berita itu tidak bisa dijadikan bukti bagi pemikiran akan adanya “sel komunis”. Tentang berita ini lihat lebih lanjut di bab 4, h. (263,264) dan catatan 430.

- 138 Tentang perahasiaan sumber dan data oleh PID juga oleh Vromans ini, lihat *Notitie*, 7–8 (R.v.O.).
- 139 Pengumuman J.F. van Dulm. Menurut Van Dulm semua permasalahan itu tidak secara resmi mengemuka, karena P.I.D., kepada siapa surat itu diteruskan, juga tidak ingin tampil. Dalam catatannya, satu kali Boshart menyebut tentang kehadiran beberapa anggota ABC di *De Zeven Provinciën* (Berkas Boshart). Anggapan akan adanya sel ABC tetap terbentur pada tidak adanya data sama sekali tentang ABC di dalam literatur tentang gerakan nasionalis. Sementara dalam sumber-sumber lain yang membicarakan hal ini, ABC tidak disebut sama sekali dalam bentuk apa pun juga. Suatu kemungkinan interpretasi, di mana ABC secara lebih umum diacu sebagai bentuk gerakan nasionalis, bertentangan dengan peran ABC dalam pemberontakan sebagaimana yang disebut Van Dulm.
- 140 Mollema, *op.cit.*, 47–49. Data ini juga ada dalam laporan komisi yang dibentuk di Hindia-Belanda untuk menyelidiki adanya kelompok militer yang berkaitan (Arsip. Kol. Vb 7 Juli 1937 V 16). Majalah R.K.-W.V. *Leerling en Leiding* IX, 164 menegaskan bahwa anggota St. Christophorus memang ± 600 orang per 1 Januari 1933, tetapi sesudah 1933 selalu berjumlah 660 orang.
- 141 *Ongeregeldbeden*, *op.cit.*, 14 dan 24; Mollema, *ibid.*, 49; Swarte, *op.cit.*, 75–76.
- 142 Sejarah itu diuraikan oleh Swarte. Selanjutnya Mollema, *ibid.*, 20–54.
- 143 Swarte, *ibid.*, 56–59.

- 144 Misalnya J.N. de Nijs, J.H. Smith dan P.S. van der Vaart.
- 145 *Handelingen* 1932–1933 II, 1956.
- 146 Swarte, *op.cit.*, 75–76.
- 147 Gejala ini kadang-kadang menimbulkan suatu ketegangan. Mollema, *op.cit.*, 48–54; Swarte, *passim*.
- 148 Ada sejumlah besar sumber tentang sikap kalangan perwira itu. Mollema, khususnya bab 2, 20–54 adalah contoh yang baik. Lebih lanjut Helfrich, 12–16; *De Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog*, 39; Vos, 75 dan 80–84; Gooszen, 8–13; *Wegduiken*, *passim* (terutama 83 dan 204); Bosscher, 33; Vromans, *Notitie* 3–4 (R.v.O.); berbagai naskah ketikan ditulis oleh Vromans (Perpustakaan Marinir), terutama *De opleiding tot matroos*, 3–5, 20, 57 dan 71, *Op reis met Doorman*, 9 dan *De kustforten*, 22–42; bundel berita pers Aneta tentang proses penyelidikan (Arsip. Dir. Mar. No. 1127); laporan yang disebut dalam catatan 140; pengumuman S. D. Duyverman, H. A. van Foreest, A. N. de Vos van Steenwijk, C. J. W. van Waning.
- 149 *Ongeregeldheden*, *op.cit.*, 63.
- 150 Oleh karena itu, laporan yang disebut dalam catatan 140 juga menunjukkan bahwa serikat-serikat tidak menginginkan pemberontakan (p. 29).
- 151 Mollema, *passim*; *De Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog*, 39; *Wegduiken*, 209; bundel berita pers Aneta tentang proses penyelidikan (Arsip. Dir. Mar. No. 1127); laporan yang disebut dalam catatan 140.
- 152 Swarte, *op.cit.*, 76; P. S. van der Vaart berpendapat tidak ada yang mengarah pada melanggar disiplin atau melawan hukum yang tidak dapat diterima.
- 153 Di sini pun jumlah sumbernya banyak sekali. Selain sumber yang disebut dalam catatan 148 yang paling tepat dapat diacu pula pemberitaan pers yang banyak sekali pada bulan Februari dan Maret 1933. Banyak bahan juga dalam debat tentang pemberontakan di parlemen Belanda (tentang hal ini lihat bab 4, *passim*.) dan terutama di Volksraad (*handelingen Volksraad* 1932–1933, 2698–2730; 1933–1934, 823–842, 1109–1117, 1123–1131, 1214–1225). Hal itu juga dapat dibaca dalam surat-menyurat antara De Jonge dan W. Roël. Dalam surat tertanggal 7 Juni 1933 W. Roël menyebut marinir “dari segi disiplin ... sama sekali hancur”. Pada 2 Juli De Jonge balas menulis “Saya juga yakin bahwa disiplin di tubuh marinir tidak terpuji” (Arsip. De Jonge No. 31; surat yang terakhir itu juga ada dalam B. C. de Jonge, *Herinneringen*, 423).

- 154 Untuk pembahasan tentang penegakan disiplin lihat: Mollema, *passim*; Helfrich, 12–16; Vromans, *Notitie*, 3–4 (R.v.O.); Gooszen, *passim*. Pendapat saya tentang masalah ini terbentuk dari pembicaraan dengan J. W. Reynierse, A. N. de Vos van Steenwijk, C. J. W. van Waning, J. J. Wichers.
- 155 Kejangkalan tentang apa yang terjadi khususnya tentang “kelemahan” pemimpin marinir menghadapi serikat-Serikat Cambo, dapat dibaca misalnya dalam rangkaian surat-surat perwira marinir C. J. W. van Waning dari awal 1933 (milik C. J. W. van Waning).
- 156 Menurut pemberitahuan dari J. J. Wichers Osten, ketika ia menjadi komandan Angkatan Laut Hindia-Belanda, ada laporan yang berkaitan dengan cara para pendahulunya menghadapi pelanggaran disiplin berat (pemogokan dinas, unjuk rasa tentang makanan, keadaan rumah sakit, dan lain-lain), yang diberi hukuman ringan bahkan tidak dihukum. Lengkap dengan penyangkalan komandan yang terkait. Atas dasar hal itu Osten mestinya memutuskan untuk cermat dan jika pelanggaran seperti itu terjadi, ia akan bertindak keras. Gejala pertama pemogokan menentukan dalam pengambilan tindakan.
- 157 Lammers, *Het Koninklijk Instituut*, 513–530. Sejauh yang dapat disimpulkan Lammers, jurang itu sama lebarnya, baik di antara perwira bawahan maupun di antara anak buah. Hal itu terjadi meski pada kenyataannya perwira bawahan dapat menempati posisi tengah yang penting (h. 164–165). Tentang jurang antara perwira dan bawahan lihat juga Teitler, 22. Teitler mengaitkan profesionalisasi perwira dan jurang ini (secara umum dan tanpa mengaitkan dengan waktu).
- 158 Lammers, *ibid.*, *Het Koninklijk Instituut*, 5.
- 159 Pengumuman J. F. van Dulm, H. A. van Foreest, A. N. de Vos van Steenwijk, C. J. W. van Waning.
- 160 *Ongeregeldheden*, *op.cit.*, 15; *A.M.W.* th. 12 No. 35, 36 dan 40 (yi. 5, 12 dan 19 Januari dan 9 Februari 1933).
- 161 Lihat misalnya *Wegduiken*, *passim* (khususnya 82–83); L. de Jong, *Voor-spel*, 70; pengumuman H. A. van Foreest.
- 162 Situasi yang tidak dapat dibandingkan kemungkinan terjadi pada Angkatan Darat: Nistrasz, bab utama I; Wilson, 17–29; L. de Jong, *Voor-spel*, *ibid.*, 64–71 dan 601–614.
- 163 *Ongeregeldheden*, *op.cit.*, 49–52; Mollema, *op.cit.*, 12–19. Beberapa komentar yang sangat umum tentang kebijakan pemerintah terdapat dalam Van der Wal, *Rascriterium*.

- 164 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 49–52.
- 165 *Ibid*, 48.
- 166 *Ibid*, 46–48 dan 14; Mollema, *op.cit.*, 52–54; laporan yang disebut dalam catatan 140.
- 167 Dalam naskah dan bekas-bekas lain sebetulnya Boshart sangat menggarisbawahi sekali adanya pemisahan pribumi dan Eropa (Boshart, *passim*).
- 168 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 18–21; Mollema, *ibid.*, 66–68; Boshart, *op.cit.*, 3.
- 169 *Ongeregeldbeden, ibid.*, 48; laporan yang disebut dalam catatan 140.
- 170 Mintz, catatan 53. Serikat sosialis yang dimaksudnya menurut hemat saya tidak bisa lain kecuali I.M.B.
- 171 *Ongeregeldbeden, op.cit.*, 48, 51–52 dan 54; Mollema, *op.cit.*, 14 dan 17–18.
- 172 Mollema, *ibid.*, 16.
- 173 Mollema, *passim*.
- 174 Boshart, *passim*; *Ongeregeldbeden*, 74 dst.; pengumuman W. Snel; surat t.t. 10 Oktober 1937 dari H. L. van Boven kepada B. C. de Jonge (Arsip De Jonge No. 12).
- 175 Oleh berbagai pihak saya diingatkan bahwa hal itu secara resmi merupakan tanggung jawab komandan, yang kelak memang benar bertanggung jawab. Tetapi bahwa dalam masalah seperti ini pentingnya tugas perwira pertama hanya terpaut sedikit dengan pentingnya tugas komandan. Pengumuman J. F. van Dulm, H. A. van Foreest, C. J. W. van Waning.
- 176 Helfrich, 15.
- 177 Dalam pembahasan ini secara sengaja diabaikan penggunaan eksplisit studi perbandingan Lammers yang menarik, *Strikes and Mutinies*. Studi itu masih terlalu umum, kesimpulannya sudah muncul secara implisit dalam bagian sebelumnya.

Pemberontak atau Perintis Kemerdekaan: Tanggapan Indonesia terhadap Pemberontakan di Kapal *De Zeven Provinciën**

Elly Touwen-Bouwsma

Ada kejadian, seperti ini, yang dapat saja membawa keberuntungan: membuka mata dan menuntut kesadaran bertanggung jawab. Kesadaran yang mendarah daging pada satu bangsa yang tumbuh besar dengan semboyan: Aku akan bertahan. Yang mengalir dalam darah kita tanpa bisa kita ingkari. Kesadaran itulah yang bangkit dalam diri saudara dan yang mengajak saudara hadir di sini. Marilah kita mengabadikan kesadaran itu dengan berseru bersama saya: Hidup Sri Baginda Ratu.¹

Begitulah pidato Gubernur Jenderal B.C. De Jonge dalam apel kesetiaan di Waterlooplein, Batavia pada 7 Februari 1933 dalam rangka pemberontakan di kapal lapis baja *De Zeven Provinciën*, yang terjadi tiga hari sebelumnya. Pertemuan itu diselenggarakan oleh *De Vaderlandse Club* dan beberapa kelompok konservatif lain di masyarakat Hindia-Belanda. “Apel itu sangat sukses. Menurut laporan pers, apel tersebut dihadiri ribuan penduduk Eropa, Pribumi, dan Cina di Batavia. Semangat *Oranje* yang sejati langsung terasa. Pekikan seperti ‘enyahkan komunis’ menggema meliputi lapangan, diikuti sorak-sorai. Lagu-lagu tanah air dilantunkan dan dinyanyikan bersama.”² Di berbagai kota besar di Nusantara diselenggarakan apel sejenis, yang juga mengungkapkan dukungan terhadap pemerintah

* Kristel, Conny *et al.* (eds). (2003). *Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland*. Amsterdam: Balans.

Hindia-Belanda, dan menyerukan pengambilan tindakan tegas, bukan hanya bagi para pemberontak, tetapi seluruh rakyat Indonesia, terutama gerakan nasionalis.

Pemberontakan di *De Zeven Provinciën* mengobarkan emosi di Belanda dan Hindia-Belanda. Pada 10 Februari tembakan bom ke kapal menandai akhir berdarah pemberontakan itu. Bom itu menghantam kapal dekat anjungan dan berdampak tragis: 19 orang tewas (16 orang Indonesia dan 3 orang Eropa), 11 orang luka berat (8 orang Indonesia—4 orang di antaranya kemudian meninggal, dan 3 orang Eropa) dan 7 orang luka ringan (5 orang Indonesia dan 2 orang Eropa).³ Penyebab pemberontakan, juga akibat dan reaksinya di Belanda, diuraikan dengan cermat oleh J.C.H. Blom dalam disertasinya tahun 1975. Perhatian Blom terutama tertuju pada tanggapan di Belanda. Situasi dan kejadian di Hindia-Belanda kala itu tidak termasuk perhatiannya, kecuali jika dibutuhkan untuk menerangkan perkembangan-perkembangan Belanda.⁴ Dalam disertasinya tentang *De Vaderlandse Club*, P.J. Drooglever membahas pemberontakan itu dan reaksi serta akibatnya di Hindia-Belanda hanya dalam salah satu paragraf.⁵ Bahasannya menyangkut reaksi kelompok-kelompok beraliran konservatif dan pro Belanda di masyarakat Hindia-Belanda. Sampai saat ini tidak pernah dilakukan penelitian tentang reaksi orang Indonesia terhadap pemberontakan dan penumpasannya yang penuh kekerasan dengan menggunakan bom. Tulisan ini bertujuan melengkapi gambaran tentang pemberontakan di *De Zeven Provinciën*, dengan cara menyoroti tanggapan pihak Indonesia, bukan hanya ketika pemberontakan berlangsung dan saat sesudah dipadamkan, melainkan juga 25 bahkan 50 tahun kemudian.

Tentang tanggapan ketika berlangsung dan sesudah pemberontakan dipadamkan, dipergunakan surat kabar Indonesia dan Risalah Pers Pribumi dan Melayu-Cina. Dalam pengantar cetakan kedua disertasinya, Blom menyatakan bahwa “kemungkinan terpenting menyangkut perolehan informasi tentang pemberontakan—tetapi harus segera dilaksanakan—adalah dengan menelusuri tokoh hidup yang terlibat di Indonesia”.⁶ Penelusuran menunjukkan bahwa di

Indonesia telah beberapa kali dilakukan penelitian perihal pemberontakan di *De Zeven Provinciën* yang bertumpu pada laporan saksi mata dan berbagai wawancara dengan mereka yang terlibat langsung. Dalam rangka peringatan 25 tahun pemberontakan M. Sapija, mayor angkatan bersenjata Indonesia menulis buku yang sebagiannya berdasarkan laporan yang ditulis Pelupessy, waktu itu kelasi bawahan di *De Zeven Provinciën* dan salah seorang pemberontak yang terluka,⁷ berdasarkan ingatannya.⁸ Penelitian lain tentang pemberontakan itu dilakukan tahun 1978. Yaitu menindaklanjuti adanya sejumlah permohonan yang secara teratur diajukan ke Departemen Sosial dan Pusat Sejarah ABRI dari mereka yang terlibat dalam pembangkangan sebelumnya ataupun yang terlibat dalam pemberontakan itu, untuk memperoleh gelar Perintis Kemerdekaan. Penelitian itu dimaksudkan sebagai pencarian data yang dapat menjawab pertanyaan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan. Dalam penelitian itu secara keseluruhan 50 orang diwawancarai. Kesimpulan wawancara dan pertanggungjawaban pelaksanaannya diolah menjadi dua makalah oleh Y. Basri dan R. Santoso.⁹

Bagi saya yang menarik bukan hanya tanggapan pihak Indonesia, tetapi terutama juga data yang dapat lebih memberi kejelasan tentang motif para pemberontak. Apakah pemberontakan itu mulanya aksi protes terhadap pengurangan gaji yang dilihat sebagai ketidakadilan yang kemudian lepas kendali, ataukah para awak Indonesia digerakkan oleh motif nasionalistis atau bahkan komunistis.

A. LATAR BELAKANG

Pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën* terjadi pada saat krisis ekonomi melanda seluruh lapisan masyarakat Hindia, meski tidak dalam kadar yang sama. Masyarakat Indonesia yang paling terkena imbasnya. Kemiskinan melanda dan gaung ketidakpuasan meliputi semua lapisan masyarakat. Ketidakpuasan itu bukan hanya karena tingkat kehidupan yang memburuk, namun juga karena kebijakan represif pemerintah terhadap pergerakan nasional. Pada 1 Oktober

1932 diberlakukan Ordonansi Pengawasan terhadap sekolah swasta tak bersubsidi, yaitu bentuk pengetatan dari Ordonansi Sekolah Liar tahun 1923. Ordonansi yang baru itu bersifat preventif: permohonan izin pengajaran dapat ditolak berdasar dugaan belaka bahwa pendidikan itu dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pengumuman itu menyebabkan perlawanan massa, yang didukung oleh hampir semua partai penting Indonesia. Prakarsanya berasal dari Ki Hadjar Dewantoro. Masyarakat Indonesia menyatakan mendukung gerakan itu secara moral dan material. Di mana-mana dilakukan rapat unjuk rasa. Pada 5 Februari ada unjuk rasa akbar saat massa memprotes keras “tujuan kaum imperialis: menghambat kemajuan rakyat”. Terkejut melihat besarnya unjuk rasa, pemerintah memutuskan untuk membekukan sementara ordonansi itu.¹⁰

Harian dan mingguan Indonesia dipenuhi berita itu, meskipun pembredelan pers digalakkan. Hal itu terutama dimanfaatkan pers Indonesia untuk mengemukakan pendapatnya sedemikian rupa sehingga mereka tidak serta merta menerima pelarangan. Ordonansi itu dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dari pemberitaan yang tak diinginkan di koran dan media lain, dan memberi wewenang pada Gubernur Jenderal untuk melarang sementara media dimaksud. Orang tidak bebas menyatakan keyakinannya. Kritik terhadap penguasa kolonial dapat berakibat penahanan. Hak menyatakan pendapat tidak diakui, apalagi naik banding menentang suatu keputusan.

Sangat mungkin kebijakan represif pemerintah itu merupakan reaksi terhadap tumbuhnya pergerakan nasional. Salah satu tindakan terakhir pemerintah Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff adalah mengurangi masa tahanan Sukarno dari empat menjadi dua tahun sehingga dia sudah bebas pada akhir 1931.¹¹ Pengikut Partai Indonesia bertambah, pidato-pidatonya, di mana dia menyerukan menolak kerja sama dengan pemerintah, menarik perhatian massa, dan bilamana memungkinkan, disebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan melawan dari pergerakan nasional itu juga tidak mengabaikan serikat-serikat marinir. Hal itu terlihat ketika pemerin-

tah Hindia-Belanda di Den Haag pada akhir 1932 mengusulkan untuk menaikkan pengurangan gaji marinir sampai mencapai 17%. Persentase itu hanya berlaku bagi marinir Indonesia. Jumlah total pengurangan bagi marinir Belanda 14%, meskipun pendapatan orang Eropa hampir dua kali lipat orang Indonesia, dengan pekerjaan yang sama.¹² Rencana itu sangat mengancam dan menyulitkan kehidupan marinir Indonesia dan Eropa, juga mendatangkan protes keras di Surabaya, pelabuhan induk marinir. Awak Eropa *De Zeven Provinciën*, sesudah makan siang tanggal 26 Desember 1932 menyanyikan lagu serikat yang liriknya berbunyi: “Pekerja apa pun pengorbanan dan deritamu”.¹³ Namun, serikat Eropa dan Indonesia tidak berhasil menyelenggarakan rapat bersama. Pada tanggal 29 Desember Serikat Marinir Belanda mengorganisasi rapat protes, yang didahului dengan gerak jalan unjuk rasa sepanjang kota Surabaya. Dalam rapat diputuskan untuk mengirim telegram protes kepada Menteri Pertahanan. Keesokan harinya, 30 Desember, diterima berita penundaan sementara pengurangan gaji.¹⁴ Serikat Kelasi Pribumi¹⁵ yang mengadakan rapat pada 1 Januari, tetap pada perlawanannya. Pengurangan gaji memang untuk sementara tidak diberlakukan, demikian disampaikan oleh pengurus, namun “jika audiensi, surat permohonan, dan telegram tidak membuahkan hasil maka akan dikerahkan kekuatan yang lebih besar lagi”.¹⁶

Sehari kemudian *De Zeven Provinciën* bertolak dari Surabaya, untuk mengadakan perjalanan selama tiga bulan keliling Sumatra. *De Zeven*, begitulah kapal itu disebut oleh orang Indonesia, adalah salah satu kapal marinir terbesar. Kapal itu memiliki persenjataan berat dan berfungsi sebagai kapal latihan bagi siswa Pendidikan Dasar Pelaut Pribumi (*Kweekschool voor Inlandse Schepelingen*, KIS) di Makassar. *De Zeven Provinciën* dikenal sebagai kapal yang para perwiranya dialih tugaskan dari tempat lain berdasar alasan tindak indisipliner atau tidak mampu memenuhi tugas.¹⁷ Itulah yang dialami Masinis-Koprall M. Boshart, yang karena keterlibatannya dalam serikat pekerja, dialih tugaskan dari darat di kapal ini.¹⁸ Selain itu, di kapal ada Kelasi Kelas Satu Paradja, yang diduga mempunyai hubungan dengan gerakan nasionalis.¹⁹

Ketika kapal itu pada 2 Januari 1933 bertolak dari pelabuhan Surabaya, 80 siswa KIS ikut serta untuk kepentingan pendidikannya. Selain itu ada 141 awak Eropa (30 perwira dan 26 perwira menengah) dan 256 awak Indonesia, 7 orang di antaranya perwira menengah.²⁰ Laporan Pelupessy diawali pada hari kapal bertolak. Penulisnya tidak termasuk salah satu dari 19 orang pemberontak yang kemudian mendapat hukuman berat, tapi yang ikut aktif dalam gerakan awak Indonesia.²¹ Tidak diketahui apa alasannya dan kapan laporan itu ditulis. Menilik istilah-istilah yang digunakan, laporan itu bernuansa nasionalistis. Diduga laporan itu ditulis dalam rangka peringatan 25 tahun pemberontakan pada 1958.²²

Sesaat sebelum *De Zeven* bertolak dari Surabaya, komandan P. Eikenboom menyampaikan pidato. Ia menyatakan bahwa belum ada keputusan tentang pengurangan gaji. Pengurangan itu dapat diberlakukan, tapi dapat juga diabaikan. Ia berharap hendaknya hal itu jangan sampai menjadi penghalang selama perjalanan. Di atas kapal, suasana di antara awak Indonesia jauh dari tenang. Majalah serikat beredar di kapal, seperti *Sinar Laoetan*, majalah *Serikat Kelasi Pribumi*, dan *Pedoman Kita*, terbitan Serikat Kelasi Pribumi Kristen. Dalam salah satu edisi terakhir *Pedoman Kita*, disengaja atau tidak, terbaca kalimat “God shave the king”. Kalimat itu membuat geger kalangan perwira Belanda. Mungkin kalimat tersebut merupakan kode kaum komunis untuk mogok dan memberontak. Untuk memperbaiki suasana, para perwira Belanda membuat sejumlah acara. Selama perjalanan akan diselenggarakan pesta-pesta persaudaraan dan pertandingan sepakbola antara marinir dan KNIL. Acara-acara itu, ternyata kemudian, juga usaha untuk merahasiakan semua berita tentang aksi protes melawan pengurangan gaji di Surabaya. Di Tanjung Priok, Batavia, diselenggarakan pertandingan tolak peluru. Di Padang Panjang, Sumatra, ada acara pesta persaudaraan KNIL dan marinir. Kami diterima di gedung pertemuan KNIL dan mendapat sajian nasi kuning, minuman ringan, dan bir. Paginya, sambil berbaris bersama KNIL, kami melihat-lihat kota Padang. Kami terus-menerus dibuat sibuk sehingga tidak sempat memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat membahayakan

pemerintah kolonial Belanda. Semua upaya pengaturan itu tidak memperbaiki suasana. Orang terlalu banyak minum minuman keras dan selalu saja terjadi perkelahian kecil antara perwira menengah dan bawahannya. Makanan bagi awak Indonesia buruk. Namun, menurut para perwira Belanda makanan itu sangat enak, jadi kami pun harus ikut memakannya.²³

Pada tanggal 20 Januari De Zeven menuju Sibolga. Di Sibolga kami harus bermain sepak bola dengan KNIL. Kami menolak dan langsung menerima perintah dinas. Sementara itu, kabar angin tentang pengurangan gaji terus terdengar.²⁴ Sebelum sampai pada komandan, berita tentang unjuk rasa di Surabaya dan perintah untuk menjaga pos radio di De Zeven, telah tertangkap dan disebarluaskan oleh Boshart. Para prajurit KNIL tetap berada di sekitar De Zeven. Jelas terlihat para perwira takut akan terjadi pembangkangan atau bahkan pemberontakan. Pada 27 Januari kami bertolak menuju Sabang. Saudara Hendrik²⁵ berhasil mendapat izin polisi untuk merayakan lebaran, akhir puasa, pada 28 Desember di sebuah bioskop. Jelaslah bahwa seorang Kristen menyelenggarakan pesta hari raya Islam untuk para awak kapal, tidak dianggap aneh. Hadir dalam pesta itu 170 awak Indonesia dan kira-kira 30 awak Belanda. Hendrik berpidato dan dengan berapi-api membela pentingnya kerja sama demi perbaikan nasib. Kebanyakan awak Belanda tidak setuju memakai pemberontakan untuk melawan pengurangan gaji, tetapi mereka menyetujui pembangkangan. Sesudah itu lagu serikat dinyanyikan. Polisi yang sebelumnya harus meninggalkan pesta karena panggilan kebakaran di suatu tempat, hanya mendengar nyanyian lagu serikat dan melaporkan hal itu pada komandan. Kemudian menyusul larangan. Di darat pun lagu serikat tidak boleh dinyanyikan. Pada tanggal 30 Januari berita tentang pembangkangan anggota marinir Eropa di Surabaya, disebarkan oleh Boshart.²⁶

Keesokan harinya berita-berita tentang pembangkangan ditempel di papan pengumuman di kapal. Tidak ada lagi gunanya menutupi berita itu, karena kapal De Java sudah menyiarkan dan mengumumkan nama para pembangkang. Kemudian, dengan dorongan dari Paradja,²⁷ Hendrik dan Gosal,²⁸ pada waktu makan

disampaikan kepada siswa KIS tentang terbukanya kemungkinan untuk memperbaiki keadaan. Terutama karena makanan buruk yang dihidangkan, suasana tidak menjadi lebih baik. Lalu dilakukan lagi protes terhadap kualitas makanan di kapal yang buruk. Akan tetapi, para perwira Belanda tidak berminat untuk menangani persoalan ini. Pada 2 Februari kapal *De Zeven* berangkat menuju Olehleh. Pada 3 Februari, berita pembangkangan anggota marinir Indonesia di Surabaya dalam rangka pengumuman pengurangan gaji sebesar 17%, sudah menjadi rahasia umum bagi awak kapal. Mereka ditahan dan dibawa ke Sukalila di pulau Madura, tempat mereka ditahan di barak-barak dengan pengawasan ketat.²⁹

Pada 3 Februari awak Indonesia harus berkumpul di geladak karena komandan hendak berpidato. Komandan menyampaikan bahwa ada pembangkangan kerja di marinir Surabaya. Dia berharap contoh buruk itu tidak diikuti oleh para awak kapalnya. Hal itu pastilah akan disesalnya karena dia bertanggung jawab atas kapal tersebut. Ucapan komandan masuk kuping kiri ke luar kuping kanan. Selanjutnya, komandan menugaskan para perwira untuk menyelenggarakan pesta bagi awak Indonesia. Dengan itu dia berharap kami tidak memikirkan pembangkangan atau aksi lain lagi. Kami mendapat kabar bahwa KNIL mengumpulkan 500 gulden untuk biaya pesta dengan marinir. Kemudian ternyata bahwa uang itu berasal dari kas resimen semata. Kami bahkan diperkenankan berdansa dengan wanita Eropa. Sementara itu Paradja, Rumambi,³⁰ Gosal dan Kawilarang,³¹ Hendrik dan dua orang lagi berunding untuk melakukan pemberontakan dan mengambil alih komando. Mereka berhasil menyelenggarakan rapat di sebuah bioskop. Dua puluh orang Indonesia hadir dalam rapat itu, termasuk saya. Tujuan gerakan adalah melayarkan kapal ke Surabaya dan membebaskan para pembangkang sehingga dapat menunjukkan perjuangan kami pada dunia. Semua yang hadir menyetujui rencana itu. Boshart juga hadir. Dia menekankan bahwa kita punya kemampuan, lebih dari sekadar tukang gosok lencana dan tanda kepangkatan.³² “Inilah saatnya kalian memperlihatkan bahwa kalian dapat mengemudikan kapal,” demikian tandasnya. Lalu dibuat pembagian tugas. Kawilarang akan mengemudikan kapal, Paradja mengurus persenjataan,

Gosal bertanggung jawab atas keamanan di kapal, dan Boshart menjadi pemimpin di ruang mesin. Gerakan direncanakan pada 4 Februari malam. Komandan dan sebagian besar perwira dan perwira menengah akan menghadiri pesta dansa di *Ajehclub*: saat yang bagus untuk melakukan pemberontakan. Paradja meniupkan semangat dengan membacakan beberapa baris lirik lagu yang dinyanyikan anggota marinir Eropa ketika berunjuk rasa di Surabaya: “Siapa yang memberi kita, yang sangat diperbudak, ketekunan, semangat membara, dan kekuatan baja untuk bertahan demi hak kita, meski maut mengancam”. Paradja memang pahlawan yang sesungguhnya dan termasuk yang tewas dalam perjuangan.³³

Pada 4 Februari pagi awak Indonesia lagi-lagi menerima undangan dari KNIL untuk bertanding sepak bola, pada pukul empat sore. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, undangan itu diterima dengan senang hati. Awak De Zeven kalah 4:2. Kami heran karena mendapat karangan bunga dari pemenang. Hal itu pastilah sudah dipersiapkan sebelumnya. Karangan bunga itu diletakkan di ujung tangga sehingga semua yang lewat dapat melihatnya. Komandan dan sebagian perwira dan perwira menengah meninggalkan kapal sekitar pukul delapan dan setengah sembilan. Siangnya Paradja, Kawilarang, dan Gosal meninggalkan kapal dan kembali menjelang malam. Dalam bus menuju pelabuhan, mereka dengan lantang menyanyikan lagu “Indonesia Raya”.³⁴ Mereka siap melakukan pemberontakan malam harinya. Sesaat sebelum pemberontakan pecah, komandan diperingatkan oleh Kopral Van Haastrecht yang menemukan bahwa awak Indonesia mempersiapkan suatu pemberontakan. Komandan pun tertawa ketika mendengar berita dari Van Haastrecht itu: “Akankah monyet-monyet itu membajak kapal? Mereka bahkan tidak tahu bedanya kanan dan kiri kapal.” Para perwira yang hadir pun ikut tertawa dan menepis berita itu dengan berkata: “Haastrecht pasti mabuk lagi.” Pada pukul sepuluh malam Kawilarang membunyikan peluit kapal, tanda yang sudah disepakati, dan pemberontakan pun dimulai. Lampu-lampu dipadamkan, hanya di buritan kapal saja lampu masih menyala. Perwira dan perwira menengah Belanda yang ada berlari ke buritan. Di geladak, 38 awak Indonesia bersenjata siap mengikuti perintah Kawilarang. Seluruh

kapal, kecuali ruang radio, segera dikuasai awak Indonesia. Boshart memaksa perwira petugas ruang radio untuk menyerah. Pelupessy bertugas melucuti senjata para perwira yang ada. Dalam waktu singkat semua perwira menyerah. Kawilarang berhasil mengemudikan kapal ke luar pelabuhan Olehleh. Sangat merepotkan, karena kemudinya terkunci. Kemudian para awak berhasil merusaknya sehingga lebih mudah membuat putaran. Pada 5 Februari disusun proklamasi dalam bahasa Belanda dan Inggris:

“Kapal dikuasai para awak dan berlayar menuju Surabaya. Sehari sebelum merapat komando akan diserahkan pada komandan. Kami memprotes pengurangan gaji yang tidak adil, dan menuntut pembebasan langsung rekan kami yang ditahan tiga hari yang lalu. Di kapal semua dalam keadaan baik, tidak ada kekerasan dan tidak ada yang terluka.”

Bendera Belanda dikibarkan setiap hari. Semua pekerjaan dilakukan seperti biasa. Ketegangan naik sebentar ketika dibicarakan mengenai diperbolehkan tidaknya komandan Eikenboom naik ke kapal. Eikenboom dan sejumlah besar perwira mengejar kapal dengan menggunakan kapal pemerintah Aldebaran, yang tertambat di dekat kapal De Zeven, di pelabuhan Olehleh. Tetapi sebagian besar awak menolak. Para awak Belanda sangat terpukul karena tidak pernah terlintas di benak mereka awak Indonesia berani dan mempunyai kemampuan mengemudikan kapal. [Pelupessy ada di atas geladak ketika kapal dibom di Selat Sunda, pada 10 Februari.³⁵ Dia mengatakan bahwa baru bom kedua yang tepat sasaran,³⁶ dan ketika itu dia terluka]. Serpihan bom masih bersarang di lengan kanan saya. Di sekeliling saya penuh korban luka dan anggota badan yang terlepas. Salah satu sahabat saya yang terluka berat, meminta tolong, tapi saya tak dapat membantunya karena saya sendiri terluka. Dia meninggal di depan mata saya.³⁷

Sampai di situ laporan Pelupessy. Bagaimana akhirnya sudah diketahui. Para pemberontak ditangkap, dibawa ke kapal lain, dan ditahan di Pulau Onrust. Korban tewas dibawa dengan kapal lain. Awak Indonesia dimakamkan di Pulau Kerkhof; awak Eropa di Pulau

Purmerend. Pada tahun 1933 para pemberontak dihadapkan dengan pengadilan militer. Para awak Indonesia dijatuhi hukuman penjara antara 6 tahun sampai dengan 18 tahun. Bagi awak Eropa, awalnya dijatuhi hukuman penjara antara 4 tahun sampai dengan 16 tahun.³⁸ Dalam pengadilan banding mereka mendapat pengurangan hukuman.

Secara garis besar, laporan Pelupessy sejalan dengan uraian Blom. Namun, jelas terlihat perbedaan penekanan. Pertama bertambahnya ketegangan dalam hubungan antara perwira Eropa dan bawahan Indonesia. Perbedaan gaji dan makanan, ketidakpedulian yang ditunjukkan para perwira terhadap pada anggota marinir Indonesia, bagaimana secara terang-terangan kehidupan awak Indonesia dipermainkan, pendek kata perasaan diperlakukan secara diskriminatif, ikut menumbuhkan tekad pada diri anggota marinir Indonesia. Bagi awak Indonesia, Boshart dilihat sebagai tokoh yang mendorong mereka mengambil alih kekuasaan atas kapal dan yang mendukung mereka untuk mewujudkannya. Boshart sendiri selalu menyangkal bahwa dirinya adalah salah satu tokoh penting dalam persiapan dan pelaksanaan pemberontakan, sebagaimana tertulis dalam laporan komisi peneliti. Blom, yang lebih jauh meneliti kedudukan Boshart, menyatakan bahwa tindakan dan keikut-sertaannya turut menentukan suasana di kapal pada hari-hari di antara 4 sampai dengan 10 Februari, itu.³⁹ Namun, dari laporan Pelupessy, hal itu juga berlaku pada pemberontakannya sendiri. Dalam setiap perbincangan dengan para awak Indonesia, Boshart selalu terlibat. Dalam laporan Pelupessy dibantah bahwa Boshart mencegah agar tidak lebih parah. Sebaliknya: dia menyapa harga diri mereka. Kini saatnya mereka dapat menunjukkan nilai diri mereka dan bahwa mereka tidak hanya pantas sebagai penggosok lencana. Sekarang mereka beroleh kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengendalikan kapal tanpa bantuan perwira Eropa.

Pelupessy tidak menyebut tentang telegram yang menyatakan kepada dunia bahwa para awak tidak mempunyai kecenderungan komunis.⁴⁰ Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa laporan itu ditulis ketika gerakan komunis sedang jadi sorotan di Indonesia.

Memang benar, berita tersebut disiarkan dua kali. Para pemberontak cukup mempunyai alasan untuk melakukan hal itu. Sebelum pemberontakan, para awak Indonesia dicurigai mempunyai hubungan dengan organisasi komunis. Mungkin saja tindakan keras pemerintah terhadap pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatra pada 1926 dan 1927, menjadi alasan bagi para awak untuk menyertakan berita itu pada siaran ulang. Akhirnya yang mencolok adalah penekanan pada perjuangan bersama dan dinyanyikannya lagu “Indonesia Raya”. Hal ini kelak menjadi pokok penting yang menunjukkan bahwa pada diri para pemberontak nyata terlihat semangat nasionalistis dan antikolonial.

B. TANGGAPAN PERS INDONESIA

Dalam pemberitaan awal tentang pemberontakan, terasa adanya keresahan menanggapi kenyataan bahwa para pemberontak adalah orang Indonesia, sebagaimana diumumkan oleh Gubernur Aceh. Harian *Deli Krant* juga memberitakan bahwa *De Zeven Provinciën* dikuasai awak pribumi dan akan berlayar ke Surabaya, bahwa mereka tidak berniat jahat, bahwa sehari sebelum tiba di Surabaya komando akan diserahkan pada komandan, dan bahwa mereka memprotes pengurangan gaji dan penahanan rekan mereka yang terlibat aksi protes.⁴¹ Pers Indonesia disarankan agar bersikap menjaga jarak dan mengabaikan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan keresahan dan membatasi diri pada kutipan dari pemberitaan kantor berita Aneta.⁴² Kantor berita itu tak menyetujui pemberontakan tersebut, tetapi sangat kritis menghadapi kehati-hatian dalam pemberitaan. Menurut pendapatnya, hal itu mengarah pada pelarangan dan kekerasan terhadap hak pers, justru pada saat rakyat membutuhkan kejelasan akan apa yang terjadi.⁴³ Kejadian-kejadian di kapal memang diberitakan, tetapi apa sebab pecahnya pemberontakan, tidak pernah dijelaskan, demikian pernyataan *Soeara Soerabaja*.⁴⁴ *Soeara Oemoem*, salah satu dari sedikit koran yang menyertakan komentar, berpendapat bahwa gerakan anggota marinir juga dapat dilihat sebagai protes biasa, bukan gerakan serikat. Para pelaut pribumi tidak mempunyai organisasi

sendiri dan juga tak dapat mengharap bantuan dari serikat pekerja. Menurut koran ini, pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën* merupakan bukti lemahnya hubungan di kalangan marinir. Tidak masuk akal bahwa dalam keadaan resah seperti itu, komandan tanpa ragu meninggalkan kapal untuk mencari kesenangan di darat. Hal itu menunjukkan suasana tidak sehat di tubuh marinir: komandan dan perwira tidak peduli akan kesulitan anggotanya.⁴⁵ Menurut majalah *Adil*, pemilahan antara anggota Eropa dan pribumi tidak adil dan menggunakan dua patokan: tidak ada perbedaan hasil kerja pelaut Eropa dan pribumi. Sementara pengurangan gaji bagi anggota Eropa ditambah 4%, anggota pribumi harus menambah pengorbanannya dengan 7%. Jelaslah bahwa kali ini pun pihak pribumi yang lebih jadi korban. Politik kolonial tak kenal terima kasih, begitulah penulis dengan getir menutup tulisannya.⁴⁶

Pers Indonesia juga marah dan tersinggung menanggapi apel kesetiaan di kota-kota besar di Jawa. Di mata mereka, pemberontakan itu sangat menakutkan Belanda sehingga mereka menyelenggarakan apel dukungan pada ratu Belanda. *Soeara Soerabaja* sangat mengecam pernyataan Gubernur Jenderal bahwa sebelum pemberontakan awak Belanda diculik di bawah pengawasan ketat awak pribumi.⁴⁷ Maka jelaslah apa yang dimaksud dengan semboyan: “aku akan bertahan”. Itu kata-kata provokasi, begitu kata koran tersebut. Jelaslah bahwa Gubernur Jenderal tidak mengerti bahwa kejadian itu bermula dari perjuangan ekonomi untuk memperbaiki tingkat kehidupan, tak ada hubungannya dengan politik. Semboyan “aku akan bertahan” menyiratkan suatu konflik hebat antara kulit putih dan kulit cokelat. Pers kulit putih mempertajam pertentangan antara kulit putih dan kulit cokelat dengan menyebut tanpa dasar bahwa marinir di bawah pengaruh gerakan nasionalis.⁴⁸ Di Padang sekelompok penduduk setempat berbaris membawa bendera Belanda. Pada 10 Februari bendera itu berkibar di hampir semua kantor perusahaan Eropa dan pemerintah daerah Padang. Biasanya bendera hanya dikibarkan pada hari raya. Apakah hari itu hari raya bagi orang Belanda, setidaknya bagi pemerintah? Ataukah hal itu bersamaan dengan direbutnya

kembali *De Zeven Provinciën*.⁴⁹ Salah satu pembicara di Padang bahkan menyatakan harapannya “semoga pemerintah diperkenankan memegang tampuk pimpinan negeri dan tetap bertindak keras, demi kebaikan wilayah ini”.⁵⁰

Kami sakit hati karena tulisan pers Belanda yang menyebut kami bangsa yang tidak dapat dipercaya, tulis harian *Soeara Soerabaja*. Bukankah sudah jelas ternyata ada juga orang Belanda di antara pemberontak itu. Ada juga orang Belanda yang terlibat dalam upaya melayarkan kapal itu. Mengapa hanya orang Indonesia yang tidak dapat dipercaya? Mereka dirasuki kebencian terhadap bangsa kita dan lupa bahwa mereka tinggal di negeri kita. Beberapa bulan yang lalu *Java-Bode* menulis bahwa di *De Zeven Provinciën* ada propaganda komunis. “Komunisme adalah gerakan dunia yang tidak membedakan warna kulit, dan itulah yang ditakuti kelompok konservatif, imperialis, dan kapitalis.”⁵¹ Pemimpin redaksi *Soeara Oemoem*, T. Bumi, tanpa basa-basi menyatakan pendapatnya tentang jawaban Gubernur Jenderal atas unjuk kesetiaan warga Batavia. Gubernur Jenderal mau mempolitisasi pemberontakan itu dengan menyebut bahwa 40 pemuda Belanda dilarikan oleh kaum pribumi.⁵² Sekali lagi dia ingin menggarisbawahi pemilahan *sini* dan *sana*, antara orang Belanda dan orang non-Belanda. Hal itu tidak taktis dan upaya rekayasa untuk mempertahankan kedigdayaan orang Eropa di masyarakat yang heterogen. Lagipula telegram yang dikirim ke pers dunia ditandatangani oleh awak pribumi dan Eropa. Serangan langsung koran itu terhadap Gubernur Jenderal bukan tanpa akibat. Tak lama setelah itu pimpinan redaksi ditahan. Koran itu dituduh menghasut.⁵³

Pemadaman pemberontakan yang penuh kekerasan itu, tidak mengundang komentar dari pers Indonesia, meskipun ada 23 orang korban, 19 orang di antaranya orang Indonesia. Komentar-komentarnya tertuju pada reaksi dari kelompok-kelompok yang setia pada Belanda di masyarakat Hindia. Dengan segala cara, pers menentang bahwa protes para awak kapal itu ada kaitannya dengan politik. *Soeara Oemoem* menyatakan bahwa mereka menganggap pemberontakan itu sebagai kerusuhan kecil. “Kami sama sekali tidak ingin menyetujui

atau menutupi kesalahan para pelaut, namun secara keseluruhan tidak ada kaitan sedikit pun antara para pemberontak dan kaum nasionalis”.⁵⁴ Justru pers Hindia-Belanda yang menyatakan bahwa ada hubungan antara para pemberontak dan gerakan nasionalis. Pada hari apel kesetiaan di Batavia, harian *Java-Bode* menulis bahwa gerakan nasionalis hampir dapat dipastikan berada di belakang serikat mariner, dan meski tidak secara langsung, setidaknya ada hubungan antara kaum nasionalis dan para pemberontak.⁵⁵ Dalam pers Indonesia terutama disebut perihal pengurangan gaji.⁵⁶ Ketidakpuasan mengenai perlakuan buruk para perwira terhadap awak kapal, juga sering disebut sebagai penyebabnya.⁵⁷

C. PERINTIS KEMERDEKAAN ATAU PEMBERONTAK

Pada peringatan 25 tahun pemberontakan di *De Zeven Provinciën* tahun 1958, tanggapan pihak Indonesia jauh berbeda. Pengurangan gaji sebagai motif pemberontakan sama sekali tak disebut. Motif yang disebutkan adalah perbedaan perlakuan antara anggota marinir Eropa dan Indonesia. Hal itu seakan-akan memperkuat sikap antikolonial para pemberontak. Harian berhaluan komunis *Harian Rakjat* pada 5 Februari 1958 menulis: “Pemberontakan di *De Zeven* adalah pemberontakan antikolonial pertama yang dilakukan oleh pelaut Indonesia.” Sapija memilih pernyataan itu sebagai moto bukunya tentang pemberontakan. Partai Komunis Indonesia yang pada 1958 mencapai puncak kekuasaan, masih mencoba menyebut pemberontakan itu sebagai gerakan yang terilhami oleh komunisme. Sapija berpendapat bahwa pemberontakan itu bukanlah gerakan komunistis, namun tidak meragukan “bahwa pemberontakan itu adalah gerakan revolusioner”.⁵⁸ Menurutnya, pengaruh Serikat Kelasi Pribumi, jangan sampai dianggap remeh. Sebagian besar pemberontak adalah anggota serikat ini, yang berjuang demi persamaan perlakuan antara anggota marinir Indonesia dan Eropa.⁵⁹ Sapija menganggap pengaruh gerakan nasional terhadap para pemberontak cukup besar. Bekas pemberontak, Djendroharto, yang dalam rangka peringatan diwawancara, mengata-

kan bahwa, “Sebelum pemberontakan pecah, para awak sering mendengarkan pidato-pidato Bung Karno. Hal itulah yang semakin menyadarkan kami. Orang Belanda sangat takut pada Bung Karno.”⁶⁰ Menurut Sapija, lagu *Indonesia Raja* secara teratur dinyanyikan, bukan hanya beberapa jam sebelum pemberontakan di De Zeven, tetapi juga di galangan marinir Surabaya ketika anggota marinir Indonesia membangkang dari dinas.⁶¹ Pemberontakan itu menurutnya hendaklah dilihat sebagai bagian dari perjuangan menumbangkan penindasan kolonial. “Para pahlawan bangsa kita telah membuat sejarah: pertama pemberontakan komunis pada 1926, disusul pemberontakan di *De Zeven Provinciën* pada 1933, dan sesudahnya revolusi Indonesia 1945, dengan proklamasi 17 Agustus sebagai puncak perjuangan. Jasa para pemberontak dalam perjuangan kemerdekaan harus tetap dikenang, sekarang dan bagi generasi mendatang.”⁶² Sukarno telah memutuskan bahwa para pemberontak yang tewas harus dianggap sebagai pahlawan.⁶³ Namun menurut Sapija, pantas juga untuk memberikan gelar Perintis Kemerdekaan bagi para pemberontak yang masih hidup.⁶⁴ Lebih lanjut ia mengusulkan agar nama Selat Sunda diubah menjadi Selat Zeven dan nama para pemberontak yang gugur, yaitu Paradja, Gosal, dan Rumambi dijadikan nama kapal-kapal marinir Indonesia.⁶⁵

Lima belas tahun kemudian, dalam rangka peringatan 40 tahun pemberontakan, sekali lagi sebagian bekas pemberontak menyatakan bahwa gerakan mereka merupakan gerakan bersenjata yang penting dalam pergerakan nasional. Walaupun tidak ada hubungan organisatoris langsung yang dapat ditunjukkan, namun dapat ditemukan semangat patriotisme. Wartawan T. Bumi, yang sudah disebut di atas, ditunjuk sebagai otak di belakang pemberontakan itu. Dia telah menyebarkan gagasan Soetomo, pemimpin Soerabajasche Studieclub, kepada pelaut Indonesia melalui majalah serikat kelas pribumi *Sinar Laoetan*.⁶⁶

Seruan Sapija dan tuntutan para mantan pemberontak perihal pengakuan atas semangat nasionalistis mereka, diabaikan. Hal itu terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Departemen Sosial dan Pusat Sejarah ABRI 1978. Penelitian itu dilakukan karena adanya

permohonan pemberian gelar perintis kemerdekaan, yang diajukan secara teratur, bagi tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembangkangan, sebelum pemberontakan, dan yang terlibat pemberontakan. Pihak Departemen ingin tahu siapa saja yang dapat dicalonkan. Di samping itu, harus diperhitungkan juga keputusan pemerintah yang menyebut bahwa gelar perintis kemerdekaan hanya dapat diberikan kepada pemohon, jika atas dasar kegiatan politiknya oleh pengadilan kolonial dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya tiga bulan penjara. Seluruhnya ada 50 orang yang diwawancara di Jakarta, Bandung, Cilacap, Solo dan Yogya, yang secara langsung terlibat pemberontakan atau pembangkangan dinas di Surabaya.⁶⁷ Sebagian besar yang diwawancara adalah lulusan KIS di Makassar. Sekolah itu sangat diminati oleh orang Indonesia, karena ada jaminan kerja pada marinir dengan gaji yang baik, dan kemungkinan menjadi perwira menengah. Begitu masuk marinir mereka dihadapkan pada diskriminasi. Marinir Eropa berpenghasilan dua kali lipat untuk pekerjaan yang sama, mereka mendapat makanan yang lebih baik dan tinggal di dek atas, sementara marinir Indonesia di dek bawah, dekat ruang mesin. Ketidakuasan atas perbedaan perlakuan itu yang mendasari berdirinya *Inlandsche Marine Bond* (IMB, Serikat Kelas Pribumi) pada 1925.⁶⁸ Sekitar 50% dari yang diwawancara ketika itu adalah anggota IMB, dan dalam persentase yang jauh lebih kecil adalah anggota Serikat Kelas Pribumi Kristen dan Katolik. Tidak ada satu pun di antara yang diwawancara yang duduk sebagai pengurus organisasi-organisasi itu. Lebih dari setengahnya menyatakan masuk marinir karena krisis ekonomi. Mereka berharap dengan cara itu dapat memperbaiki penghidupan.⁶⁹

Bukti yang sama sekali baru tidak ditemukan. Sebagian besar informan tak dapat lagi mengingat detail-detailnya. Akan tetapi, mereka menyampaikan, dan hal itu mengherankan para peneliti, bahwa lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan ketika mereka kembali ke Olehleh, beberapa waktu sebelum pemberontakan pecah. Para peneliti menggunakan dua surat kabar Indonesia *Soeara Oemoem* dan *Bintang Timoer*, dan ironisnya mereka menyimpulkan bahwa penyebab pemberontakan adalah pengurangan gaji. Apakah mereka menyadari

bahwa pers Indonesia ketika itu dibungkam ketat oleh pembredelan pers pemerintah Hindia-Belanda, dan karenanya bukanlah sumber yang objektif, ataukah pertimbangan oportunistis, *Asal Bapak Senang*, memainkan peran di sini? Pemberontakan tidak berkaitan dengan pergerakan nasional, begitu kedua peneliti tersebut menyimpulkan sambil mengacu pada telegram yang dikirim oleh pihak Belanda dan Indonesia.⁷⁰ Terlebih lagi, bendera Belanda setiap hari dikibarkan. Foto Ratu Wilhelmina juga tetap tergantung di kantin perwira.⁷¹ Para peneliti menyimpulkan bahwa motif politik di balik pemberontakan hampir tidak dapat dibuktikan. Partai politik tidak terlibat dalam pemberontakan itu. Faktor ekonomi dan perbedaan antara awak Eropa dan Indonesia-lah yang menjadi penyebab pemberontakan.⁷² Tidak jelas, apa yang kemudian diperbuat dengan hasil penelitian itu. Sangat mungkin pemerintah Indonesia memutuskan, mengikuti tradisi hemat Belanda, bahwa gelar perintis kemerdekaan tidak dapat diberikan karena tidak ada motif politik sama sekali.

D. PENUTUP

Berdasarkan data yang tersedia menyangkut tanggapan Indonesia, tidak dapat diperoleh kejelasan lebih tentang motif pemberontakan. Meski dapat dipastikan bahwa pengaruh komunis sama sekali tidak berperan di sini. Pernyataan L. de Jong bahwa pemberontakan diprakarsai oleh kelompok komunis, telah dipatahkan oleh Blom.⁷³ Masih menurut Blom, baik *Komintern*, maupun Partai Komunis Belanda dan Partai Komunis Indonesia, tidak ada yang menuntut kehormatan para pemberontak.⁷⁴ Hampir tidak pernah ada diskusi perihal ideologi, kecuali pernyataan bahwa seharusnya semua pelaut dianggap dan diperlakukan sejajar.⁷⁵ Sapija yang dengan tegas mencoba memperlihatkan bahwa pemberontakan itu adalah sebuah gerakan yang diilhami komunis, mengakui bahwa hal itu tak dapat dibuktikan.⁷⁶

Pengaruh gagasan nasionalistis terhadap para pemberontak juga sulit dibuktikan. Guna mendapat gambaran tentang hal itu, tanggapan pihak Indonesia dari tahun 1933 hendaknya diletakkan dalam konteks

kolonial masa itu. Mengingat kebijakan represif terhadap pergerakan nasionalis, tidak mengherankan jika pers Indonesia dengan segala cara mengingkari adanya hubungan antara pemberontakan dan pergerakan nasionalis. Berdasarkan pemberitaan pers, Santoso dan Basri pun juga sampai pada kesimpulan tersebut. Adanya pembredelan membuat pers Indonesia tidak dapat bebas mengemukakan pendapat. Meskipun hal itu tidak berarti bahwa secara tersirat kritik tajam tetap dilontarkan pada pemerintah kolonial. Bukan semata menyangkut pemberontakan, tetapi kebijakan represif secara keseluruhan terhadap pergerakan nasional dan rakyat Indonesia, merupakan pokok kritik bagi pers. Justru pers Hindia-Belanda yang menulis adanya hubungan tak langsung antara kaum nasionalis dan pemberontakan.⁷⁷

Dari data Indonesia yang ada sekarang juga tidak terlihat bahwa para pemberontak mempunyai kaitan langsung dengan partai-partai nasional. Menurut Blom memang ada pengaruh dari gagasan nasionalis. Dia bertumpu pada data bahwa pemimpin pemberontak, Paradj, mempunyai hubungan dengan pergerakan nasionalis.⁷⁸ Drooglever berpendapat bahwa para pemberontak tidak semata digerakkan oleh motif material. Menurutnya, kesadaran nasional tentulah ikut berperan.⁷⁹ Dari data Indonesia ternyata bahwa semangat kemerdekaan yang diilhami gagasan nasionalistis memang jauh lebih berperan mendorong pemberontakan itu dibanding ikatan dengan pergerakan nasionalis. Di sini terlihat dampak kenyataan bahwa pemberontakan itu bukan aksi sepihak awak Indonesia, tetapi bahwa awak Eropa juga ada yang terlibat. Gagasannya memang datang dari awak Indonesia, meskipun dalam aksinya mereka didukung Boshart, yang terutama menyapa harga diri mereka, dan awak Eropa lain, yang pada prinsipnya hanya ingin mogok kerja, tidak lebih. Gagasan nasionalistis menjangkau para awak Indonesia melalui berbagai jalur. Sapija menulis, melalui mulut salah satu mantan pemberontak, bahwa para awak sering mendengarkan pidato-pidato Bung Karno. De Jong menunjuk kepentingan *Sinar Laoetan* dalam penyebaran pemikiran nasionalistis.⁸⁰ Menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dapat dilihat sebagai ungkapan patriotisme. Waktu itu lagu tersebut disukai dan merupakan alat

ampuh untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa orang Indonesia ikut ambil bagian dalam perjuangan internasional melawan kapitalisme dan imperialisme. Lagu serikat dapat dinyanyikan oleh orang Indonesia maupun Eropa, tetapi lagu “Indonesia Raya” hanya punya makna bagi orang Indonesia. Itulah lagu kebangsaan mereka yang terkait erat dengan perjuangan kemerdekaan.

Pengaruh serikat-serikat kelas pribumi terhadap para pemberontak juga tak dapat dipandang remeh. Akan halnya serikat-serikat Indonesia, tidak selalu jelas perbedaan antara kegiatan yang diilhami gagasan sosialis dan nasionalis. Pada awal Januari 1933 *Inlandsche Marine Bond* sudah siap melakukan gerakan. Sebagian besar pemberontak adalah anggota serikat ini, terbukti dalam penelitian Santoso dan Basri, meskipun tak ada yang duduk dalam dewan pengurus. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dari segi organisatoris. Serikat tersebut waktu itu didirikan karena ketidakpuasan terhadap perbedaan perlakuan di tubuh marinir, dan terutama tindakan diskriminasi perwira Eropa dalam menghadapi anggota Indonesia. Hal itu juga terbaca dalam *Sinar Laoetan* dan majalah serikat Indonesia lainnya yang beredar di kalangan awak kapal. Ditambah dengan pengurangan gaji yang dianggap tidak adil, hal tersebut di atas merupakan pendorong bagi para pemberontak untuk bertindak lebih jauh dari sekadar mogok kerja. Motif sosialis memang berperan tetapi bukan itu saja penyebab pemberontakan.

Pendek kata, pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën* dapat dilihat sebagai protes sosial menentang pengurangan gaji yang diilhami oleh gagasan kemerdekaan nasional, yang dilakukan untuk mengguncang kehidupan orang Eropa yang tampil superior. Suatu tindakan nasionalis penuh makna. “Kami tidak lagi dianggap sebagai anak kecil yang nakal, tetapi sebagai ancaman bagi mereka, bukan hanya gerakan revolusionernya saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia” begitu ungkapan *Pandji Timoer* pada 22 Februari 1933.⁸¹ Seberapa keras hantaman terhadap superioritas dan kekuasaan kolonial Eropa itu dirasakan, terlihat antara lain dari tanggapan pemerintah kolonial. Bukan hanya para pemberontak diadili, tetapi KIS juga ditutup, ke-

kangan terhadap pendidikan Indonesia lebih diperketat, pers tetap dibredel dan pergerakan nasional diberangus.⁸²

Endnotes

- 1 S.L. van der Wal, *Herrinneringen van Jbr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap* (Groningen, 1968), 162.
- 2 P.J. Drooglever, *De Vaderlandse Club 1929–1942. Totoks en de Indische politiek* (Franeker, 1980), 79–80.
- 3 J.C.H. Blom, *De muiterij op de Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederland* (2e druk: Utrecht, 1983), 58.
- 4 *Ibid.*, 5.
- 5 Drooglever, *op.cit.*, 78–79.
- 6 Blom, *op.cit.*, III.
- 7 Dalam *Berita, Het Dagblad Oemoem Indonesia* 13 Februari 1933, namanya termasuk dalam daftar yang luka ringan.
- 8 M. Sapija, *Sedjarah Pembrontakan di Kapal Tudjub (Zeven Provinciën)* (Jakarta, 1960). Sapija juga banyak memanfaatkan *Muiterij in de Tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de “Zeven Provinciën” naar de gegevens van Maud Boshart, oud- korporaal-machinist bij de Nederlandse marine* (Amsterdam, 1949).
- 9 Y. Basri, “Pelaksanaan Sejarah Lisan dalam Penelitian Sejarah Pemberontakan *De Zeven Provinciën*,” (Makalah dipresentasikan dalam Seminar Sejarah Nasional, Jakarta, 1981); dan R. Santoso, “Peranan Inlandsche Marine Bond (IMB) dalam Pemberontakan di Atas Kapal *De Zeven Provinciën*,” (Makalah dipresentasikan dalam Seminar Sejarah Nasional, Jakarta, 1981). Kedua makalah itu termasuk bagian dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 10 J.M. Pluvier, *Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942* (Den Haag/ Bandung, 1953), 52–57. Sampai 8 bulan kemudian, suatu bentuk baru Ordonansi Sekolah Liar masih dipertahankan.
- 11 Pluvier, *Ibid.*, 50.
- 12 M. Sapija, *op.cit.*, 61–62.

- 13 *Muiterij in de Tropen*, 12–15. Dalam lagu itu ada lirik berbunyi: Pekerja, apa pun pengorbanan dan deritamu, Kita tak satu darah? Kita tak didera dengan cambuk sama? ... Satu dalam pikulan yang sama kita bawa, Satu perlawanan, pertaruhan seluruh kaum proletar. Lagu ini dilarang dinyanyikan di atas kapal.
- 14 Alasan penundaan itu bukanlah telegram protes, tetapi keberatan pimpinan marinir sendiri dan Departemen Pertahanan atas usulan pengu-rangan itu. Blom, *op.cit.*, 36–40.
- 15 Serikat Kelasi Pribumi didirikan pada 1925. Alasan pendirian Serikat itu adalah semakin banyaknya ketidakpuasan atas perlakuan tidak adil antara pegawai Eropa dan pribumi. Termasuk di dalamnya perbedaan gaji (Santoso, Peranan, 1). Pada awal Januari 1933 anggota Serikat tercatat sebanyak 1100 orang (*Muiterij in de Tropen*, 10). *Sinar Laoetan* adalah majalah serikat ini.
- 16 *Muiterij in de Tropen, op.cit.*, 15.
- 17 Blom, *op.cit.*, 44–45.
- 18 *Muiterij in de Tropen, op.cit.*, 14.
- 19 Blom, *op.cit.*, 45.
- 20 *Ibid.*, 44.
- 21 Sapija, *op.cit.*, 125.
- 22 Laporan Pelupessy dimuat dalam Sapija, *op.cit.*, 76–101. Bila tidak di-sebutkan lain maka data dalam paragraf ini berasal dari laporan itu.
- 23 Makanan di kapal marinir bagi awak Indonesia dan Eropa disesuaikan menurut kebiasaan. Biasanya awak Indonesia mendapat nasi dan ikan asin, sedang awak Eropa mendapat kentang dan daging. Perbedaan itu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan Indonesia. Mereka merasa didiskriminasi. Lihat Sapija, *ibid.*, 60–61.
- 24 Lihat Blom, *op.cit.*, 48. Pengumuman tentang pengurangan gaji pegawai Eropa terjadi pada malam sebelum tiga hari libur. Sesuai dengan kebi-asaan, perayaan Lebaran bersamaan dengan dua hari libur yang pada tahun itu diikuti hari Minggu. Dalam rangka itu, sebagian besar kapal kembali ke Pelabuhan Surabaya.
- 25 Hendrik, juru api *De Zeven Provinciën*, termasuk kelompok 19 orang pem-berontak yang dihukum berat. Lihat Sapija, *ibid.*, 125.
- 26 Blom, *op.cit.*, 44. Pada 30 Januari empat ratus anggota marinir Eropa mogok. Empat puluh yang tetap menolak kembali bekerja, ditahan dan

- diangkut ke Malang. Lihat juga *Pandji Timoer, Dienstweigering pada Marine*, 8 Februari 1933.
- 27 Kelasi kelas satu Paradja diketahui berhubungan dengan kelompok-kelompok nasionalis. Lihat Blom, *ibid.*, 45.
 - 28 Gosal adalah kopral perawat.
 - 29 Menurut Sapija, *op.cit.*, 67 dalam hal ini ada politik *divide et impera* pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula disampaikan pengurangan gaji pegawai Eropa, beberapa hari kemudian bagi pegawai Indonesia. Pada 3 Januari 1933 kurang lebih 425 orang Indonesia membelot dari kapal Java, Sumba, Piet Hein dan Evertsen. Mereka ditahan di barak yang disebut barak pes (penyakit menular), di Sukalila, Pulau Madura. Sebelum diangkut mereka dengan lantang menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Lihat Sapija, *op.cit.*, 69–70.
 - 30 Rumambi adalah radiotelegrafis dan menguasai bahasa-bahasa asing.
 - 31 Kawilarang adalah kelasi kelas satu.
 - 32 Di sini diacu ucapan seorang perwira marinir Belanda dalam tulisannya di majalah serikat *Sinar Laoetan*. Perwira itu meremehkan orang Indonesia. “Orang pribumi tidak pantas bekerja di kapal Marinir Belanda. Mereka hanya dapat menggosok lencana dan tanda kepangkatan.” Lihat a.l. Sapija, *op.cit.*, 60–61.
 - 33 Gelar Perintis Kemerdekaan diberikan secara anumerta, sebagaimana diberikan pada anggota Indonesia lain yang tewas dalam penumpasan pemberontakan yang dahsyat. Lihat Sapija, *ibid.*, 89.
 - 34 Hal itu dibenarkan oleh salah satu yang diwawancarai (R. Santoso, 1981, 8). Pada waktu pemerintahan De Graeff diputuskan untuk mengizinkan lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan. Dia berpendapat bahwa lagu itu tidak bisa dianggap sebagai lagu kebangsaan, tetapi harus dilihat sebagai lagu perkumpulan atau lagu *club*. Lihat L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog XIa* (Den Haag, 1984), 339. Orang Indonesia lain pandangannya. Mereka menganggap lagu “Indonesia Raya” sebagai lagu kebangsaan dan kemudian ternyata memang benar, yaitu sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
 - 35 Sebelum pemboman, menjelang pukul sembilan, beberapa kapal terbang menyampaikan ultimatum: “Menyerah tanpa syarat atau akan digunakan kekerasan; berhenti dan kibarkan bendera putih.” Jawabannya berbunyi: “Para awak sama sekali tidak berkecenderungan komunis dan tanpa kekerasan, namun memprotes pengurangan gaji dan penahanan anggota marinir yang terlibat aksi protes; jangan ganggu kami semua

- baik di kapal.” Pada pukul sembilan lewat seperempat bom dijatuhkan. Van der Wal, *Herinneringen*, 165.
- 36 Dalam laporan dan kajian lain tentang Pemberontakan di *De Zeven Provinciën*, tidak pernah disebut adanya dua bom. Bom pertama langsung tepat sasaran.
- 37 Sapija, *op.cit.*, 118–120.
- 38 *Muiterij in de Tropen, op.cit.*, 41–42.
- 39 Blom, *op.cit.*, 50–52.
- 40 *Ibid.*, 55.
- 41 “Pemberontakan dalam Kapal Perang De Zeven Proviçiën’, *Pandji Timoer*, 8 Februari 1933.
- 42 Di antara koran dan majalah yang terbit di Jawa pada hari Senin 6 Februari, hanya lima koran di Batavia dan tiga di Surabaya, dan sebuah harian Semarang dan Jogja, yang memuat pemberitaan *Aneta* tentang pemberontakan. Hanya harian berbahasa Cina *Keng Po* dan *Soeara Oemoem* yang menyertakan komentar. Lihat rangkuman Pers Hindia dan Melayu-Cina (IPO), Kantoor voor de Volkslectuur en Aanverwante Aangelegenheden (Balai Poestaka), 11 Februari 1933, 81.
- 43 “Karena Zeven Provinciën dan Ordonansi. Golongan Belanda Tjemas dan Beraksi”, *Medan Ra’jat*, 10 Februari 1933.
- 44 “Rassenwaan”, *Soeara Soerabaja*, 11 Februari 1933.
- 45 IPO, 11 Februari 1933, 82–83.
- 46 *Loc.cit.*
- 47 Yang dimaksud adalah 40 orang anggota marinir Eropa di Surabaya yang tetap membelot dari dinas, dan karenanya dibawa ke Malang dengan pengawalan sebuah batalyon KNIL Manado.
- 48 “Rassenwaan”, *Soeara Soerabaja*, 11 Februari 1933.
- 49 “Demonstrasi tidak Berarti dan Berbahaja”, *Berita, Dagblad Oemoem Indonesia*, 11 Februari 1933.
- 50 “Soeara dari Westkust”, *Berita, Dagblad Oemoem Indonesia*, 14 Februari 1933
- 51 “Communistische Propaganda”, *Soeara Soerabaja*, 18 Februari 1933.
- 52 “Rassenwaan”, *Soeara Soerabaja*, 11 Februari 1933.
- 53 *Soeara Oemoem*, IPO, 18 Februari 1933, 97–99.
- 54 *Ibid.*, 98.
- 55 Drooglever, *Club*, 82.

- 56 *Berita Betawi*, IPO, 11 Februari 1933, 87
- 57 *Pewartas Soerabaja*, IPO, 18 Februari 1933, 100.
- 58 Sapija, *op.cit.*, 25.
- 59 *Ibid.*, 42.
- 60 *Bintang Minggu*, 9 Februari 1958, dalam: Sapija, *ibid.*, 50.
- 61 Sapija, *ibid.*, 53.
- 62 *Ibid.*, 11–12.
- 63 *Ibid.*, 54.
- 64 *Ibid.*, 130.
- 65 *Ibid.*, 133.
- 66 Drooglever, *op.cit.*, 82–83.
- 67 Basri, “Pelaksanaan” dan Santoso, “Peranan”.
- 68 Santoso, *ibid.*, 1.
- 69 Basri, *op.cit.*, 9–10.
- 70 Santoso, *op.cit.*, 2.
- 71 *Ibid.*, 13.
- 72 Santoso, *ibid.*, 18 dan Basri, *op.cit.*, 10.
- 73 Blom, *op.cit.*, 65. Lihat juga L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog I* (Den Haag, 1969), 175–176. Dalam *Het Koninkrijk XIa*, 373, dengan mengacu pada Blom, De Jong kembali lagi pada pernyataannya. Lihat juga De Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog XIII* (Den Haag, 1988), 82.
- 74 Blom, *ibid.*, 66.
- 75 *Ibid.*, 55.
- 76 Sapija, *op.cit.*, 25.
- 77 Drooglever, *op.cit.*, 82
- 78 Blom, *op.cit.*, 76.
- 79 Drooglever, *op.cit.*, 82–83.
- 80 De Jong, *Het Koninkrijk XIa*, 373–374.
- 81 “Fascisme di Indonesia? Bergantoeng di Oedara!”, *Pandji Timoer*, 22 Februari 1933.
- 82 Blom, *op.cit.*, 99.



Sumber Penelitian

Hans Blom

Bab satu buku ini adalah terjemahan dari Bab II disertasi saya yang berjudul *De Muiterij op de Zeven Provinciën. Reacties en Gevolgen in Nederland (Pemberontakan di Kapal De Zeven Provinciën. Tanggapan dan Dampak di Negeri Belanda)* (Universitas Leiden, 1975; terbitan komersial Bussum, 1975; cetakan kedua Utrecht, 1983; cetakan ketiga Amsterdam, 2005). Seratus tujuh puluh tujuh catatan kakinya dengan saksama mengacu pada sumber-sumber yang digunakan untuk membuat rekonstruksi ini. Rujukan sumber sekunder pada catatan kaki ini sebagian besar agak ketinggalan, sebab sejak 1975 telah terbit berbagai tulisan baru yang lebih lengkap. Namun, sumber-sumber primernya tetap tidak ada perubahan. Pendahuluan ekstra di dalam terbitan tahun 1983 dan tahun 2005 memberi sedikit keterangan tambahan tentang informasi yang didapatkan setelah tahun 1975. Bab ini memuat pembahasan yang lebih bersifat umum tentang sumber-sumber yang telah saya gunakan, berdasarkan lampiran di buku berbahasa Belanda yang disesuaikan dan dilengkapi, dan yang berjudul *Enige Opmerkingen bij de Bronnen voor Hoofdstuk 2*. Juga memuat beberapa komentar terhadap sumber-sumber untuk bab 2 (halaman 337–339).

Sumber-sumber yang paling penting dan sebagian besar paling bisa dipercaya tentang pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën* adalah dokumen-dokumen yang muncul dari penelitian resmi yang

dilakukan segera setelah terjadinya pemberontakan itu. Sumber yang disimpan di negeri Belanda terdapat dalam arsip dari (bekas) Departemen Koloni. Ketika penelitian dilakukan, arsip itu telah disimpan di Kementerian Dalam Negeri. Pada saat ini, semua arsip disimpan di Arsip Nasional Belanda. Dokumen yang paling penting di dalam arsip itu terdiri atas dua ikhtisar yang bersifat kronologis (sebagian dari dokumen yang termasuk ikhtisar tersimpan dalam *Verbal* tahun 1933, yaitu *Vb 10 April 1933 D 8* dan *Vb 27 November 1933 P 28*. Data tambahan terdapat di dalam berbagai *Verbal* yang lain—lihat anotasi di dalam buku berbahasa Belanda saya.

Hasil penelitian terbuka yang paling koheren dari tahun 1933 adalah buku putih *De Ongeregeldebeden bij de Koninklijke Marine in den Aanvang van 1933 (Kerusuhan di Angkatan Laut Kerajaan pada Awal Tahun 1933)* (Den Haag, 1934) yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda. Pada tahun yang sama diterbitkan tulisan J.C. Mollema yang berjudul *Rondom de Muiterij op De Zeven Provinciën (Sekitar Pemberontakan di Kapal De Zeven Provinciën)*. Buku ini sangat erat mengikuti pandangan yang disampaikan buku putih dan malah barangkali berdasarkan pandangan yang lebih luas, yang tidak terbit. Corak sumber lain yang dihasilkan penyelidikan resmi adalah berkas-berkas perkara. Sebagian telah diterbitkan di dalam *Militair Rechtelijke Tijdschrift (Majalah Hukum Militer)* tahun XXIX, XXX, dan XXXI. Berkas-berkas perkara yang tidak terbit sebagian besar tidak dapat dikonsultasikan lagi di negeri Belanda. Tetapi kebanyakan perkara pengadilan dibahas dalam komentar dan berita pers.

Secara mendetail, sebagian besar sumber-sumber ini saling mendukung. Hanya saja keluasan penggambaran peristiwa agak berbeda-beda. Di dalam sumber ini, fakta-fakta murnilah yang paling dapat dipercayai karena merupakan hasil dari penyelidikan yang cermat. Akan hal penafsiran, setiap versi memunculkan sedikit perbedaan antara satu sumber dengan yang lain. Penafsiran Mollema dan di dalam berkas perkara lebih mendalam daripada di dalam buku putih, yang sebanyak mungkin membatasi diri pada penyebutan fakta.

Satu-satunya sumber yang memberi versi yang sama sekali berbeda tentang kejadian secara keseluruhan—walaupun uraian fakta tidak terlalu berlainan, adalah kumpulan laporan Maud Boshart, Kopral Masinis ketika pemberontakan terjadi, yang kemudian dihukum sebagai “pemberontak utama”. Temuan dokumen-dokumen ini saya peroleh berkat jasa J. Wolfswinkel, yang menemukannya pada keluarga Boshart dan yang menulis tesis S-2 tentang Maud Boshart. Sebagian besar sumber ini terdiri dari catatan yang dibuat Boshart selama dalam penjara, beberapa surat dan dokumen yang terpenting, dan ikhtisar tentang kejadian, ditulis pada 1937. Naskah ini—yang jelas ditulis agar diterbitkan—cukup lama dibiarkan saja. Baru pada 1978 naskah diterbitkan—sesudah cetakan pertama buku saya diterbitkan, dengan pengantar oleh H.J.A. Hofland dan berjudul *Maud Boshart: De Muiterij op De Zeven Provinciën* (*Maud Boshart: Pemberontakan di Kapal De Zeven Provinciën*) (Amsterdam, 1978). Di dalam pendahulunya Hofland berpendapat sangat negatif tentang penafsiran saya. Saya menganggapinya di dalam resensi bukunya yang dimuat di *Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis* (*Majalah Sejarah Sosial*) (Oktober 1979, halaman 268–272).

Sumber yang muncul dalam kurun waktu yang kurang lebih sama (sebagian muncul tak lama sesudah peristiwa pemberontakan) dengan penyelidikan resmi, memberikan pandangan yang sama sekali berbeda tentang peristiwa itu. Terutama mengenai peranan Boshart sendiri jika dibandingkan dengan penyelidikan resmi. Meskipun keduanya berdasarkan data fakta yang kurang lebih sama, kadang kala sedikit kurang tepat di dalam detail-detail—hal yang dapat dimaklumi karena kurangnya kesempatan untuk menggunakan sumber. Meskipun pandangan Boshart sama dengan yang ia gunakan dalam mengajukan pembelaannya, sama sekali tidak memberi kesan dibuat untuk pembelaan diri. Justru sebaliknya, menggambarkan secara gamblang bagaimana Boshart mengalami pemberontakan dan akibat-akibatnya.

Beberapa publikasi yang muncul kemudian, menurut Boshart, tidak dapat dianggap sebagai gambaran yang sebenarnya. Yang pertama

adalah sebuah brosur partai komunis di negeri Belanda yang berasal dari tahun 1949: *Muiterij in de Tropen, de Eensgezinde Strijd van Blank en Bruin op de "Zeven Provinciën"*. Naar Gegevens van Maud Boshart, *Oud-korporaal-machinist bij de Nederlandse Marine (Pemberontakan di Daerah Tropis, Perjuangan yang Sejalan antara Putih dan Cokelat di Zeven Provinciën. Menurut Data-data Maud Boshart, Mantan Kopral Masinis di Angkatan Laut Belanda)* (Amsterdam, 1949). Boshart menjadi komunis ketika atau sesudah Perang Dunia Kedua. Walaupun brosur ini mengutip secara tepat naskah yang ketika itu belum terbit, perbandingan kedua teks secara keseluruhan memperlihatkan bahwa naskah di dalam brosur itu dapat disebut sebagai pemutarbalikan fakta yang disengaja. Sebuah terbitan dari penerbit komunis Pegasus, yaitu *Voorwaarts en Niet Vergeten (Maju dan Jangan Lupa)* oleh R. Meyer (Amsterdam, 1958), memuat pasase yang mengikuti brosur itu secara garis besar. Kedua publikasi ini ternyata tidak penting bagi rekonstruksi historis pemberontakan itu. Begitu juga wawancara dengan Boshart di dalam *Weet je Nog in de Jaren Dertig (Masih Ingat di dalam Tahun Tiga puluhan)* oleh Friso Endt (Amsterdam, 1960: 34–42). Gambaran Endt agak lebih mendekati gambaran praperang seperti yang terdapat di dalam naskah, tetapi mengandung terlalu banyak kesalahan sehingga tidak dapat dianggap sebagai sumber yang valid.

Dalam penelitian mengenai peristiwa pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën* ini, berbagai arsip, baik dari pemerintah maupun lembaga swasta, telah saya gunakan (lihat daftar rinci di dalam buku saya, terbitan 1975). Beberapa naskah yang ketika itu belum terbit pun saya gunakan. Selain laporan Boshart yang telah saya sebut di atas, saya juga menggunakan teks-teks A.G. Vromans, seorang mantan opsir Angkatan Laut, yang kemudian bekerja pada *Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie*. Semua teks itu tersimpan di lembaga tersebut dan di Perpustakaan Angkatan Laut (*Marinebibliotheek*), yang juga menyimpan sekumpulan dokumen tentang pemberontakan itu. Akhirnya, saya juga telah berusaha untuk memperoleh data tambahan melalui wawancara dengan mereka yang terlibat. Saya sempat juga

berkorespondensi dengan beberapa orang dari mereka. Beberapa orang memberi saya kesempatan untuk melihat dokumen-dokumen.

Dalam kaitan itu, saya berusaha menghubungi delapan orang Eropa yang dihukum sebagai pemberontak utama. Empat orang di antara mereka ternyata telah meninggal dunia (termasuk Boshart, yang meninggalkan berkas-berkas dokumen), seorang menolak dihubungi, seorang lagi tidak menanggapi surat-surat saya, dan seorang lagi karena cacat tubuh tidak dapat dihubungi. Jadi satu orang saja, yaitu juru minyak W. Snel, dapat saya ajak bicara. Para opsir Angkatan Laut negeri Belanda yang terlibat serta beberapa pejabat terkait di bekas Hindia Belanda ternyata lebih banyak dapat diajak berbicara. Dalam hal ini saya lebih mengutamakan pembicaraan dengan orang yang terlibat di dalam penyelidikan pada 1933 daripada opsir kapal, meskipun saya juga berbicara dengan beberapa di antara mereka. Komandan kapal ternyata terlalu sakit untuk diajak bicara ketika saya dekati, dan tidak lama kemudian wafat. Pada akhirnya, untuk merekonstruksi pemberontakan dan pemberantasannya, saya telah mewawancarai H.W. Felderhof, H.A. van Foreest, M.J.C. Klaassen, W. van Prooyen, J.W. Reynierse, A.N. de Vos van Steenwijk, C.J.W. van Waning, dan J.J. Wichers.

Karena berbagai alasan praktis, penelitian di luar negeri tidak dapat saya lakukan. Hal tersebut juga berkaitan dengan topik utama penelitian saya yang membahas tanggapan dan akibat pemberontakan di negeri Belanda itu. Dampak yang merugikan dari keputusan itu adalah bahwa orang yang langsung terlibat serta saksi mata di Indonesia tidak bisa diwawancarai (kemungkinan besar—dalam hampir semua kasus—akan terhambat karena saya kurang mahir berbahasa Indonesia). Untunglah, kekurangan ini kemudian sebagian besar diperbaiki oleh Dr. E. Touwen-Bouwisma. Artikelnya tentang pemberontakan yang memakai sumber-sumber Indonesia dimuat di dalam buku ini.



Daftar Pustaka

- Aarse, J. en B. Marinus. (1967). *Houzee Kameraad. Een documentaire over de N.S.B.* Amsterdam.
- Algemeen Marine Weekblad, th. 12, No. 37. (1933, Januari).
- Basri, Y. (1981). Pelaksanaan sejarah lisan dalam penelitian sejarah pembentakan De Zeven Provinciën. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Sejarah Nasional*, Jakarta.
- Berita, Het Dagblad Oemoem Indonesia. (1933, Februari 13).
- Bintang Minggu, in: Sapija, *Sedjarah*, 50. (1958, 9 Februari).
- Blom, J. C. (1983). *De muiterij op de Zeven Provinciën: Reacties en gevolgen in Nederland.* Utrecht: 2e druk.
- Blumberger, J. T. (1935). *De communistische beweging in Nederlandsch-Indië.* Haarlem.
- Bosscher, P. (n.d). *Anderhalve eeuw Koninklijke Marine.*
- Brackman, A. C. (1963). *Indonesian communism: A history.* New York.
- Communistische propaganda. (1933, Februari 18). *Soeara Soerabaja.*
- De Ongeregeldheden bij de Koninklijke Marine in den aanvang van 1933 (1934).
- Demonstrasi tidak berarti dan berbahaya. (1933, Februari 14). *Berita, Het Dagblad Oemoem Indonesia.*
- Drooglever, P. (1980). *De Vaderlandse Club 1929–1942: Totoks en de Indische politiek.* Franeker.
- Endt, F. (1958). *Weet je nog wel de jaren dertig.* Amsterdam.
- Fascisme di Indonesia? Bergantoeng di oedara! (1933, Februari 22). *Pandji Timoer.*

- Gooszen, A. F. (1934, April 29). *Eenige beschouwingen over toestanden bij de marine, ook in verband met de gebeurtenissen in Indië en met het rapport van de commissie Idenburg*. Gravenhage, Den Haag.
- Groot, P. (1965–1967). *De dertiger jaren: Herinneringen en Overdenkingen*. Amsterdam.
- Handelingen 1932–1933 II. (1956).
- Helfrich, C. E. (1950). *Memoires I*. Amsterdam/Brussel.
- Internationale Communiste, 8. (1933, April 15).
- IPO. (1933, 18 Februari). *Pewartar Soerabaja*, 100.
- IPO. (1933, Februari 18). *Soeara Oemoem*, pp. 97–99.
- IPO. (1933, 11 Februari). *Berita Betawi*.
- Jong, L. de. (1969). *Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog: Deel I. Voorspel*. Den Haag.
- Jong, L. de. (1969). *Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog: Deel II. Neutraal*. Den Haag.
- Jong, L. de. (1972). *Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog: Deel IV. Mei '40–Maart '41*. Den Haag.
- Jong, L. de. (1984). *Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog: Deel XIa*. Den Haag.
- Jong, L. de. (1988). *Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog: Deel XIII*. Den Haag.
- Karena Zeven Provinciën dan ordonansi: Golongan Belanda tjemas dan beraksi. (1933, Februari 10). *Medan Ra'jat*.
- Kennedy, M. A. (1957). *A history of communism in East Asia*. New York.
- Kroef, J. M. van der. (1965). *The communist party of Indonesia: Its history, program and tactics*. Vancouver.
- Lammers, C. J. (1963). *Het Koninklijk Instituut voor de Marine: Een sociologische analyse van de inlijving van groepen adspirant-officieren in de zee-macht*. Assen.
- Leerling en Leiding: Tijdschrift gewijd aan de maatschappelijke vraagstukken van dezen tijd. (n.d). *Rooms-Katholiek Werkliedenverbond*.
- MacVey, R. (n.d). *Summary of the development of the Indonesian communist party and its relations with the Soviet Union*. Cambridge-Mass.
- Mintz, J. S. (1965). *Mohammed, Marx and Marhaen: The roots of Indonesian Socialism*. London-Dunmow.
- Mollema, J. C. (1934). *Rondom de mouterij op De Zeven Provinciën*. Haarlem.

- Palmier, L. (1973). *Communists in Indonesia: Power pursued in vain*. New York.
- Pemberontakan dalam kapal perang De Zeven Provinciën. (1933, Februari 8). *Pandji Timoer*.
- Pers Hindia dan Melayu-Cina (IPO), 81. (1933, Februari 11). *Kantoor voor de Volkslectuur en Aanverwante Aangelegenheden (Balai Poestaka)*.
- Pluvier, J. M. (1953). *Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942*. Den Haag/Bandung.
- Rassenwaan. (1933, Februari 11). *Soeara Soerabaja*.
- Santoso, R. (1981). Peranan Inlandsche Marine Bond (IMB) dalam pemberontakan di atas kapal De Zeven Provinciën. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Sejarah Nasional*. Jakarta.
- Sapija, M. (1960). *Sedjarah pembrontakan di Kapal Tudjuh (Zeven Provinciën)*. Jakarta.
- Soeara dari Westkust. (1933, Februari 14). *Berita, Het Dagblad Oemoem Indonesia*.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 40. (1933).
- Swarte, J. L. (n.d). *Spreekpunt 1971: 25 jaar V. B. Z. en wat daaraan vooraf ging*.
- Teitler, G. (1972). *Toepassing van geweld: Sociologische essays over geweld, verzet en militaire organisatie*. Meppel.
- Valtin, J. (1942). *Out of the night*. New York.
- Vb D 8. (1933, April 10). *Arsip Kolonial*.
- Vb M 3. (1933, Februari 18). *Arsip Kolonial*.
- Vb No. 13. (1933, Januari 24). *Arsip Kolonial*.
- Vb No. 13. (1933, Maret 14). *Arsip Kolonial*.
- Vb No. 26. (1932, Desember 30). *Arsip Kolonial*.
- Vb No. 30. (1933, Januari 24). *Arsip Kolonial*.
- Vb No. 5. (1933, Mei 4). *Arsip Kolonial*.
- Vb P 28. (1933, November 27). *Arsip Kolonial*.
- Vb S 13. (1934, Mei 28). *Arsip Kolonial*.
- Vb U 2. (1933, Februari 14). *Arsip Kolonial*.
- Vos, A. (1933). Eenige beschouwingen over onze Marine in verband met de jongste gebeurtenissen in Nederlandsch Indië. *Verslagen Indisch Genootschap*.

- Wal, S. L. van der. (1968). *Herinneringen van Jbr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap*. Groningen.
- Wilson, J. J. (1960). *Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis*. Assen.

Lampiran

Sumber Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie



Foto 1. *Schade aan De Zeven Provinciën nadat het schip door een bom was getroffen, 10 februari 1933.*



Foto 2. *Pantserschip De Zeven Provinciën na de beëindiging van de muiterij door een bom op het schip op 10 februari 1933, vermoedelijk inmiddels op weg naar Soerabaja. De uiterlijke schade aan het schip rechtsvoor is waarschijnlijk door een persbureau ingetekend.*



Foto 3. Een foto van het pantserschip *De Zeven Provinciën*, vermoedelijk gemaakt ten tijde van de munterij in februari 1933, kort voor of na het gooien van de bom op het schip.



Foto 4. Leden van de onderzoekscommissie naar de muiten op De Zeven Provinciën op Onrust.



Foto 5. Een als verdachte op Onrust geïnterneerde Indonesische schepeling wordt volgens de islamitische gewoonte beëdigd voor verhoor door de onderzoekscommissie.



Foto 6. Een aantal als verdachten op Onrust geïnterneerde schepelingen worden na verhoor door de onderzoekscommissie afgemarcheerd.



Foto 7. De onderzoekscommissie verhoort een groot aantal Indonesische schepelingen, die als verdachte zijn geïnterneerd op Onrust.



Foto 8. Enkele Indonesische schepelingen in het kampement op Onrust, waar zij als verdachten waren geïnterneerd.



Foto 9. De leden van de onderzoekscommissie aan boord van een sloep die hen van het eiland Onrust naar de wal in Batavia (Jakarta) zal brengen.



Foto 10. *De bom die vanuit een Dornier-Wall vliegboot werd gegooid op het pantserschip De Zeven Provinciën, dat in handen van muiters was.*

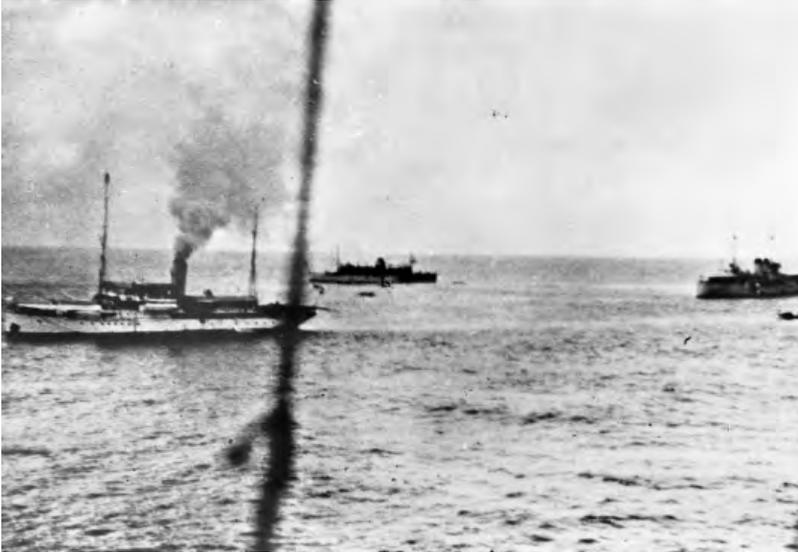


Foto 11. Nadat op 10 februari 1933 een bom op het pantserschip *De Zeven Provinciën*, dat in handen van muiters was, was gegooid, is het schip tot stilstand gekomen. De muiters, voor zo ver niet gedood, hebben zich overgegeven. De *Orion* (een inspectievaartuig van de Dienst Bebakening en Kustverlichting) en de mijnlegger *Gouden Leeuw*, liggen standby.

Indeks

- Aceh, xvii, 11, 74
Aldebaran, 23, 72
Ambon, 14
Aneta, 29, 51, 57, 60, 74, 86
Angkatan Laut, 1–4, 9, 12, 23, 31, 33, 42, 48, 57, 58, 61, 90, 92, 93
Angkatan Laut Hindia-Belanda, 1, 23, 61
Anti Blanda Club (ABC), 35
Asbeck, 25
Atjeh-club, 14
Australia, 3, 36

Bandung, 79, 83
Basri, Y., xvii, 65, 81, 82, 83, 87
Batavia, 1, 3, 4, 5, 12, 13, 23, 25, 31, 55, 63, 68, 76, 77, 86, 104
Bintang Timoer, 79
Blom, J.C.H., iii, iv, vii, xvi, xvii, xix, 1, 64, 73, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 111
Bogaerts, Els, iii, xix

Boshart, Maud, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 31, 35, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 83, 91, 92, 93
Boven, H.L. van, xi, 15, 16, 21, 47, 50, 62
Breda, 32
Bumi, T., 76, 78

Cambo, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 61
Christelijke Inlandse Matrozen Bond, 12
Cilacap, 79
Coppers, Th.H.J., 25, 26, 27, 28, 29, 56
Coster, F.W., 31

Deckers, L.N., 2, 49, 56
Dekker, D., 16, 21
Den Haag, xi, 1, 2, 3, 32, 55, 57, 67, 83, 85, 87, 90
Den Helder, 38, 57

- Departemen Pertahanan, 1, 2, 4, 84
 Departemen Pertahanan Belanda, 1
 Departemen Sosial dan Pusat Sejarah ABRI, 65, 78
 Departemen Urusan Koloni, 2
 De Vaderlandse Club, xviii, 63, 64, 83
 Dewantoro, Ki Hadjar, 66
 Dinas Pelayaran Laut (*Marine Stoomvaart Dienst*), 19, 21
 Dinas Rahasia Politik (*Politieke Inlichtingen Dienst*, atau PID), 35
 Djendroharto, 77
 DPR, 38, 39
 DPRD, 38
 Drooglever, P.J., xviii, 64, 81, 83, 86, 87
 Dulm, J.F. Van, 35, 36, 51, 59, 61, 62
 Dulm, M.H. van, 4
 Eikenboom, P., 11, 21, 31, 52, 68, 72
 Emmahaven, 24
 Endt, Friso, 51, 58, 92
 Felderhof, H.W., 31, 58, 93
 Fels, W.F.J., 14, 15, 16, 20, 52
 Foreest, H.A. van, 51, 52, 58, 60, 61, 62, 93
 Gosal, 54, 69, 70, 71, 78, 85
 Graaff, S. de, 2
 Graeff, A.C.D. de, xii, 66, 85
 Haastrecht, van, 14, 52, 53, 71
 Harian Rakjat, 77
 Hatta, Mohammad, xi, xiii
 Helfrich, C.E.L., 48, 60, 61, 62
 Hendrik, 54, 69, 70, 84
 Hofland, H.J.A., 91
 Indonesia Raya, x, xiii, xv, 71, 74, 79, 81, 82, 85
 Inggris, 3, 22, 36, 49, 72
 Inlandse Matrozen Bond, 12
 Jawa, 24, 74, 75, 86
 Jepang, 32, 112
 Jerman, 34, 58
 Jonge, B.C. de, xii, 1, 23, 50, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 83
 Jong, L. de, 34, 57, 58, 61, 80, 81, 85, 87
 Kawilarang, 14, 15, 31, 54, 70, 71, 72, 85
 Klaassen, M.J.C., 58, 93
 KNIL, 68, 69, 70, 71, 86
 Komintern, 34, 35, 58, 80
 komisi-Van Buuren, 4
 Komite urusan kepentingan anggota marinir (Combo), 37
 Kota Raja, 11, 13, 48
Kweekschool voor Inlandse Schepelingen (KIS), 10, 44, 46, 67, 68, 70, 79, 83
 Lammers, C.J., 42, 43, 61, 62, 96
 Lebaran, 6, 11, 69, 84

Leeuwarden, 32
 LIPI, iii, iv, vii, viii, xix
 Madura, 70, 85, 112
 Mahkamah Angkatan Laut Surabaya, 31
 Majalah Marinir (MM, *Algemeen Marine Weekblad*), 37, 38
 Makassar, 10, 44, 67, 79
 Manado, 14, 86
 Meijer, C., 14
 Menteri Pertahanan, 2, 3, 6, 33, 67
 Menteri Urusan Koloni, 2, 6
 Mervel, J.B., 13
 Meyer, R., 55, 92
Militair Rechdelijk Tijdschrift (Majalah Hukum Militer), 90
 Mintz, Jeanne, 46, 58, 62
 Mollema, J.C., 5, 17, 31, 39, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 90
 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, xix, 92, 111, 112
 Olehleh, 11, 23, 70, 72, 79
 Ordonansi Pengawasan, 66
 Ordonansi Sekolah Liar, 66, 83
 Osten, J.F., 1, 2, 23, 55, 61
 Padang, 11, 24, 68, 75, 76
 Padang Panjang, 68
 Paradja, 11, 14, 15, 21, 26, 35, 36, 45, 47, 51, 52, 54, 67, 69, 70, 71, 78, 81, 85
 Partai Indonesia, 66
 Pejabat Tertinggi, 4
 Pelupessy, 65, 68, 72, 73, 84
 Pengadilan Tinggi Militer Hindia-Belanda, 31, 57
 Perintis Kemerdekaan, v, xviii, 63, 65, 77, 78, 79, 80, 85
 Persatuan Anggota Marinir Katolik Roma Santo Christophorus (*Rooms-Katholieke Vereniging voor Marinepersoneel Sint Christophorus*), 37
 Persatuan Pegawai Pemerintah (*Vereniging van Overheidsdienaren*), 23
 Persatuan Pelaut Katolik Santo Paulus, 45
 Persatuan Serikat Belanda, 38
 Persatuan Teknisi Marinir Kerajaan (*Vereniging van Technici bij de Koninklijke Marine*), 37
 Perundingan Terstruktur, 38, 39
 Prooyen, W. van, 25, 27, 29, 56, 93
 Pulau Kerkhof, 72
 Pulau Onrust, 31, 72, 102, 103, 104
 Pulau Purmerend, 73
 Reynierse, J.W., 14, 17, 61, 93
 Risalah Pers Pribumi dan Melayu-Cina, 64
 Rumambi, 26, 54, 70, 78, 85
 Rusia, 22, 59

- Sabang, 11, 12, 53, 69
- Santoso, R., xviii, 65, 81, 82, 83, 84, 85, 87
- Sapija, M., xviii, 65, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87
- Scalongne, D., 4
- Schoo, M., 24, 25
- SDAP (*Sociaal Democratische Arbeiderspartij*/Partai Buruh Sosial demokrat), 38
- Sekretariat Negara, 4
- Selat Sunda, 24, 56, 72, 78
- Selat Zeven, 78
- Serikat ABK Kristen, 37
- Serikat Anak Buah Kapal (SABK), 37
- Serikat Anggota Bintara Marinir, 3
- Serikat Anggota Tamtama dan Bintara (SATB), 37
- Serikat Kelasi Pribumi (SKB) (*Inlandse Matrozen Bond*), 12, 45, 78
- Serikat Kelasi Pribumi Kristen (SKPK) (*Christelijke Inlandse Matrozen Bond*), 12, 45, 78
- Serikat Koprak Marinir Kerajaan (SK), 3, 37
- Serikat Marinir Belanda, 67
- Serikat Perwira Marinir Menengah dan Madya (SPMM), 37
- Sibolga, 11, 69
- Soerabajasche Studieclub, 78
- Soetomo, 78
- Solo, 79
- Steenwijk, A.N. de Vos van, 16, 26, 29, 31, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 93
- Sukalila, 70, 85
- Sukarno, xi, xiii, 66, 78
- Sumatra, xiii, 10, 11, 23, 24, 34, 67, 68, 74
- Surabaya, xiii, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 39, 45, 46, 48, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 84, 86
- Swarte, J.L., 5, 40, 50, 52, 55, 60
- Tanjung Priok, 68
- Tanjung Vlakke Hoek, 24, 25
- Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis* (Majalah Sejarah Sosial), 91
- Ulele, xiii
- Vliegen, W.H., 38
- Vromans, A.G., 59, 60, 61, 92
- Waning, C.J.W. van, 51, 60, 61, 62, 93
- Wichers, J.J., 50, 51, 55, 56, 61, 93
- Wilhelmina, 80
- Wolfswinkel, J., 54, 91
- Yogya(karta), xix, 79

Biodata Penulis

Hans (J.C.H.) Blom (lahir di Leiden pada tahun 1943) belajar sejarah di Universitas Leiden dan meraih gelar doktor di universitas itu pada tahun 1975 dengan disertasi *Pemberontakan di kapal De Zeven Provinciën. Tanggapan dan dampak di negeri Belanda (De muitelij op De Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederland)*. Pada tahun 1970 ia mulai bekerja di Universitas Amsterdam, pertama sebagai dosen, dan sejak 1983 hingga 2008 sebagai guru besar di bidang sejarah Belanda. Pada tahun 1996, ia diangkat sebagai direktur Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Di dalam terbitannya, ia membahas berbagai topik yang terutama berhubungan dengan sejarah negeri Belanda pada abad ke-19 dan ke-20. Hans Blom terkenal di antara publik luas pada tahun 1983 dengan orasi pengukuhan sebagai guru besar yang berjudul *In de ban van goed en fout? Wetenschappelijke geschiedschrijving van de bezettingstijd in Nederland*, dan juga karena keikutsertaan di dalam laporan penelitian historis tentang topik-topik yang sangat peka dari masa lalu yang belum lama ini, seperti *De Affaire Menten* (1979) dan *Srebrenica. Een 'veilig gebied'* (2002). Pada tahun akademis 2010-2011 ia memangku jabatan Guru Besar Cleveringa (*Cleveringaleerstoel*) Universitas Leiden.

Hans Blom memangku jabatan keanggotaan banyak komisi dan badan pengurus, antara lain ia menjabat sebagai dekan Fakultas Sastra Universitas Amsterdam, ketua Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, ketua redaksi *Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden*, dan ketua yayasan yang mengadakan kongres dunia sejarawan di Amsterdam pada tahun 2010.

Elly Touwen-Bouwsma (1948) belajar Antropologi Kultural dan Sejarah pada Universitas Amsterdam. Pada tahun 1988 beliau meraih gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul *Negara, Islam dan pemimpin lokal di Madura Barat, Indonesia. Sebuah studi antropologis (Staat, Islam en lokale leiders in West-Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie)*.

Mulai pada tahun 1989 beliau bekerja sebagai kepala Indische afdeling di Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) di Amsterdam. Pada tahun 1996 ia diangkat sebagai kepala informasi dan dokumentasi serta wakil direktur NIOD, dan pada tahun 2009 sebagai direktur koleksi dan pelayanan jasa. Pada tahun 2013, ia meninggalkan NIOD, yang telah dinamakan Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidenstudies, karena pensiun.

Ia menerbitkan berbagai artikel tentang era pendudukan Jepang dan dampaknya bagi grup minoritas seperti orang Belanda Indisch dan orang Tionghoa. Pada tahun 2010 telah terbit studinya mengenai penerapan dan pelaksanaan undang-undang bagi para korban perang *Op zoek naar grenzen*. Elly Touwen-Bouwsma memangku jabatan keanggotaan banyak komisi dan badan pengurus, antara lain menjabat sebagai ketua komisi ilmiah International Institute for Asian Studies di Leiden dan anggota dewan pengurus Raadskamers Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers serta Wet Uitkering Burgeroorlogsslachtoffers dari Pensioen- en Uitkeringsraad.

De Zeven Provinciën

Ketika Kelas Indonesia Berontak (1933)

Pada tahun 1930-an dunia mengalami apa yang disebut zaman *malaise*, krisis ekonomi. Akan tetapi, ketika itu pula pergerakan politik kebangsaan yang radikal menaikkan aktivasnya. Ketika itu pulalah de Jonge, Gubernur Jenderal, yang konservatif, bukan saja mengadakan penghematan anggaran belanja Hindia Belanda, tetapi juga—dan lebih penting—melakukan pengekan pergerakan kebangsaan. Di zaman *malaise* ini beberapa pemimpin pergerakan yang terkemuka, seperti Sukarno, Hatta, dan kawan-kawan ditangkap—tanpa pengadilan, diasingkan.

Dalam suasana ketegangan sosial, politik, dan ekonomi inilah pula peristiwa yang tidak terduga terjadi—kelas-kelas Indonesia di kapal *De Zeven Provinciën* melakukan “pemberontakan”, sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelaksanaan “politik pengurangan gaji” oleh kolonialisme telah memancing keresahan nasional yang selama ini hanya di simpan dalam hati. Ketika anak-kapal Eropa mengalami pengurangan gaji lebih kecil dibandingkan pengurangan gaji kelas pribumi maka diskrepansi kolonial pun tampak sebagai ketidakadilan yang menghina.

Keresahan ekonomi dan ketimpangan sosial telah mempersatukan para kelas Indonesia, yang terdiri atas beberapa suku bangsa dan penganut agama yang berbeda-beda dalam suatu sistem tindakan yang sama. Pemberontakan di kapal *De Zeven Provinciën* adalah cetusan nasionalisme Indonesia yang keras di saat kekuasaan kolonial masih kuat bercokol.

Tentang Penulis:

J.C.H. Blom adalah Profesor Emeritus Sejarah pada Universitas Amsterdam dan mantan kepala Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Elly Touwen-Bouwsma adalah antropolog dan sejarawan, mantan wakil direktur NIOD dan mantan direktur koleksi dan pelayanan jasa NIOD.



Distributor:
Yayasan Obor Indonesia
Jl. Plaju No.10 Jakarta 10230
Telp. (021) 319 26978, 3920114
Faks. (021) 319 24488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id

LIPI Press

